



# Inovasi Pendidikan di Jawa Timur

## Penilaian dan Analisis terhadap Studi Inventarisasi Praktik Baik INOVASI

Februari 2019



## **INOVASI – Innovation for Indonesia’s School Children**

Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270  
Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304

Fax : (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Februari 2019

Foto sampul diambil dari Palladium

*Laporan ini disusun oleh konsultan pendidikan INOVASI, Rina Arianti dan Sheldon Shaeffer.*

*Pemerintah Australia dan Indonesia bermitra melalui program Innovation for Indonesia’s School Children (INOVASI). INOVASI berupaya memahami bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam bidang literasi dan numerasi di berbagai sekolah dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fase pertama program ini (AUD49 juta) dimulai pada Januari 2016, dan akan berlanjut hingga Desember 2019. Bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, INOVASI telah membentuk kemitraan dengan 12 kabupaten/kota di: Nusa Tenggara Barat; Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Utara; dan Jawa Timur.*

INOVASI adalah Program Kemitraan antara Pemerintah Australia–Indonesia – Dikelola oleh Palladium.



[info@inovasi.or.id](mailto:info@inovasi.or.id)



[www.inovasi.or.id](http://www.inovasi.or.id)



[www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP](https://www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP)

# **Inovasi Pendidikan di Jawa Timur:**

## **Tinjauan dan Analisis tentang Studi Inventarisasi Praktik Baik INOVASI**

Februari 2019

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>6</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>8</b>
<b>1. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>12</b>
1.1 Maksud, ruang lingkup, tujuan, dan pentingnya melakukan studi inventarisasi.....	12
1.2 Konteks studi .....	13
<b>2. METODOLOGI UMUM DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM STUDI INI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Kajian Literatur .....	16
<b>3. HASIL .....</b>	<b>27</b>
3.1 Inovasi pendidikan dan praktik menjanjikan di Jawa Timur .....	27
3.2 Melaksanakan inovasi pendidikan dan praktik menjanjikan yang diidentifikasi di Jawa Timur: proses dan struktur kunci yang membuatnya berhasil.....	30
3.3 Bukti dampak inovasi dan praktik baik terhadap hasil yang diperoleh siswa dan guru	39
3.4 Bukti dampak inovasi dan praktik baik terhadap peningkatan kualitas sekolah dan kabupaten.....	40
3.5 Isu besar dari penilaian – apa yang berhasil dan tidak berhasil meningkatkan hasil pembelajaran? .....	41
3.6 Bagaimana praktik yang ada mencerminkan komitmen INOVASI terhadap kesetaraan gender, inklusi sosial, dan perlindungan anak.....	43
3.7 Bagaimana kebijakan dan praktik profesional dipengaruhi oleh inovasi dan praktik menjanjikan .....	46
48	
3.8 Pendidikan di Jawa Timur: konteks untuk inovasi? .....	48
3.9 Tantangan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa.....	50
<b>4. RINGKASAN TEMUAN DAN KESIMPULAN .....</b>	<b>52</b>
<b>5. REKOMENDASI .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1: Nilai rata-rata dalam Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, 2016.....	14
Gambar 2: <i>Market Day</i> di SD Alam Mutiara Umat.....	28
Gambar 3: Alam Mutiara Umat <i>Hall of Fame</i> .....	28
Gambar 4: Contoh komik siswa yang digunakan di SDN Ploso .....	34
Gambar 5: SDN Ploso memakai buku komik sebagai bagian pembelajaran .....	35
Gambar 6: Guru memakai ruang sumber daya untuk menenangkan anak penyandang disabilitas .....	39
Gambar 7: Perbedaan nilai AKSI antara anak perempuan dan laki-laki di Jawa Timur, di bidang bahasa, matematika, dan sains (signifikansi secara statistik).....	44
Gambar 8: Contoh inovasi kelas di SDN Pamalokan, Sumenep.....	47
Gambar 9: Contoh inovasi kelas di SDN Pamalokan, Sumenep .....	47
Gambar 10: Contoh 'sindrom piala' .....	49
Tabel 1: Tahapan perkembangan membaca.....	19
Tabel 2: Lima proses standar untuk memperoleh pengetahuan matematika.....	24

## DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
<i>Adiwiyata</i>	Peduli dan Berbudaya Lingkungan
AKIK	Aktif, Kreatif, Inovatif, Komunikatif
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BERMUTU	<i>Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading</i> , proyek Bank Dunia
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
CfBT	Confederation of British Teachers ( <i>Konfederasi Guru Inggris</i> )
CLCC	Creating Learning Communities for Children ( <i>Menciptakan Komunitas Belajar untuk Anak-anak</i> )
DBE	<i>Decentralised Basic Education</i> , proyek USAID
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> , Australia
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPO	Organisasi Penyandang Disabilitas ( <i>Disabled Persons' Organisation</i> )
EGRA	Penilaian Membaca Kelas Awal ( <i>Early Grade Reading Assessment</i> )
GPK	Guru Pembantu Khusus
INAP	<i>Indonesian National Assessment Program</i>
INOVASI	<i>Innovation for Indonesian School Children</i> Proyek Kemitraan antara Australia-Indonesia
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKKS	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LP2KS	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
MBE	<i>Managing Basic Education</i> , proyek USAID
M&E	Monitoring dan Evaluasi
MEP	Program Peningkatan Matematika ( <i>Mathematics Enhancement Program</i> )
MGT	Pengajaran Kelas Rangkap ( <i>Multi-grade teaching</i> )
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MPL	Tingkat Kemampuan Minimal ( <i>Minimum proficiency levels</i> )
NCTM	Dewan Nasional Guru Matematika ( <i>National Council of Teachers of Mathematics</i> )
NGO	Organisasi Non-Pemerintah ( <i>Non-governmental organization</i> )
OECD	Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi ( <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> )
PAKEM	Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PDIA	Adaptasi Iteratif yang Didorong oleh Permasalahan ( <i>Problem Driven Iterative Adaptation</i> )
Perbup	Peraturan Bupati
Permen	Peraturan Menteri
Permendiknas	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Perpres	Peraturan Presiden
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PISA	Program Penilaian Siswa Internasional ( <i>Program for International Student Assessment</i> )
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PRIORITAS	<i>Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students</i> , proyek USAID
SAKTI	Satu Sekolah Tiga Inovasi
SBM	Manajemen Berbasis Sekolah
SD	Sekolah Dasar
SDN	Sekolah Dasar Negeri

SDIT	Sekolah Dasar Islam Terpadu
SI	Sekolah Inklusif
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TASS	Program Bantuan Teknis untuk Memperkuat Sistem Pendidikan <i>(Technical Assistance for Education System Strengthening program)</i>
UNESCO	Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa <i>(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation)</i>
UNICEF	Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa <i>(United Nations International Children's Emergency Fund)</i>
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi inventarisasi Praktik Baik dan INOVASI Pendidikan praktik baik ini berkontribusi terhadap pencapaian sasaran INOVASI, yakni meningkatkan pembelajaran siswa, dengan memberikan bukti kredibel kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil meningkatkan kualitas sekolah dan memperkuat hasil pembelajaran bagi siswa-siswi sekolah dasar di Jawa Timur. Studi ini menggambarkan pendekatan responsif INOVASI terhadap pembangunan, di mana pemangku kepentingan lokal, dalam hal ini di Jawa Timur, mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi (menciptakan praktik baik dan inovasi) untuk meningkatkan hasil-hasil pembelajaran. Studi ini menggunakan pendekatan berdasarkan Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah, atau *Problem-driven Iterative Adaptation (PDIA)*, di mana, alih-alih menerima solusi yang diberikan dari atas, mereka yang berada di lapangan mengidentifikasi permasalahan dan mengatasinya dengan menerapkan proses iterasi langkah demi langkah, yang memungkinkan terciptanya pembelajaran yang fleksibel dan adaptasi.

Tujuan dan ruang lingkup khusus dari studi ini adalah: untuk mendokumentasikan praktik baik dan inovasi di sekolah-sekolah dasar di Jawa Timur; memahami konteks di mana praktik baik dan inovasi tersebut dikembangkan (dan di beberapa kasus, bagaimana hal-hal tersebut diadaptasi dan dipertahankan); dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang bagaimana menemukan, mengembangkan, dan melaksanakan apa yang paling berhasil dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa secara lebih jauh, terutama di bidang literasi dan numerasi.

Jawa Timur memiliki sistem pendidikan yang terbesar di Indonesia. Di tingkat sekolah dasar, lebih dari 300.000 guru memberikan pendidikan kepada 2,9 juta siswa sekolah dasar di hampir 27.000 sekolah. Seperempat dari sekolah-sekolah tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar Islam) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Dengan tingkat partisipasi murni sebesar 97 persen di tingkat sekolah dasar, hampir seluruh anak usia sekolah dasar dapat bersekolah. Namun, masih terdapat banyak isu penting. Survei Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa kurang dari 10 persen siswa kelas empat SD di Jawa Timur memiliki kemampuan literasi yang baik, kurang dari 4 persen memiliki kemampuan matematika yang baik, dan hanya 1,3 persen memiliki pemahaman sains yang baik. Selain itu, terdapat perbedaan besar dalam hal pencapaian antara wilayah yang maju dengan yang tertinggal.

Pendekatan PDIA yang digunakan sebagai kerangka studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan observasi mendalam, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Langkah-langkah awal dalam tahap pertama studi ini adalah: (1) kajian literatur terhadap dokumen-dokumen kementerian pusat dan pemerintah provinsi, laporan donor, hasil kompetisi inovasi, dan laporan di media sosial; dan (2) pemetaan praktik yang menjanjikan. Hasilnya adalah daftar 165 praktik menjaikan atau inovasi pendidikan. Temuan ini menjadi basis kunjungan yang dilakukan lima tim ke 38 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, untuk mewawancarai staf dinas kabupaten dan sekolah, serta narasumber lain. Dari kunjungan ini, 27 praktik baik dari 16 kabupaten dan tiga kota terpilih untuk didokumentasikan lebih lanjut oleh tim peneliti dan videografer.

Di tahap kedua studi ini, untuk memperkaya pemahaman mengenai proses inovasi di Jawa Timur, tim studi menelaah daftar awal yang berisi 165 praktik baik, dan memilih 30 praktik lainnya untuk dikaji lebih lanjut. Dari kajian tersebut, tim lalu mengumpulkan informasi tambahan terkait 10 dari praktik baik tersebut untuk menentukan apakah mereka layak dicantumkan dalam praktik baik yang ditampilkan oleh INOVASI. Hal ini juga memberikan wawasan lebih lanjut mengenai konteks, prasyarat, dan proses dalam mendesain, menerapkan, mengkaji, mereplikasi, dan mempertahankan praktik baik dan inovasi di provinsi tersebut. Kunjungan sekolah selanjutnya melibatkan diskusi panjang lebar dengan staf sekolah, pengawas, staf dinas kabupaten terkait, dan anggota komite sekolah, serta pengamatan terhadap sekolah beserta fasilitas dan ruang kelasnya. Kunjungan difokuskan pada praktik baik yang terjadi di kelas, wawancara guru dan pengamatan kelas. Metodologi ini diperkaya lebih jauh dengan kunjungan ke dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Timur di Surabaya dan 10 dinas pendidikan kabupaten – lima diantaranya kabupaten yang disasar kegiatan INOVASI di tingkat provinsi. Kunjungan ini difokuskan pada pertanyaan mengapa dan bagaimana proses inovatif ini bisa terjadi, tantangan yang dialami selama proses tersebut, dan cara-cara mengatasinya. Hasilnya, kami menambahkan delapan inovasi atau praktik baik ke

dalam 27 yang sudah ada sebelumnya, di mana delapan praktik baik ini fokus pada: kelas dan guru; literasi komunitas; dukungan guru; dukungan dinas kabupaten atau pengawas; pendidikan inklusif, dan reformasi atau manajemen sekolah secara keseluruhan.

Kajian literatur menyoroti berbagai isu berikut ini, dan bagaimana isu-isu tersebut direfleksikan dalam konteks Indonesia:

- **Pendekatan komprehensif terhadap perubahan** – perlunya bergerak melampaui peningkatan (praktik baik) dalam kualitas sekolah ke arah perubahan ‘pola pikir’ di sekolah dan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang berujung pada cara berpikir dan bertindak yang berbeda secara fundamental (inovasi). Inovasi biasanya lahir dari kepemimpinan yang kuat, pemberdayaan guru, dan kolaborasi erat dengan seluruh komunitas sekolah. Ini akan menghasilkan contoh-contoh yang menurut pendekatan PDIA disebut dengan ‘penyimpangan positif’ – kasus-kasus yang ‘menentang’ harapan dengan menjadi unggul, seringkali dalam kondisi yang sebetulnya tidak kondusif untuk menghasilkan keunggulan.
- **Literasi** – perlunya pendekatan yang jelas, sistematis, dan bertahap untuk mengajarkan literasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak, yang memungkinkan guru menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan pengalaman siswa-siswi mereka. Berbagai studi menunjukkan banyaknya siswa Indonesia yang memiliki hasil literasi yang kurang baik, dengan ketimpangan yang besar berdasarkan wilayah dan status sosial ekonomi. Lebih jauh lagi, kursus pelatihan guru kurang mencakup prinsip-prinsip dasar literasi dan pendekatan belajar mengajar yang tepat. Ini dapat berujung pada kurangnya pemahaman tentang bagaimana siswa belajar membaca dan komponen kunci apa yang dibutuhkan untuk mengajarkan literasi.
- **Numerasi** – perlunya pengajaran numerasi yang mengikuti urutan pemahaman dan perkembangan kemampuan yang logis. Rendahnya prestasi siswa-siswi Indonesia dalam berbagai ujian numerasi mengindikasikan bahwa hal di atas tidak terjadi di sekolah-sekolah. Ini sebagian besar dikarenakan tidak memadainya pelatihan bagi para guru baru, terutama terkait bagaimana siswa mengembangkan konsep angka di tingkat rendah, lalu berpindah ke pengoperasian dan analisis bilangan yang lebih tinggi.
- **Inklusi** – perlunya lebih banyak fokus untuk mengurangi segala hambatan terkait akses dan kualitas Pendidikan, yang meningkatkan kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat di hampir seluruh dunia. Secara global, konsep pendidikan inklusif menyoroti berbagai isu, termasuk jender, kemiskinan, keterpencilan, bahasa, suku, kasta, dan disabilitas. Namun di Indonesia, dan juga Jawa Timur, semua pihak cenderung fokus pada disabilitas dan mengebelakangkan tantangan pembelajaran lainnya.

Studi ini melihat dengan seksama proses-proses inovasi atau praktik baik – bagaimana proses tersebut dimulai dan diterapkan, dikaji, direplikasi, dan dipertahankan. Dalam hal **inspirasi dan desain**, responden mengatakan ada tiga cara yang dapat melahirkan praktik baik: hasil dari adanya pimpinan yang karismatik dan inovatif; melalui pemecahan masalah secara pragmatis, yang seringkali dilakukan oleh sekelompok guru; atau dikarenakan masukan dari sistem yang lebih tinggi atau lembaga eksternal di luar sistem. **Implementasi**, menurut responden, paling bagus dilakukan melalui dukungan dan kolaborasi yang kuat, tidak hanya dari dalam komunitas sekolah (termasuk komite sekolah), tapi juga dengan dukungan sejumlah mitra lainnya, termasuk DPRD; pemerintah kabupaten dan desa; gugus dan pengawas sekolah; dan organisasi masyarakat setempat. **Monitoring dan evaluasi** tidak dianggap penting oleh responden. Inovasi-inovasi yang dikaji hanya sedikit yang memiliki tujuan jelas, dan lebih sedikit lagi yang memiliki indikator keberhasilan atau kegagalan. Tidak ada data awal yang dikumpulkan sebelum memperkenalkan inovasi tersebut, dan segala bukti keberhasilannya secara umum bersifat kualitatif dan anekdotal. **Replikasi** praktik baik dan inovasi biasanya terbatas di dalam sekolah asal inovasi tersebut, atau melalui rapat gugus bulanan – lalu kemungkinan terbesarnya direplikasi di beberapa gugus sekolah. Terkait **keberlanjutan**, terdapat contoh-contoh inovasi yang tidak berlanjut, hilang, dan gagal di banyak sekolah dan dinas, tapi responden menyatakan sejumlah saran untuk mempertahankan inovasi tersebut. Hal ini meliputi: (1) menyesuaikan dengan konteks yang lebih besar; (2) mengembangkan struktur dan lingkungan yang mendukung; (3) memperkenalkan mekanisme

pertanggungjawaban; (4) mendorong proses inovasi yang berkelanjutan dan kolaboratif; (5) membuktikan dampak inovasi tersebut; (6) mengamankan dukungan politik; (7) memastikan kesesuaian inovasi dengan budaya; dan (8) memperoleh dukungan dari komite sekolah dan masyarakat luas.

Sebagian besar studi ini dilakukan untuk melihat dampak dari inovasi dan praktik baik yang telah diidentifikasi. Responden seringkali menyebutkan dampaknya terhadap **hasil terhadap siswa** – kebiasaan membaca yang lebih baik, semangat belajar yang lebih tinggi, kepercayaan diri yang meningkat – tapi hanya ada sedikit bukti konkret dan kuantitatif untuk memastikan klaim ini. Untuk praktik baik yang fokus pada ruang kelas, dampaknya ke **hasil terhadap guru** lebih jelas, terutama ketika kegiatannya melibatkan pengembangan profesional secara spesifik bagi para guru. Ketika kegiatan difokuskan pada perubahan terhadap lembaga secara keseluruhan, misalnya ketika kepala sekolah yang baru bekerja sama dengan guru dan masyarakat luas, membalikkan kondisi penurunan yang dialami oleh sekolah serta meningkatkan kualitas dan statusnya, maka dampaknya lebih jelas terhadap **peningkatan sekolah**.

Terkait pertanyaan lebih luas tentang apa yang berhasil meningkatkan hasil pembelajaran di Jawa Timur, beberapa tema muncul ke permukaan: (1) melekatkan proses inovasi ke dalam rencana pendidikan kabupaten jangka panjang; (2) kolaborasi kuat menuju perubahan antar seluruh anggota staf sekolah dan dengan masyarakat; (3) dukungan sejak dini kepada anak-anak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang dianggap lambat belajar; (4) penggunaan buku-buku besar untuk mengajarkan membaca; (5) mendorong produksi buku lokal dan kebiasaan membaca; (6) membuat kegiatan, serta materi/media pengajaran yang praktis dan dikembangkan secara lokal; (7) kontrak antara dinas kabupaten dan kepala sekolah untuk mendorong peningkatan sekolah; dan (8) menentukan sasaran khusus untuk inovasi baru bagi sekolah, gugus sekolah, dan unit dinas kabupaten.

Di lain pihak, hal-hal yang sepertinya tidak berhasil meliputi: (1) proses monitoring dan evaluasi; (2) dukungan dari pemerintah daerah; (3) program untuk mendorong kesetaraan dan inklusivitas; (4) definisi lebih luas tentang pendidikan inklusif; dan (5) mendorong pola pikir untuk perubahan/reformasi.

Salah satu isu lainnya adalah sejauh mana praktik-praktik yang telah diidentifikasi mencerminkan komitmen INOVASI terhadap gender, inklusi sosial, dan perlindungan anak. Siswa perempuan lebih berprestasi secara akademis daripada siswa laki-laki di Jawa Timur, dan setiap sekolah yang dikunjungi menegaskan hal ini, tapi kesenjangan tersebut bukan dianggap sebagai masalah yang membutuhkan solusi. Kepentingan perlindungan anak dibatasi pada siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di sekolah-sekolah biasa. Dengan menggunakan definisi sempit pendidikan inklusif terkait dengan anak-anak penyandang disabilitas, sebagian besar dinas kabupaten dan sekolah sudah menyadari permasalahan tersebut, dan ingin memperkuat pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini terutama berlaku dalam sekolah-sekolah berlabel sekolah inklusif. Namun, inklusi tersebut hanya terbatas pada anak-anak penyandang autisme dan Sindrom Down, anak hiperaktif, atau yang 'lambat belajar'. Anak-anak dengan disabilitas sensorik dan fisik biasanya bersekolah di sekolah-sekolah khusus.

Studi ini pada akhirnya mengidentifikasi tantangan dan ketimpangan pengetahuan terkait peningkatan sekolah dan hasil pembelajaran. Hal ini meliputi: (1) kurangnya pemahaman umum tentang bagaimana mengajarkan literasi dan numerasi; (2) ketiadaan pendekatan strategis untuk mengembangkan, menerapkan, menyebarluaskan, dan mempertahankan praktik-praktik baik; (3) dukungan profesional dan pengawasan terhadap guru yang tidak konsisten; (4) dukungan oleh pemerintah daerah yang tidak konsisten; dan (5) ketidaksetaraan yang terus ada dalam hal akses dan prestasi, serta kurangnya minat untuk mengatasinya.

## Kesimpulan

- Ketertarikan untuk mengembangkan praktik-praktik yang lebih baik dan mendorong inovasi secara lebih komprehensif terlihat tinggi di Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan yang dinyatakan oleh responden dan dilaporkan di atas.

- Banyak praktik baik tidak dimasukkan ke dalam pendekatan komprehensif sekolah terhadap inovasi dan perubahan atau proses pengimbasan lebih luas ke lebih banyak guru, sekolah, dan kabupaten.
- Selama pelatihan pra-jabatan, guru tidak cukup dilatih secara sistematis menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan siswa dan bertahap untuk mengajarkan literasi dan numerasi, terutama di kelas-kelas awal.
- Meskipun Indonesia memiliki komponen sistem pendukung peningkatan sekolah dan pengembangan guru yang kuat (dinas kabupaten, gugus sekolah, pengawas), responden merasa komponen-komponen ini tidak selalu bersinergi untuk memberikan dukungan tersebut.
- Proses monitoring pelaksanaan praktik dan inovasi baru serta evaluasi dampak akhirnya terhadap peningkatan sekolah dan hasil pembelajaran siswa belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik di Jawa Timur.
- Definisi pendidikan inklusif yang diadopsi di Jawa Timur hanya terbatas pada penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengabaian secara umum terhadap masalah ketidaksetaraan dan kesenjangan dalam akses dan kualitas di antara sejumlah kelompok yang kurang beruntung.
- Walaupun sekolah-sekolah dan dinas-dinas kabupaten di Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, pelaksanaan peraturan presiden dan menteri terkait pendidikan inklusif tersebut tidak konsisten.

### **Rekomendasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- Mencari cara-cara untuk mendorong minat yang lebih besar untuk mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan praktik baik dan inovasi yang lebih komprehensif di seluruh sistem pendidikan, serta mendorong dinas-dinas kabupaten dan pengawas untuk mengidentifikasi dan merawat inovasi tersebut.
- Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas pembelajaran tingkat awal, terutama terkait literasi dan numerasi.
- Mengembangkan mekanisme yang sistematis dan komprehensif untuk mendorong peningkatan kualitas sekolah. Antara lain, Kemendikbud sebaiknya memperjelas peran dan hubungan antar berbagai aktor yang fokus pada kualitas sekolah di tingkat daerah.
- Mendorong budaya monitoring dan evaluasi yang lebih kuat terhadap sistem pendidikan, hingga sampai ke tingkat sekolah.
- Mengadopsi definisi lebih luas untuk pendidikan inklusif – sesuai dengan penggunaan yang berlaku di dunia internasional – yang mencakup segala hambatan terkait akses dan pembelajaran di sekolah.
- Memperkuat regulasi yang terkait dengan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas.
- Menilai kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan secara lebih menyeluruh, dan bertindak lebih agresif untuk menguranginya.

### **Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten**

- Memberikan dukungan yang lebih kuat dan konsisten untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memperluas praktik baik dan inovasi demi peningkatan sekolah dan hasil pembelajaran siswa yang lebih baik.
- Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara seluruh aktor yang terlibat dalam peningkatan kualitas.
- Memberikan lebih banyak dukungan dan pengembangan profesional, baik untuk guru yang menjalani pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang literasi dan numerasi di kelas awal.
- Memberikan perhatian lebih besar terhadap permasalahan ketidaksetaraan dan kesenjangan lainnya.
- Terus mempromosikan dan mengembangkan pendidikan yang inklusif untuk penyandang disabilitas.

# 1. LATAR BELAKANG

## 1.1 Maksud, ruang lingkup, tujuan, dan pentingnya melakukan studi inventarisasi

Studi inventarisasi praktik baik ini<sup>1</sup> dirancang untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran INOVASI, yakni meningkatkan pembelajaran siswa, dengan memberikan bukti kredibel kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil meningkatkan kualitas sekolah dan memperkuat hasil pembelajaran bagi siswa-siswi sekolah dasar di Jawa Timur. Studi ini menggambarkan pendekatan responsif INOVASI terhadap pembangunan, dimana pemangku kepentingan lokal, dalam hal ini di Jawa Timur, mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi (praktik baik dan inovasi) untuk meningkatkan hasil-hasil pembelajaran. Dalam hal ini, studi ini menggunakan pendekatan berdasarkan Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah, atau *Problem-driven Iterative Adaptation* (PDIA), yang tidak berfokus pada penerimaan solusi yang diberikan dari atas, melainkan pada permasalahan yang diidentifikasi di tingkat bawah, untuk kemudian diatasi dengan mengikuti proses bertahap, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan adaptasi<sup>2</sup> (Andrews, Pritchett, Woolcock 2017).

Tahap pertama dari studi inventarisasi komprehensif di Jawa Timur ini mengamati lebih dalam mengenai inovasi dan praktik menjanjikan di bidang pendidikan dengan menjajaki, misalnya: bagaimana penerapannya, dalam konteks apa diterapkan; bagaimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja guru dan/atau pembelajaran siswa; sumber praktik tersebut; apakah berkelanjutan, dan mengapa; apakah sudah dikembangkan lebih luas; serta dimana dan bagaimana inovasi dan praktik tersebut berlangsung. Tahap kedua membangun bukti dari tahap pertama untuk memperkaya pemahaman kita terhadap proses inovasi di Jawa Timur, dan membantu mengidentifikasi praktik baik dan inovasi spesifik<sup>3</sup> yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan INOVASI di masa mendatang.

Secara khusus, maksud dan ruang lingkup studi ini adalah untuk mendokumentasikan praktik baik dan inovasi di sekolah-sekolah dasar di Jawa Timur, memahami konteks dimana praktik dan inovasi tersebut dikembangkan (dan, dalam beberapa kasus, diadaptasi dan dilanjutkan/dipertahankan), dan memberikan rekomendasi kepada dinas pendidikan kabupaten dan kota tentang bagaimana menemukan lebih jauh, lalu menerapkan apa yang paling berhasil dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa, terutama di bidang literasi dan numerasi – yang merupakan sasaran program mendasar INOVASI. Tahap kedua dirancang untuk menilai, menganalisis, dan mensintesis bukti kredibel agar dapat digunakan para pendidik di Indonesia, terutama berkaitan dengan berbagai permasalahan berikut yang dicantumkan dalam strategi panduan program INOVASI pada Januari 2018:

- Perubahan kebijakan dan praktik apa yang berhasil meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Indonesia;
- Sejauh mana praktik baik telah atau dapat dibagikan atau diperluas pelaksanaannya ke berbagai sekolah, kabupaten, dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi atau nasional;
- Apakah ada bukti praktik yang efektif, yang dapat mempengaruhi pemerintah kabupaten, provinsi, atau nasional untuk mengadopsi atau mengadaptasi kebijakan dan praktik untuk mendukung peningkatan hasil-hasil pembelajaran.

Studi ini juga mempertimbangkan seberapa jauh praktik yang kami analisis mencerminkan komitmen INOVASI terhadap kesetaraan gender, inklusi sosial, dan perlindungan anak, atau apakah hal-hal tersebut memerlukan

---

<sup>1</sup> Tim sangat dibantu oleh dukungan programatik dan logistik yang diberikan Eko Purnomo dan kantor INOVASI di Jawa Timur. Sebagian materi untuk bagian 1 dan 2 diambil dari konsep kegiatan proyek INOVASI.

<sup>2</sup> Banyak aktor yang mengembangkan inovasi dan praktik baik yang telah diidentifikasi dalam riset ini secara tidak sadar menggunakan pendekatan ini saat menganalisis apa yang tidak efisien atau efektif di sekolah dan kelas mereka, lalu kemudian mencoba solusi baru terhadap permasalahan yang telah ditemukan.

<sup>3</sup> Lihat diskusi yang lebih rinci di bagian 2.1 mengenai perbedaan antara 'praktik baik' dan 'inovasi'.

perhatian lebih jauh di dalam kebijakan dan praktik. Karena itu, dalam kegiatan di lapangan, analisis, sintesis, dan pelaporan studi ini, kami memberikan pertimbangan khusus untuk isu-isu lintas bidang tersebut.

## 1.2 Konteks studi

Dunia sedang menghadapi krisis serius di bidang pendidikan. Estimasi terbaru dari Lembaga Statistik UNESCO mengindikasikan bahwa lebih dari 617 juta anak-anak dan remaja – sekitar 60 persen dari jumlah total kelompok usia tersebut – belum mencapai tingkat kemampuan minimum dalam membaca, dan ini mencakup 387 juta anak-anak usia sekolah dasar (6-11 tahun). Di Asia Timur dan Tenggara, 29 persen dari kelompok usia ini (atau 48 juta anak) juga belum mencapai prestasi yang diharapkan (31 persen laki-laki dan 26 persen perempuan). Lebih mengagetkan lagi, 68 persen dari anak-anak tersebut bersekolah dan akan menyelesaikan tingkat terakhir sekolah dasar tanpa mencapai tingkat kemampuan minimum. Dua puluh persen lainnya bersekolah, tapi tidak akan mencapai tingkat Akhir– di mana 60 persen di antaranya akan berhenti bersekolah di antara kelas 1 – 3. Di bidang matematika, 27 persen dari kelompok usia ini belum mencapai tingkat kemampuan minimum (28 persen laki-laki dan 27 persen perempuan) (Institut Statistik UNESCO 2017).

Banyak faktor berkontribusi terhadap situasi ini, berdasarkan indikator mencakup ‘Indeks Akhir Masa Kanak-Kanak 2018’ yang baru dikembangkan, mencakup: tingkat kematian dan stunting pada anak di bawah usia lima tahun; persentase anak-anak yang tidak bersekolah; tingkat pekerja anak dan pernikahan remaja (dan tingkat persalinan remaja); dan tingkat penelantaran paksa anak-anak dan pembunuhan anak. Dalam indeks ini, Indonesia menempati peringkat 105 dari 175 negara, dan persentase anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang tidak bersekolah tercatat berada pada angka 14,2 persen (Geoghegan 2018: 31).

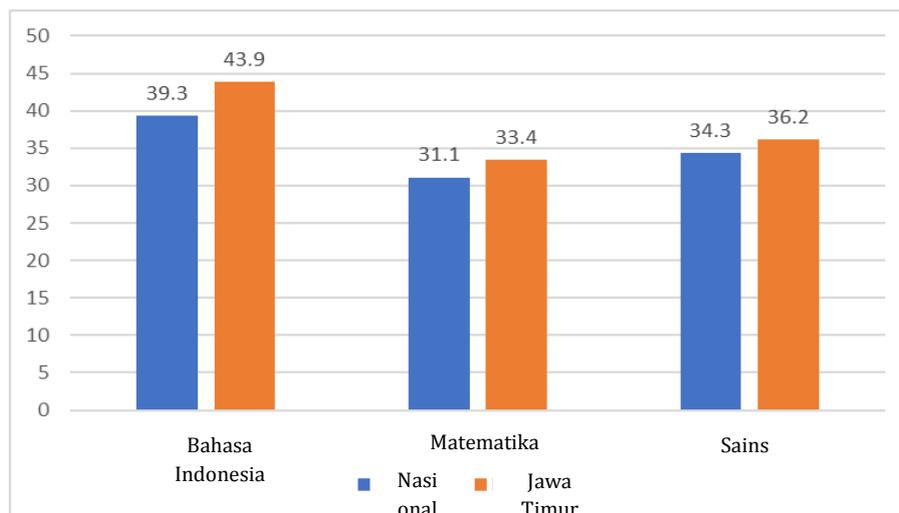
Menariknya, menurut laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), Indonesia memiliki ‘indeks inovasi gabungan keseluruhan’ tertinggi kedua, dari 2002 hingga 2011 (OECD 2014).<sup>4</sup> Namun demikian, menurut berbagai penilaian prestasi internasional (PISA, TIMSS), hasil-hasil akademik Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam penilaian tersebut (lihat bagian 2 untuk perincian lebih lanjut). Analisis kesenjangan antara inovasi dan prestasi yang aktual menjadi salah satu fokus dari studi ini.

Jawa Timur memiliki sistem pendidikan yang terbesar di Indonesia. Di tingkat sekolah dasar, lebih dari 300.000 guru mendidik 2,9 juta siswa sekolah dasar di hampir 27.000 sekolah. Seperempat dari sekolah-sekolah tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar Islam yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama). Dengan tingkat partisipasi bersih sebesar 97 persen di tingkat sekolah dasar, hampir seluruh anak usia sekolah dasar dapat bersekolah. Namun, masih terdapat banyak isu penting. Survei Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) tahun 2016 menunjukkan bahwa kurang dari 10 persen siswa kelas empat SD di Jawa Timur memiliki kemampuan literasi yang baik, kurang dari 4 persen memiliki kemampuan matematika yang baik, dan hanya 1,3 persen memiliki pemahaman sains yang baik. Meskipun terdapat data ini, kualitas pendidikan di provinsi Jawa Timur masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional (lihat Gambar 1), namun beberapa kabupaten memiliki hasil pendidikan yang jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan sekaligus mengatasi kesenjangan ini menjadi prioritas yang disepakati bersama (Kemendikbud, tanpa tanggal).

---

<sup>4</sup> Namun, indikator yang digunakan seluruhnya fokus pada pendidikan sekolah menengah dan patut dipertanyakan – termasuk kriteria seperti: penyampaian data pencapaian prestasi sekolah menengah untuk publik; lebih banyak pengamatan guru di kelas IPA; dan lebih banyak penggunaan penjelasan dalam mata pelajaran matematika di sekolah menengah – dan sepertinya hampir seluruhnya dinilai dengan pelaporan sendiri.

**Gambar 1: Nilai rata-rata dalam Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, 2016**



## 2. METODOLOGI UMUM DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM STUDI INI

Metodologi umum dari studi inventarisasi praktik baik ini didasarkan pada keperluan strategi program umum INOVASI sebagaimana diuraikan di atas: (1) mengidentifikasi perubahan kebijakan dan praktik yang berhasil meningkatkan pembelajaran siswa; (2) menganalisis sejauh mana praktik baik telah, atau dapat dibagikan, atau diperluas pelaksanaannya ke berbagai sekolah, kabupaten, dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi atau nasional; dan (3) menilai apakah ada bukti praktik efektif yang dapat mempengaruhi pemerintah kabupaten, provinsi, atau nasional untuk mengadopsi atau mengadaptasi kebijakan dan praktik untuk mendukung peningkatan hasil-hasil pembelajaran.

Kerangka teori untuk studi ini adalah pendekatan Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah, atau *Problem-driven Iterative Adaptation* (PDIA). Pendekatan ini tidak difokuskan pada solusi yang didesain dari atas, baik oleh donor maupun dari kementerian pusat, yang biasanya berkaitan dengan isu nasional, melainkan pada permasalahan yang diidentifikasi di tingkat bawah oleh sekolah dan masyarakat lokal. Permasalahan ini kemudian diatasi dengan mengikuti proses langkah demi langkah yang dapat menciptakan pembelajaran dan adaptasi yang fleksibel (Andrews, Pritchett, Woolcock 2017). Menurut pendekatan PDIA, proses ini sangat penting untuk menemukan “apa yang berhasil” meningkatkan hasil pembelajaran dengan mengidentifikasi contoh-contoh praktik baik dan inovasi yang dapat diperluas dan dipertahankan atau dilanjutkan, bukan dengan pendanaan donor atau mandat dari pusat, tapi dengan inisiatif lokal.

Praktik-praktik terbaik ini seringkali merupakan contoh dari apa yang disebut dengan ‘penyimpangan positif’ (positive deviance)– kasus-kasus yang menonjol melampaui ekspektasi, seringkali dalam kondisi yang tidak kondusif. Menjadi “pelaku penyimpangan positif” berarti berpindah dari apa yang disebut oleh PDIA sebagai ranah ‘praktik yang ada/existing practices’ (yang dimungkinkan secara administratif dan politis namun bukan serta merta sesuatu yang baru atau baik secara teknis), dan dari ranah ‘solusi yang tepat secara teknis’ (yang secara agregat berusaha menemukan ‘satu cara terbaik’ untuk melakukan sesuatu) ke ranah penyimpangan positif yang ‘berkaitan dengan ide yang sedang diterapkan dalam konteks perubahan (karena itu mungkin dilakukan) dan yang menimbulkan hasil positif (memecahkan masalah dan karenanya menjadi tepat secara teknis, tapi bukanlah cara yang biasa (oleh sebab itu disebut dengan penyimpangan)’ (Andrews, Pritchett dan Woolcock 2017: 174).

Pendekatan PDIA menggunakan metode penelitian kualitatif, yang diadopsi oleh studi inventarisasi praktik baik ini – termasuk observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Untuk tujuan awal, yakni

mengidentifikasi ‘pelaku penyimpangan positif’, langkah-langkah awal di tahap pertama studi ini adalah: (1) kajian literatur terhadap dokumen-dokumen kementerian pusat dan pemerintah provinsi, laporan donor, hasil kompetisi terkait inovasi, dan laporan di media sosial; dan (2) pemetaan praktik yang menjanjikan. Hasilnya adalah daftar 165 kandidat praktik baik atau inovasi. Ini menjadi basis kunjungan yang dilakukan lima tim ke 38 kabupaten dan kota di provinsi Jatim untuk mewawancarai staf dinas kabupaten dan sekolah, serta narasumber lain. Inovasi dan praktik tersebut kemudian dinilai dari segi keunikannya, kegunaannya dalam konteks lokal, dan berdasarkan rekomendasi dari penelitian lapangan. Praktik baik dan inovasi tersebut lalu akhirnya dikelompokkan untuk merepresentasikan kegiatan yang fokus pada kualitas pengajaran kelas, dukungan terhadap para guru atau pendidikan inklusif, serta perbedaan geografis atau budaya di provinsi Jawa Timur. Dari asesmen ini, 27 praktik baik dari 16 kabupaten dan tiga kota telah dipilih untuk didokumentasikan lebih lanjut oleh tim peneliti dan videografer. Praktik-praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Lima belas di antaranya berkaitan erat dengan praktik-praktik belajar mengajar yang baik, dengan fokus pada literasi dan numerasi;
- Sembilan lainnya fokus pada dukungan guru dan pengembangan profesional melalui inovasi lebih luas yang didorong oleh kepala sekolah, pengawas, gugus, dan dinas pendidikan; dan
- Tiga lainnya berkaitan dengan sekolah inklusif untuk penyandang disabilitas.

Bagian 3.1 memberikan analisis lebih lanjut dan terperinci dari kategori-kategori tersebut.

Tahap kedua studi ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang proses inovasi di Jawa Timur. Anggota tim di tahap kedua awalnya meninjau 27 inovasi atau praktik baik yang telah diidentifikasi melalui inventarisasi di tahap pertama. Karena praktik-praktik yang telah dipilih di tahap pertama sebagian besar lebih menganalisis kegiatan kelas atau guru daripada perubahan pada sekolah secara luas, peneliti kemudian meninjau ulang daftar awal yang berisi 165 kegiatan untuk memilih 30 kegiatan lainnya untuk ditinjau lebih lanjut. Ini terutama mencakup kasus-kasus yang dianggap sebagai pendekatan yang inovatif terhadap pendidikan inklusif. Melalui diskusi lanjutan dengan anggota tim di tahap pertama dan wawancara telepon, jumlah praktik dan inovasi yang ditinjau pada akhirnya dikurangi menjadi 15. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, tim studi memutuskan untuk mengunjungi 10 diantaranya<sup>5</sup> untuk mengumpulkan informasi tambahan dan menentukan apakah mereka layak dicantumkan dalam praktik-praktik baik yang ditampilkan INOVASI. Kunjungan ini juga berhasil memperkuat pemahaman kami terhadap konteks, prasyarat, dan proses dalam mendesain, melaksanakan, menilai, mereplikasi, dan mempertahankan praktik baik dan inovasi di provinsi Jawa Timur.

Selama kunjungan ini, juga diadakan diskusi panjang dengan staf dan pengawas sekolah, staf dinas kabupaten terkait, dan anggota komite sekolah, serta observasi kawasan sekolah, fasilitas, dan ruang kelas. Ketika focus kunjungan adalah praktik baik di ruang kelas, kami juga mewawancarai para guru dan mengamati kelas-kelas tersebut.

Tim di tahap kedua mengunjungi sekolah atau dinas kabupaten berikut ini:

- Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Faizin (Sampang)
- SDN Mojokarang (Kabupaten Mojokerto)
- SD Ar Rahman (Jombang)
- SDN Patihan (Kota Madiun)
- Dinas Pendidikan Kabupaten, Madiun
- SDN Karang (Kabupaten Ponorogo)
- SDN Ploso (Kabupaten Pacitan)
- SD Islam Al Azhaar (Kabupaten Tulungagung)

---

<sup>5</sup> Kami juga mengunjungi lima dari 27 praktik baik terpilih yang berada di Sumenep, dan pimpinan tim mengunjungi satu praktik baik yang ada di daftar awal di Turen, Malang.

- SD Alam Mutiara (Kabupaten Tulungagung)
- SDN Kandangan (Kabupaten Kediri)

Mengingat prioritas INOVASI terkait dengan Pengajaran Kelas Rangkap (PKR) muncul setelah dilakukannya inventarisasi tahap pertama, setelah berkonsultasi dengan Technical Assistance for Education System Strengthening (TASS) yang didanai DFAT dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tim juga mengunjungi SDN Suruh Wadang di Kabupaten Blitar, yang pernah menerapkan salah satu program pengajaran kelas rangkap terbaik di seluruh kabupaten tersebut (Lihat Lampiran A dan D untuk uraian inovasi atau praktik baik yang diamati di sekolah ini).

Metodologi ini diperkaya lebih lanjut melalui kunjungan ke dinas pendidikan provinsi Jawa Timur dan kantor kementerian agama di Surabaya serta 10 dinas pendidikan di tingkat kabupaten. Lima diantaranya berada di kabupaten yang disasar oleh kegiatan INOVASI di provinsi Jawa Timur.<sup>6</sup> Kunjungan ini difokuskan pada aspek “mengapa” dan “bagaimana” terkait proses yang inovatif, tantangan dalam proses tersebut, dan cara-cara mengatasinya. (Lihat Lampiran B untuk daftar lengkap lembaga yang dikunjungi dan jabatan dari para responden yang kami temui.)

Dua jadwal wawancara disusun untuk tahap kedua ini – satu untuk wawancara di tingkat dinas kabupaten dan provinsi, dan satu untuk sekolah dan program yang dikunjungi (Lihat Lampiran C untuk jadwal-jadwal tersebut). Pertanyaan dalam jadwal ini sebagian besar diambil dari isi konsep kegiatan program INOVASI, dengan beberapa pertanyaan tambahan berdasarkan ketertarikan anggota tim dan saran dari staff INOVASI. Tim studi juga meninjau dokumen dan data yang relevan terhadap studi ini dari laporan lembaga pembangunan, dokumen pemerintah (misalnya pedoman dan peraturan), dan materi di tingkat kabupaten dan sekolah.

Pada akhirnya data lapangan pada tahap kedua mencakup catatan yang ditulis oleh dua anggota tim utama, berdasarkan pertanyaan wawancara dan notulensi diskusi yang ditulis oleh anggota tim dari Jawa Timur. Tiga anggota tim studi berbagi dan membandingkan asesmen mereka terkait dinas atau sekolah yang dikunjungi setelah selesai melakukan kegiatan setiap harinya, dan segala isu menarik yang diangkat tapi tidak cukup dibahas dalam wawancara awal ditindaklanjuti dalam kunjungan ke dinas dan sekolah selanjutnya. Tim juga melihat uraian rinci dari 165 praktik baik yang ditulis oleh anggota tim di tahap pertama, dan catatan wawancara mereka dengan staf dinas kabupaten. Analisis data selanjutnya dari berbagai sumber ini, berikut kesimpulan dan rekomendasi, sebagian besar didasarkan pada proses kualitatif pensintesisan data tersebut, perbandingan hasil dari seluruh dinas dan sekolah yang dikaji, dan berdasarkan pada asesmen dan interpretasi dari anggota tim peneliti. Saat dimungkinkan, kami memasukkan lebih banyak temuan kuantitatif, namun kecilnya jumlah sampel sekolah dan kabupaten, serta inkonsistensi terkait siapa yang diwawancarai di dinas kabupaten (terkadang staf senior, terkadang staf yang lebih junior) membuat kami sulit untuk menarik kesimpulan kuantitatif yang lebih pasti.

## 2.1 Kajian Literatur

### **Pendekatan komprehensif menuju perubahan**

Studi ini terutama tertarik dengan literatur yang fokus pada pentingnya untuk mencapai lebih dari sekedar peningkatan-peningkatan kecil dalam hal kualitas sekolah – seperti praktik baru pengajaran di kelas atau pelatihan penguatan bagi satu guru per sekolah – menjadi upaya kolaborasi seluruh komunitas sekolah untuk mewujudkan perubahan yang menyeluruh dan bertahan lama. Michael Fullan, seorang pejabat ternama di bidang reformasi pendidikan, membahas isu ini dengan menekankan pentingnya kepala sekolah untuk bertindak sebagai pemimpin kuat dan visioner yang menggerakkan seluruh staf dan masyarakat luas menuju peningkatan kualitas sekolah secara berkelanjutan, dan karena itu juga meningkatkan hasil-hasil pembelajaran siswa:

---

<sup>6</sup> Dinas kabupaten di Sumenep, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Blitar, Gresik dan Sampang; dan dinas kota di Batu, Malang dan Madiun

'Intinya, dalam menangani staf mereka, kepala sekolah harus beralih dari fokus pada setiap guru secara individu, menjadi memimpin kegiatan kolaboratif yang meningkatkan kualitas seantero sekolah' (Fullan 2014).

Michael Fullan dan Joanne Quinn kemudian menerangkan bahwa 'budaya koheren adalah budaya yang mencerminkan pemahaman bersama yang mendalam tentang tujuan dan kondisi suatu pekerjaan ... satu-satunya cara mengembangkan [pemahaman ini] adalah melalui interaksi sehari-hari yang bermakna dan spesifik oleh seluruh anggota sekolah' (Fullan dan Quinn 2016). Kegiatan kolaboratif seperti ini, apakah di masing-masing sekolah, melalui gugus sekolah, atau bahkan dalam sistem pendidikan yang lebih luas, sangatlah penting untuk meningkatkan sekolah dan hasil pembelajaran.

Ide-ide ini diperkuat oleh penelitian The Head Foundation tentang pendidikan guru di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa:

'... perubahan efektif dalam praktik-praktik pengajaran bergantung pada praktik berbagi, berkolaborasi, dan kepemimpinan instruksional [namun]... Terdapat ketimpangan yang tidak terelakkan antara kompetensi guru dan pimpinan sekolah yang dibutuhkan dan yang ada saat ini dalam melaksanakan kebijakan pendidikan baru dengan baik ...

... penekanan lebih besar perlu diberikan pada peran kepala sekolah sebagai pimpinan instruksional; dan dalam konteks perubahan yang terus-menerus, mereka harus dipersiapkan untuk memimpin perubahan, bukan dipimpin oleh perubahan' (The HEAD Foundation 2018: 3, 7).

Andy Hargreaves mengutarakan pandangan serupa terkait pentingnya aksi komprehensif di seluruh sekolah untuk meningkatkan kualitas, dengan fokus khusus pada kolaborasi guru:

'Guru dapat dikatakan membuat perbedaan atau tidak terhadap pembelajaran, capaian, dan perkembangan siswa, dari dampak yang mereka hasilkan ketika bekerja sama, bukan hanya dampak yang mereka ciptakan sendiri-sendiri. Ini adalah kekuatan dari modal sosial, di samping modal manusia. Modal sosial mencakup dampak signifikan yang dihasilkan guru pada siswanya melalui akumulasi efek dari praktik profesional yang mereka lakukan. Modal sosial meliputi kegiatan-kegiatan antara lain kerja kolaboratif; pengambilan keputusan bersama; pengajaran bersama; tanggung jawab bersama atas keberhasilan seluruh siswa di semua kelas, sekolah, dan kelas; saling percaya dan membantu; pembagian kepemimpinan; tim data; komunitas belajar profesional; jejaring dan federasi profesional; dan banyak kegiatan kolaboratif lainnya' (Hargreaves 2016).

Tantangan bagi Indonesia dalam hal ini, sebagaimana diindikasikan satu kajian, adalah:

'... pelaksanaan reformasi pendidikan apapun terbukti sulit ... karena ketidaksesuaian antara tingginya permintaan akan pendidikan yang berkualitas di satu sisi, dan rendahnya dukungan, baik secara kebijakan dan praktik, untuk guru yang berkualitas di sisi lain' (The HEAD Foundation 2018: 1).

Ini berujung pada catatan terakhir tentang peristilahan. Ada semacam kerancuan terkait istilah-istilah seperti 'praktik terbaik', 'praktik baik', 'praktik menjanjikan' dan 'inovasi' (atau 'praktik inovatif' atau bahkan 'praktik terbaik dalam inovasi'). Istilah 'praktik terbaik' kini secara umum dihindari, karena sulit untuk menilai apa yang terbaik (dan dibandingkan dengan apa) dalam konteks apapun. Bagi program INOVASI, istilah 'paling sesuai' digunakan dalam kerangka PDIA, tapi istilah praktik baik dan inovasi seringkali digunakan secara bergantian. Isu pentingnya, sebagaimana disebutkan dalam pendekatan PDIA yang melekat dalam teori perubahan INOVASI, adalah untuk mencari tahu 'apa yang berhasil' – apakah itu praktik baik yang lebih terfokus, atau inovasi yang lebih luas dan komprehensif. Dan "apa yang berhasil" sebaiknya diambil dari pendekatan yang beradaptasi dan beriterasi di tingkat daerah, bukan hanya puas dengan sesuatu yang baik secara teknis atau dimungkinkan secara politik, tapi mencari yang paling sesuai dalam konteks lokal.

Michael Fullan membuat perbedaan berikut ini dalam wawancaranya dengan Manoj Chandra Handa:

'Jika suatu institusi hanya melakukan peningkatan [praktik yang lebih baik], mereka akan melewatkan inovasi. Jika suatu institusi hanya berpindah dari inovasi ke inovasi, mereka tidak akan melakukan konsolidasi. Jadi aspek "keduanya" yang harus disatukan ... Saya mengatakan: Kita telah bekerja di bidang literasi, numerasi, peningkatan dan retensi sekolah yang tinggi, dan kita harus terus melakukan itu. Kita perlu melakukan peningkatan terus-menerus yang dibutuhkan untuk terus menaikkan standar dan mengurangi ketimpangan. Tapi saya juga mengatakan: Selagi kita melakukan itu, kita sebaiknya menambahkan sejumlah kecil, dan ini adalah ungkapan yang bagus, *inovasi terfokus*. Jadi, inovasi terfokus tentang *memperdalam pembelajaran* – tidak hanya literasi dan numerasi, tapi juga berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, kewarganegaraan, dan pengembangan karakter. Itu yang lebih mendalam. Ini inovatif, dan benar-benar memajukan' (Fullen 2015).

Hal ini menyiratkan bahwa kita perlu melihat praktik baik sebagai bahan bangunan utama menuju inovasi yang lebih komprehensif, dan bahwa inovasi ini pada akhirnya harus berujung pada perubahan pola pikir – cara-cara berpikir dan bertindak yang secara fundamental berbeda-beda, yang menghasilkan pembelajaran lebih dalam. Oleh karena itu, kata 'inovasi' dalam laporan ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghasilkan perubahan institusional dan sistemik yang lebih fundamental.

### **Literasi**

Dapat membaca dan menulis – dalam bahasa apapun, terutama dalam bahasa ibu dan bahasa resmi negara kita – merupakan prasyarat untuk dapat belajar seumur hidup atau berpartisipasi penuh dalam budaya kita sendiri dan dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Meskipun ada banyak teori tentang perkembangan anak dan sejumlah metode untuk mengajarkan literasi, satu hal sudah jelas: anak-anak seharusnya tidak dipaksa untuk dapat membaca dan menulis terlalu dini atau sebelum mereka siap, mampu, dan mau untuk melakukannya. Memaksa anak-anak membaca dan menulis secara prematur berisiko mengubah mereka yang pada umumnya 'lamban belajar' menjadi buta huruf secara permanen. Justru, anak-anak harus diarahkan dan dibantu untuk menguasai sejumlah keterampilan pra-literasi atau pra-membaca, pada tingkat kecepatan mereka sendiri, dan sebaiknya dilakukan di lingkungan rumah mereka atau dalam program PAUD, sampai mereka siap untuk menyerap literasi secara penuh di kelas-kelas awal pendidikan dasar. Memastikan kelas-kelas awal tersebut berdasarkan pada apa yang sudah diketahui dan mampu dilakukan anak-anak secara logis dan sistematis menjadi sebuah tantangan di Indonesia, seperti juga di banyak negara lain (Roskos *et al.* 2009; Segal *et al.* 2006; RTI International 2009).

Pendekatan yang bertahap dan lebih lambat untuk dapat membaca dan menulis ini tidak populer karena beberapa alasan:

- Orang tua ingin anak mereka bisa membaca dan menulis di usia dini (banyak diantaranya lebih memilih anak belajar Bahasa Inggris daripada bahasa ibu atau bahkan bahasa nasional mereka);
- Guru PAUD dan SD kelas awal merasa wajib untuk mengikutinya, didorong oleh orang tua dan standar tidak realistis yang ditetapkan pembuat kebijakan di kementerian, perencana, dan penyusun kurikulum;
- Penyusun kurikulum dan penulis buku pelajaran, dimana banyak diantara mereka menerbitkan materi mereka sendiri di pasar, mendorong dibanjirinya PAUD dan sekolah dasar dengan buku catatan, teks, dan kegiatan yang menggunakan kertas dan pensil dibandingkan lembar kegiatan dan kegiatan seni, bercerita, dan menulis yang lebih memperkaya anak-anak.
- Politisi dan pembuat kebijakan mendapatkan dukungan dengan memperkenalkan langkah-langkah yang dianggap pemilih dapat menjamin pendidikan yang lebih baik – misalnya penguasaan literasi lebih cepat dan pengenalan Bahasa Inggris lebih dini.

Tapi semakin banyak survei di seluruh dunia – baik perbandingan internasional di tingkat menengah, seperti Studi mengenai Tren dalam Matematika dan Sains Internasional atau *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan Program Penilaian Siswa Internasional atau *Program for International Student Assessment* (PISA), maupun survei nasional, seperti Asesmen Membaca Kelas Awal atau *Early Grade Reading Assessments* (EGRA) – menunjukkan bahwa pendekatan yang sekarang digunakan untuk mencapai

literasi ternyata tidak berhasil (Gove dan Cvelich 2010). Studi dari seluruh dunia mengungkapkan hasil yang mengejutkan, bahwa sejumlah besar persentase anak-anak sekolah dasar di berbagai kelas tidak dapat membaca cerita yang ditujukan untuk kelas yang jauh lebih rendah. Dalam studi EGRA di Timor Leste, misalnya, 40 persen anak-anak tidak dapat membaca satu kata pun di akhir kelas dua (Amorin, Stevens dan Gacougnolle 2010).

Beberapa model menjelaskan bahan bangunan yang diperlukan untuk mewujudkan literasi, berdasarkan usia. Salah satunya, yang menjadi dasar bagi banyak asesmen membaca kelas awal, menunjukkan berbagai tahapan perkembangan membaca, dengan tiga tahapan awal yang fokus pada kemampuan dasar (atau pra-literasi) untuk belajar membaca (Rosko *et al.* 2009).

**Tabel 1: Tahapan perkembangan membaca**

Tahap	Nama	Apa yang Dipelajari
Tahap 0: Lahir hingga kelas satu	Kemunculan literasi	Menguasai bahasa verbal, sangat mengandalkan gambar dalam teks, berpura-pura membaca, mengenali rima
Tahap 1: Awal kelas satu	Menguraikan kode ( <i>decoding</i> )	Mulai menyadari hubungan suara/symbol, fokus pada simbol cetak, berupaya menguraikan kode cetak, menggunakan penguraian kode untuk memahami kata-kata
Tahap 2: Akhir kelas satu hingga akhir kelas tiga	Konfirmasi dan kelancaran berbahasa	Mengembangkan kelancaran membaca. Mengenali pola kata, memeriksa arti dan rasa, mengetahui kata-kata yang sering dilihat
Tahap 3: Kelas empat hingga kelas delapan	Belajar hal baru (satu sudut pandang)	Menggunakan bacaan sebagai alat pembelajaran, menerapkan strategi membaca, memperluas kosa kata dalam membaca, memahami dari satu sudut pandang
Tahap 4: Pendidikan menengah dan awal pendidikan tinggi	Berbagai sudut pandang	Menganalisis yang dibaca, bereaksi secara kritis terhadap teks, menangani berlapis-lapis fakta dan konsep, memahami dari berbagai sudut pandang
Tahap 5: Akhir pendidikan tinggi dan pasca sarjana	Pandangan tentang dunia	Mengembangkan pandangan menyeluruh tentang dunia dengan membaca

Namun, tidak ada daftar yang disepakati secara universal, berdasarkan usia, mengenai apa jenis kemampuan pra-literasi yang sebaiknya dikuasai anak-anak di tahap 0 – kemunculan literasi. Ini secara khusus terkait dengan anak maupun bahasa yang dipelajari. Literasi dalam huruf Cina diperoleh dengan kecepatan yang berbeda dengan literasi dalam huruf Thailand (dimana tidak ada spasi antara kata-kata dalam sebuah kalimat) atau dalam abjad Romawi (sebagaimana digunakan di Indonesia). Bahkan, terdapat perbedaan di antara bahasa yang menggunakan abjad Romawi, misalnya pada kemungkinan memperkirakan bagaimana sebuah kata diucapkan sesuai ejaannya. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan umum mengenai bahan bangunan yang sangat penting untuk perkembangan literasi – bahan bangunan yang dapat ditanamkan sejak usia dini. Menurut Segal *et al.*, hal ini meliputi:

1. *Basis pengetahuan yang bermakna* berkembang melalui banyaknya pengalaman beragam dengan berbagai materi, tempat, dan orang. Pengembangan kosa kata terjadi dengan membicarakan pengalaman tersebut.
2. *Bahasa verbal/oral* berkembang melalui partisipasi dalam komunikasi dua arah, percakapan antar individu, dan diskusi kelompok. Melihat buku dan membacakan buku keras-keras kepada anak-anak juga mendorong kemampuan bahasa oral mereka.
3. *Kesadaran fonologis* berkembang dengan memperhatikan suara, bermain dengan bunyi dari kata-kata, dan memperhatikan bunyi dari awal kata. Anak-anak senang dengan kata yang berima dalam lagu dan cerita.
4. *Kesadaran materi tercetak* berkembang saat anak-anak memperhatikan kegunaan dari sesuatu yang tercetak. Ini terjadi seiring mereka bereksperimen dengan membuat catatan dan mencorat-coret, dan saat mereka menemukan kata dalam baris yang tercetak.
5. *Pengetahuan abjad* berkembang saat anak-anak mengenali dan menyebutkan nama huruf dan nama huruf yang mewakili bunyi tertentu' (Segal *et al.* 2006).

Berdasarkan kemampuan kemunculan literasi ini, anak-anak lalu berpindah ke tahap 1 (menguraikan kode), kemudian tahap 2 (konfirmasi dan kelancaran berbahasa).

Berkaitan dengan lima tahap perkembangan literasi ini, Panel Membaca Nasional Amerika Serikat atau *National Reading Panel of the United States* menyoroti lima langkah penting untuk memberikan instruksi membaca yang efektif, yaitu:

1. *Kesadaran fonemik* – instruksi yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak kemampuan agar fokus, memanipulasi, dan memisahkan bunyi (atau fonem) dalam kata-kata;
2. *Fonika* – instruksi yang dirancang untuk membantu pembaca memahami dan menerapkan pemahaman bagaimana huruf berhubungan dengan bunyi (fonem) untuk membentuk korespondensi bunyi-huruf (grafem-fonem) dan pola pengejaan;
3. *Kelancaran* – instruksi, terutama melalui membaca dengan panduan, yang memperkuat kemampuan membaca secara oral dengan kecepatan, ketepatan, dan ekspresi yang tepat;
4. *Kosa kata* – instruksi, baik eksplisit maupun implisit, untuk meningkatkan pengetahuan oral dan cetak terhadap kata-kata, sebuah komponen penting dari pemahaman dan membaca; dan
5. *Pemahaman* – instruksi yang mengajarkan siswa untuk secara aktif terlibat dan mengambil makna dari teks yang mereka baca' (RTI International 2009: 12).

Berpindah terlalu cepat – contohnya, ke membaca kata-kata lengkap sebelum membangun kesadaran fonemik atau mendorong kelancaran yang lebih tinggi dengan mengorbankan pemahaman – berarti banyak anak akan dipaksa melewati beberapa tahapan dan tidak pernah memperoleh kemampuan literasi penting yang mereka butuhkan. Situasi ini dapat berujung pada nilai akademis di bidang literasi yang rendah, yang ditemukan di Indonesia.

Permasalahan di banyak negara adalah anak-anak tidak secara sistematis diajarkan kemampuan pra-literasi atau kemunculan literasi di PAUD atau kelas awal, terutama dengan cara dan kecepatan yang realistis dan dapat dicapai bagi banyak anak berusia muda. Anak-anak sangat diharapkan untuk dapat membaca dan menulis sendiri, seringkali terbukti dalam padatnya kurikulum yang bahkan ditemukan di kelas awal. Namun, langkah dan metode pengajaran yang dibutuhkan untuk mewujudkannya – mengikuti perkembangan alami anak, membangun pembelajaran anak dari yang mereka ketahui, dan tidak menyerah apabila mereka tidak belajar secepat teman-teman mereka – masing kurang.

Terlepas dari hal tersebut, penelitian juga mengindikasikan bahwa:

'... pengajaran literasi yang efektif di tahun-tahun awal sekolah itu lebih dari sekedar "metode", melainkan kombinasi kompleks dari filosofi, metode, pengembangan guru, dan budaya sekolah. Guru yang efektif akan mengkombinasikan pendekatan mereka dalam mengajarkan literasi, dan dikotomi seperti versi berorientasi pada fonika dan pendekatan berbasis literatur, sepertinya tidak relevan dengan konteks kehidupan nyata' (Hall, Larson dan March 2003: 11-12).

*The Australian Committee for the National Inquiry into the Teaching of Literacy* sampai pada kesimpulan serupa:

'Guru memerlukan berbagai strategi pengajaran yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan pembelajaran setiap anak. Penyediaan berbagai kemampuan mengajar tersebut merupakan tantangan bagi lembaga pendidikan guru dan bagi guru-guru itu sendiri, karena mereka bertanggung jawab atas pembelajaran literasi dari seluruh kelas' (Rowe 2005).

Kesimpulannya, pengajaran literasi sebaiknya mengikuti pendekatan yang jelas dan sistematis terhadap langkah-langkah yang dibutuhkan untuk bisa menguasai literasi dan memastikan para guru mampu menyesuaikan metode yang mereka digunakan dengan kebutuhan dan pengalaman masing-masing siswa.

Situasi di Indonesia menunjukkan permasalahan yang timbul ketika proses untuk bisa membaca dan menulis tidak mengikuti urutan sistematis dan logis yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Intinya, para guru tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam mengajarkan membaca dan pemahaman serta bagaimana kemampuan literasi berkembang dan seharusnya diperkenalkan.<sup>7</sup> Pengenalan prinsip dasar literasi selama pendidikan pra-jabatan guru cukup terbatas, pendekatan yang paling tepat bagi anak-anak Indonesia kurang jelas, dan dukungan dari kepala sekolah dan pengawas sangat minim, karena mereka mungkin lebih tidak tahu tentang prinsip tersebut dibandingkan guru-guru itu sendiri. Situasi ini jauh dari rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh temuan dari program rintisan terbaru mengenai kualitas guru:

'Materi literasi disusun berdasarkan hasil temuan dari rintisan Guru Baik, yang secara umum menyimpulkan bahwa meskipun guru dapat mengidentifikasi permasalahan dalam mengajarkan literasi, mereka tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk menentukan solusi yang efektif di luar satu rencana pembelajaran untuk menangani satu kompetensi. Kami dengan sendirinya dapat melihat ini tidak cukup untuk membekali mereka dengan pemahaman yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan literasi siswa mereka. Kami berhasil mengubah pola pikir dan membuka mata mereka terhadap pembelajaran yang menyenangkan, tapi tantangan sebenarnya untuk meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa melalui pengajaran yang lebih baik belum tercapai. Mereka tidak dapat menemukan solusi karena kurangnya pemahaman akan bagaimana siswa belajar membaca dan komponen kunci membaca yang diperlukan untuk mengajar' (Komunikasi pribadi, Lynne Hill, Manajer Teknik Pendidikan INOVASI, 21 September 2018).

Data dari beberapa asesmen yang dilakukan di Indonesia memperkuat permasalahan terkait dengan penguasaan literasi.

**Program Penilaian Siswa Internasional atau *Program for International Student Assessment (PISA)*** – Definisi literasi dari PISA 2016 adalah sebagai berikut: 'Literasi membaca adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan bergumul dengan teks untuk mencapai sasaran, meningkatkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di masyarakat' (PISA 2016: 11). Indonesia menunjukkan kenaikan absolut dalam nilai PISA antara 2003 dan 2015 (18 poin di bidang literasi) dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil melakukan hal tersebut. Ini dicapai meski terjadi peningkatan besar dalam jumlah siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah. Tapi peringkatnya jika dibandingkan dengan

---

<sup>7</sup> 'Kompetensi utama dan struktur kurikulum pendidikan guru sekolah dasar' untuk Universitas Terbuka di Indonesia (lembaga yang memberikan paling banyak gelar sarjana di bidang pengajaran di Indonesia) memberikan tujuh dari 89 SKSnya untuk mengembangkan 'kompetensi utama', terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Indonesia (dengan SKS lain untuk 'kemampuan' Indonesia dan Bahasa dan literatur Indonesia), dan SKS lainnya mencakup riset, teknologi informasi, manajemen sekolah, sains, matematika, seni, olahraga, pendidikan lingkungan, statistik, Bahasa Inggris, dan Hak Asasi Manusia. Tidak ada SKS yang dialokasikan untuk 'kompetensi pendukung'.

negara lain masih bermasalah. Dalam PISA 2015, Indonesia menempati peringkat terakhir dari 44 negara, dan nilai rata-rata membacanya turun dari 402 di tahun 2009 menjadi 396 di 2012, kemudian naik menjadi 397 di 2015. Selain itu, lebih dari 70 persen peserta di Indonesia tidak menjawab satupun pertanyaan tes dengan benar, sementara di Vietnam, seperempat pertanyaan dijawab dengan tepat oleh 70 persen siswa (Bank Dunia 2018). Secara keseluruhan, 75,7 persen siswa yang dites di Indonesia dianggap 'berprestasi rendah'.<sup>8</sup>

**Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)** – Asesmen ini, berdasarkan sampel representative secara nasional yang diuji pada 2016, mengindikasikan bahwa 46,83 persen anak-anak yang diuji dianggap kurang memuaskan dalam hal membaca. Di Jawa Timur, angkanya adalah 30,76 persen, lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (41,73 persen) dan Jawa Barat (42,8 persen) (Kemendikbud, tanpa tanggal).

**Penilaian Membaca Kelas Awal atau *Early Grade Reading Assessment (EGRA)*** – Studi nasional di tahun 2014 ini menyimpulkan bahwa meskipun siswa di Indonesia berprestasi cukup baik dalam tes EGRA dibandingkan dengan negara lain, lebih dari separuh anak-anak yang diuji di akhir kelas dua belum lancar membaca dan memahami bacaannya (mereka belum siap untuk kelas tiga). Seperempat lainnya dapat membaca dan memahami, tapi belum lancar, dan hampir 6 persen digolongkan sebagai 'tidak dapat membaca':

'Lebih spesifik lagi, para siswa mengerjakan dengan baik di sebagian besar sub-tugas, dengan prestasi terbaik dalam mengenali huruf/nama, membaca bacaan secara oral, pemahaman bacaan, dan kosa kata oral. Rata-rata, siswa sepertinya mengalami kesulitan dengan bacaan non-kata dan sub-tugas terkait dikte. Namun, isu terbesarnya adalah membedakan bunyi awal dan pemahaman pendengaran' (Stern, Dubeck dan Dick 2018).

Terdapat pula ketimpangan serius menurut wilayah, dimana 16 persen dari siswa yang diuji (di akhir kelas dua) di Papua-Maluku dianggap siap masuk kelas tiga (dan 22 persen dianggap belum dapat membaca), dibandingkan dengan 50 persen yang siap masuk kelas tiga di Jawa-Bali (dan hanya 3 persen belum bisa membaca) – kategori lainnya adalah lancar, diberikan arahan, dan pemula.

Dalam ringkasan akhirnya, laporan EGRA, mengikuti literatur yang telah dibahas di atas, juga mendorong adanya strategi fleksibel yang tepat untuk konteks Indonesia:

'Pengajaran di kelas harus menyesuaikan dengan berbagai profil pelajar. Setiap profil membutuhkan fokus pengajaran yang dapat membantu meningkatkan siswa dari satu profil ke profil berikutnya. Secara khusus, pengajaran bagi mereka yang belum dapat membaca sebaiknya fokus pada pengetahuan huruf, karena pengetahuan mereka akan kemampuan mendasar ini masih terbatas. Untuk pemula, yang dapat mengidentifikasi sebagian besar huruf yang mereka lihat secara benar, pengajaran kepada mereka harus fokus untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk menguraikan kode. Siswa dapat mengikuti instruksi ini perlahan-lahan dan dapat menguraikan kode secara akurat, hanya saja belum secara otomatis. Untuk memperbaiki hal ini, mereka perlu latihan membaca teks sesuai kelas mereka, yang akan membuat mereka bisa membaca dengan lancar. Pembaca yang lancar sudah secara otomatis dan akurat mengenali kata, tapi memerlukan dukungan terkait dengan kemampuan kosa kata dan pemahaman untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Dan terakhir, siswa yang siap masuk ke kelas tiga sudah lancar dan memahami teks untuk kelas dua. Mereka sebaiknya berinteraksi dengan berbagai teks dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat' (Stern, Dubeck dan Dick 2018: 67)

Jadi, meskipun pencapaian literasi siswa Indonesia tidaklah seburuk di negara lain, pengukuran menunjukkan adanya permasalahan serius, terutama dalam hal kesenjangan antara berbagai kelompok populasi dalam kaitannya dengan status sosial ekonomi siswa, lokasi geografis, dan 'kekayaan' sekolah. Misalnya, satu studi menemukan bahwa 10 persen guru terbaik hanya terkonsentrasi di beberapa sekolah tertentu yang dianggap sebagai 'sekolah bagus' (Rarasati *et al.* 2017: 27). Walaupun tidak didukung dengan data kuantitatif, responden yang diwawancarai dalam studi ini dengan jelas menjabarkan perbedaan kualitas antara sekolah perkotaan/besar dan sekolah perdesaan/kecil. Mereka juga mengakui bahwa sebagian besar kompetisi antar

---

<sup>8</sup> Tidak jelas mengapa hasil EGRA lebih baik dibandingkan dengan hasil PISA dan AKSI.

sekolah yang diselenggarakan setiap tahunnya lebih memihak pada sekolah besar/perkotaan daripada sekolah kecil/perdesaan, dan sekolah besar/perkotaan memiliki persentase guru pegawai negeri sipil tetap yang jauh lebih besar (dengan pengalaman dan masa jabatan yang cukup lama dalam profesi mereka), sementara sekolah perdesaan/kecil sebagian besar berisikan guru-guru yang kurang berpengalaman, kurang stabil kontraknya, dan digaji lebih kecil.

Kami perlu menambahkan bahwa definisi 'literasi' lebih luas yang dibutuhkan untuk hidup di abad ke-21 – literasi dalam teknologi informasi, kewarganegaraan, keuangan, lingkungan, keilmuan, dan literasi budaya – hanya mendapatkan sedikit perhatian di sekolah-sekolah yang dikunjungi di Jawa Timur. Hanya di satu sekolah yang menjadi 'sekolah rujukan' yang berkualitas di Sumenep, stafnya dapat menyebutkan berbagai literasi ini dan menjelaskan bagaimana mereka berupaya menangani definisi yang lebih luas tersebut.

### **Numerasi**

Di abad ke-21, setiap orang membutuhkan kemampuan matematika yang tinggi agar dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang bermanfaat saat bekerja, dan terinformasi dengan baik. Partisipasi tersebut diperoleh dari kemampuan memahami konsep besar sains dan teknologi, serta banyak bidang ilmu sosial. Kemampuan matematika terutama penting dalam lingkungan ekonomi global yang kompetitif yang selalu berubah. Kemampuan matematika diperlukan untuk bertahan dalam ketersediaan lapangan kerja yang berkembang pesat, dan mereka yang memiliki kemampuan tersebut kemungkinan akan memiliki peluang dan pilihan karir yang lebih besar dibandingkan yang tidak. Namun, masih ada banyak kesulitan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mendukung semua siswa dalam mencapai potensi matematika mereka. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kesulitan tersebut, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk: kurangnya guru dengan pengetahuan matematika yang memadai; terlalu banyak tenaga pengajar paruh waktu; dan sistem pendidikan yang menekankan pada ujian, bukan pengajaran (Burghes 2012). Sama seperti literasi, tantangan tersebut juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendekatan strategis dan sistematis dalam mengajar matematika.

Berbagai kerangka telah disusun untuk menganalisis cara yang paling tepat untuk mengajarkan matematika. Salah satu kerangka – belum diterapkan di Indonesia – menggunakan 'Prinsip dan Standar untuk Matematika di Sekolah' yang dikembangkan oleh Dewan Nasional Guru Matematika atau *National Council of Teachers of Mathematics* (NCTM) (Van de Walle, Karp dan Bay-Williams 2012). Dewan ini didirikan pada tahun 1920 dan saat ini merupakan organisasi pendidikan matematika terbesar di Amerika Serikat dan Kanada.

Dalam kerangka ini, enam prinsip menjadi dasar dari pendidikan matematika yang berkualitas: kesetaraan; konten/kurikulum; pengajaran; pembelajaran; penilaian; dan teknologi. Dalam prinsip pembelajaran, misalnya, siswa harus belajar memahami matematika dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki untuk membangun pengetahuan dan keterampilan baru. Siswa tidak hanya diharuskan untuk memiliki kemampuan berhitung dalam matematika, tapi juga kemampuan untuk berpikir dan berlogika secara matematika untuk mengatasi masalah baru, dan mempelajari ide-ide baru yang mereka temui di masa depan.

Lima standar konten dalam kerangka ini adalah: angka dan operasi bilangan; aljabar; geometri; pengukuran; dan analisis data dan probabilitas. Menurut kerangka ini, setiap standar konten harus dicantumkan dalam kurikulum matematika di sekolah dasar dan disesuaikan kedalaman dan kompleksitasnya untuk setiap tingkatan kelas. Contohnya, angka dan operasi bilangan sebaiknya diajarkan dari pra-sekolah hingga kelas lima, dan semakin berkurang penekanannya di kelas-kelas yang lebih tinggi.

Lima standar proses meliputi: pemecahan masalah; berpikir logis dan dengan bukti; komunikasi; koneksi; dan representasi. Ini mengacu pada proses matematika dimana siswa dapat mempelajari, memperoleh, dan menggunakan pengetahuan matematika. Hal ini diuraikan lebih rinci di Tabel 2 (Van de Walle, Karp dan Bay-Williams 2012).

**Tabel 2: Lima proses standar untuk memperoleh pengetahuan matematika**

<b>Lima proses standar dari <i>Prinsip dan standar untuk matematika di sekolah</i></b>	
<p><b>Standar pemecahan masalah</b> Program instruksional dari pra-TK hingga kelas 12 seharusnya membuat seluruh siswa mampu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah</li> <li>• Memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan konteks lainnya</li> <li>• Menerapkan dan mengadaptasikan berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah</li> <li>• Memonitor dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematika</li> </ul>
<p><b>Standar penalaran dan pembuktian</b> Program instruksional dari pra-TK hingga kelas 12 seharusnya membuat seluruh siswa mampu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyadari penalaran dan pembuktian sebagai aspek fundamental dari matematika</li> <li>• Membuat dan menyelidiki preposisi matematika</li> <li>• Menyusun dan mengevaluasi argument dan bukti matematika</li> <li>• Memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode pembuktian</li> </ul>
<p><b>Standar komunikasi</b> Program instruksional dari pra-TK hingga kelas 12 seharusnya membuat seluruh siswa mampu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengorganisir dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika melalui komunikasi</li> <li>• Mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara koheren dan jelas ke teman, guru, dan orang lain</li> <li>• Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematika dan strategi orang lain</li> <li>• Menggunakan bahasa matematika untuk mengungkapkan ide matematika dengan tepat</li> </ul>
<p><b>Standar koneksi</b> Program instruksional dari pra-TK hingga kelas 12 seharusnya membuat seluruh siswa mampu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenali dan menggunakan koneksi antara ide matematika</li> <li>• Memahami bagaimana ide matematika saling terhubung dan membangun satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang koheren</li> <li>• Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika</li> </ul>
<p><b>Standar representasi</b> Program instruksional dari pra-TK hingga kelas 12 seharusnya membuat seluruh siswa mampu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, merekam, dan mengkomunikasikan ide matematika</li> <li>• Memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematika untuk memecahkan masalah</li> <li>• Menggunakan representasi untuk membuat model dan menafsirkan fenomena fisik, sosial, dan matematika</li> </ul>

Amanda Morin memberikan contoh lain tentang urutan pembelajaran matematika dan berpendapat bahwa muatan matematika di sekolah dasar seharusnya mempertimbangkan bagaimana orang mengembangkan kemampuan matematika mereka sepanjang hidup. Anak-anak berkembang dengan kecepatan mereka sendiri, tapi umumnya kita mengharapkan mereka untuk mencapai tahapan pencapaian tertentu. Contohnya, tahapan pencapaian untuk siswa kelas satu dan dua adalah: memprediksi yang akan muncul berikutnya dalam sebuah pola dan menciptakan pola mereka sendiri; mengetahui perbedaan antara bentuk dua dan tiga dimensi, dan mengetahui nama bentuk-bentuk dasar (kubus, kerucut, silinder); berhitung sampai 100 dengan menghitung satu-satu, dua-dua, lima-lima, dan sepuluh-sepuluh; menulis dan mengenali angka 0 sampai 100 dan kata-kata untuk angka dari satu sampai dua puluh; melakukan penjumlahan dan pengurangan dasar hingga 20; membaca dan membuat grafik batang sederhana; dan mengenali dan mengetahui nilai uang logam (Morin, tanpa tanggal).

Pembelajaran lebih praktikal telah didapatkan dari tiga negara yang menunjukkan keunggulan di bidang pengajaran matematika: Hungaria, Jepang dan Finlandia. Masing-masing negara tersebut mempunyai praktik baik mereka sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Dari penelitian mereka tentang praktik-praktik tersebut, CfBT Education Trust menyusun Program Penguatan Matematika atau *Mathematics Enhancement Program* (MEP) (Burghes 2012). Rekomendasi kunci untuk pengajaran matematika yang lebih baik dalam program tersebut antara lain:

1. *Pelajaran dipersiapkan dengan baik* – guru mengetahui rencana pelajaran dengan baik dan menyadari permasalahan atau kesulitan yang mungkin akan muncul, sumber daya yang dipunyai, dan siswa memiliki sumber daya sendiri di meja mereka.
2. *Pengajaran yang bersifat interaktif mencakup seluruh kelas, dengan jeda terencana yang diisi kegiatan individu dan berpasangan* – seluruh siswa mengerjakan tugas dan seluruhnya diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan, menjawab, menjelaskan, memberi saran, mengkritisi, dan seterusnya.
3. *Adanya atmosfir yang ramah dan tidak konfrontasional, dimana siswa saling belajar dan mendukung satu sama lain* – kesalahan digunakan sebagai poin pengajaran, semangat diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan, dan ketika layak, diberikan pujian.
4. *Menggunakan kurikulum spiral dengan revisi terus-menerus* – mendorong belajar dalam hati, dengan kemajuan dalam langkah-langkah kecil dan logis.
5. *Visualisasi dan manipulasi digunakan di tahun-tahun awal dan dengan siswa yang berkemampuan kurang* – konteks dikaitkan dengan pengalaman siswa, apabila dimungkinkan.
6. *Latihan diperiksa secara interaktif dengan seluruh kelas secara bersamaan* – siswa, bukan guru, yang memberikan solusi, dan teman sekelas lainnya setuju atau tidak setuju atau menyarankan solusi alternatif. Siswa diharapkan untuk mengkoreksi pekerjaan mereka sendiri.

Sama seperti literasi, penilaian pencapaian matematika di Indonesia secara umum memberikan hasil yang kurang memuaskan, sebagaimana ditunjukkan angka-angka berikut ini:

- Dalam TIMSS 2015, lebih dari 70 persen siswa yang diuji memperoleh nilai 'rendah' atau 'dibawah rendah' dibandingkan dengan nilai yang diharapkan (TASS, tanpa tanggal).
- AKSI 2016 melaporkan bahwa 77,13 persen siswa yang diuji mendapatkan nilai yang kurang memuaskan di bidang matematika (Kemendikbud, tanpa tanggal).
- Mirip dengan nilai AKSI, PISA di tahun 2012 menunjukkan bahwa 75,7 persen siswa yang diuji memperoleh nilai rendah, dan dalam PISA 2015, persentase ini hanya sedikit berkurang, menjadi 74,6 persen. Perbedaan besar juga terjadi antara anak dari keluarga kaya dan anak dari keluarga miskin. Namun, nilai absolutnya meningkat 11 poin dari 2012 hingga 2015 dan dari 2003 hingga 2015, Indonesia mencapai tingkat perbaikan nilai matematika yang tertinggi (27 poin) di antara seluruh negara yang berpartisipasi. Ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya nilai awal yang dijadikan ukuran peningkatan tersebut. Tapi bahkan dengan tingkat perbaikan tersebut, diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 50 tahun untuk mencapai tingkat terkini dari negara-negara OECD (Bank Dunia *et al.* 2018).

Selain itu, dalam ujian nasional sekolah menengah pertama tahun 2018, nilai rata-rata matematika menurun dari 50,31 di 2017 menjadi 43,32, dan sains dari 52,18 menjadi 47,32. Kemendikbud menyakini penurunan ini terutama disebabkan oleh pengenalan prosedur ujian yang lebih berbasis komputer (dan karenanya 'lebih jujur'). Di tahun 2017, sekolah-sekolah yang memiliki 'indeks integritas rendah' (kemungkinan lebih besar untuk mengubah hasil) memperoleh nilai 73,05, tapi diantara sekolah tersebut yang menggunakan komputer di tahun 2018 (kecil kemungkinan untuk mengubah hasil), nilainya jauh lebih rendah, yakni di 45,04. Nilai sekolah yang menggunakan komputer di tahun 2018 dan 2018 hanya mengalami perubahan sebesar 0,4 poin (TASS, tanpa tanggal).

Banyak permasalahan mengenai pengajaran literasi yang dibahas diatas juga terjadi pada pengajaran numerasi.<sup>9</sup> Pelatihan sistematis dalam bidang matematika tidak memadai untuk pendidikan guru pra-jabatan, dan karenanya, bahkan jika guru telah menguasai bidangnya (dan menurut data, banyak yang belum menguasai), mereka kurang memahami bagaimana siswa mengembangkan konsep angka di tingkat awal dan bergerak dari konsep tersebut menuju operasi dan analisis yang lebih tinggi.

## Inklusi

Inklusi sosial semakin dianggap sebagai salah satu tantangan besar dalam pembangunan global, seiring berkembangnya berbagai jenis kesenjangan di banyak negara di dunia. Ini paling mudah terlihat di bidang ekonomi, dengan terjadinya perubahan dalam koefisien Gini. Peningkatan koefisien ini menjadi pertanda meningkatnya disparitas, dan Indonesia memiliki tingkat disparitas tertinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara (IMF 2016). Tapi terdapat pula kekuatiran terkait kelompok lain yang biasanya tersisihkan atau terpinggirkan, contohnya: etnis minoritas yang bahasa dan budayanya terancam punah; perempuan dan anak perempuan yang terus menghadapi diskriminasi dikarenakan keuntungan dan peluang yang seringkali hanya tersedia bagi laki-laki dan anak laki-laki; imigran dan pengungsi yang melarikan diri dari privatisasi ekonomi, persekusi politik, konflik atau bencana alam; masyarakat dari wilayah perdesaan, terpencil, dan kurang berkembang; dan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.

'Pendidikan inklusif' dipandang sebagai salah satu cara untuk memitigasi kesenjangan tersebut. Istilah ini awalnya digunakan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas atau *Disabled Persons' Organisations* (DPO) yang mengadvokasi adanya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Istilah 'pengarusutamaan' dan 'integrasi' sepertinya mendorong inklusi berupa kehadiran secara fisik dalam kelas, tapi belum tentu mencakup inklusi dalam pembelajaran. Meski banyak anak penyandang disabilitas bersekolah di sekolah biasa, bukan sekolah khusus, organisasi-organisasi tersebut melihat ini sekedar tanggapan yang dangkal atas tuntutan pendidikan mereka. Sistem ini sama sekali tidak menjamin anak-anak tersebut menikmati fasilitas dan pelayanan yang mereka butuhkan, dan guru tidak dilatih untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan apa yang mereka ingin pelajari.

Pendukung pendidikan untuk kelompok marjinal lainnya mulai mengakui istilah 'pendidikan inklusif' berguna untuk menjelaskan situasi banyak anak-anak yang juga, berada secara fisik di sekolah tapi tidak menerima pembelajaran. Jadi, istilah ini didefinisikan ulang untuk merespon seluruh jenis hambatan dalam bersekolah dan belajar (disertai kekecewaan dari sebagian organisasi penyandang disabilitas) (Shaeffer 2010).

Perubahan ini tercermin dalam jarak antara Konferensi Dunia Salamanca tentang Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas, yang memberikan *lip service* terkait definisi yang lebih luas ini namun pada intinya fokus pada disabilitas (Kementerian Pendidikan dan Sains, Spanyol 1994) dengan Konferensi Internasional Jenewa tentang Pendidikan Inklusif: Jalan menuju Masa Depan, yang diselenggarakan UNESCO di tahun 2008. Konferensi Jenewa ini secara jelas mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai berikut:

'Sebuah proses untuk mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan seluruh siswa dengan meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan komunitas, dan mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Ini melibatkan perubahan dan modifikasi terkait muatan, pendekatan, struktur, dan strategi ... dan keyakinan bahwa sistem reguler yang berjalan bertanggung jawab untuk mendidik seluruh anak-anak' (UNESCO 2009).

Definisi luas ini semakin dapat diterima oleh pendidik, peneliti, lembaga pembangunan, dan pemerintah nasional. Namun, di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mempromosikan definisi

---

<sup>9</sup> 'Kompetensi utama dan struktur kurikulum untuk pendidikan guru sekolah dasar' di Universitas Terbuka mencakup mata kuliah: konsep dasar matematika untuk sekolah dasar; pendidikan matematika di kelas awal; pendidikan matematika di kelas yang lebih tinggi; dan perkembangan pendidikan matematika untuk sekolah dasar. Namun, total SKSnya, yaitu sembilan dari 89 SKS, diberikan untuk mengembangkan 'kompetensi utama', dan tidak ada SKS di bidang matematika dalam 56 sisanya yang diperuntukkan untuk 'kompetensi pendukung'.

lebih sempit yang fokus pada disabilitas, sehingga tidak ada unit khusus yang secara luas memikirkan anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak belajar. Lebih jauh lagi, isu disabilitas di Indonesia merupakan permasalahan besar. Studi terbaru memperlihatkan bahwa dari 25 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah, 'indeks paritas disabilitas yang telah disesuaikan' untuk literasi di Indonesia (angka literasi bagi penyandang disabilitas dibagi dengan angka literasi bagi yang tidak menyandang disabilitas) adalah 0,49 untuk penduduk berusia 14 tahun ke atas. Ini hampir sama dengan angka populasi (0,51) yang tidak pernah bersekolah. Hanya ada empat negara dari 25 negara tersebut yang memiliki indeks paritas lebih rendah dari Indonesia (UNESCO Institute of Statistics 2018).<sup>10</sup> Definisi pendidikan inklusif juga menentukan apa yang dianggap pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah sebagai 'sekolah inklusif', karena sekolah-sekolah tersebut fokus pada anak penyandang disabilitas, sementara 'kebutuhan khusus' anak-anak tersisihkan lainnya dikarenakan jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, kekayaan atau kemiskinan, dan lokasi (terpencil dan perdesaan) tidak dipertimbangkan.

Dorongan penting dari kegiatan INOVASI berkaitan dengan isu lintas bidang terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), dan perlindungan anak. GESI mengacu pada: penyandang disabilitas; perempuan dan anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki; dan orang dari berbagai kelompok etnis atau bahasa (INOVASI 2017). Namun, meskipun INOVASI menggunakan definisi inklusi yang luas, yang semakin dapat diterima secara global, kategori eksklusi yang paling terlihat dalam kegiatan INOVASI di Jawa Timur adalah terkait disabilitas. Jadi, di tahap pertama studi inventarisasi, kompilasi inovasi dan praktik yang dicantumkan fokus pada pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Kumpulan lebih besar yang berisi 165 praktik baik tidak mencantumkan isu apapun yang berkaitan dengan anak perempuan (terutama terkait akses dan pendidikan berkelanjutan) dan anak-anak dari kelompok minoritas secara bahasa atau yang hidup di wilayah terpencil. Ini sebagian besar disebabkan karena dinas pendidikan dan sekolah tidak menganggap kelompok tersebut membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, untuk tujuan laporan ini, pembahasan pendidikan inklusif akan fokus pada pendidikan untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK), meskipun isu-isu seputar kategori eksklusi lain dibahas dalam bagian 3.6.

## 3. HASIL

### 3.1 Inovasi pendidikan dan praktik menjanjikan di Jawa Timur

Dalam tahap pertama studi inventarisasi, INOVASI mengidentifikasi 27 inovasi atau praktik baik yang dapat diuraikan dan disebarluaskan (INOVASI 2018), dan di tahap kedua, kami memilih delapan lagi yang layak disebarluaskan lebih lanjut dan dipromosikan dalam kegiatan kami, dan di tempat lain apabila perlu. (Ini dijelaskan lebih rinci di Lampiran A dan D). Seluruh 35 inovasi atau praktik tersebut diikuti dengan analisis yang dikategorikan lebih lanjut menurut tema atau konten.

#### **Praktik baik berbasis ruang kelas atau berbasis guru**

Kategori ini mencakup 13 praktik, delapan diantaranya fokus pada literasi, dan lima fokus pada numerasi. Hanya satu praktik (SDIT Al Faizin) berkaitan langsung dengan mengajarkan literasi kelas awal, sementara sisanya secara umum lebih fokus pada penggalakan kebiasaan membaca, contohnya dengan meningkatkan penggunaan perpustakaan dan wawancara jurnalistik serta penulisan laporan. Hampir seluruh praktik numerasi ditujukan untuk menggunakan media atau materi untuk mengajarkan prinsip matematika lanjutan daripada dasar numerasi kelas awal.

Contoh-contoh praktik literasi meliputi: SDN Pabian yang menekankan pemanfaatan perpustakaan dan monitoring ketat terhadap buku yang dibaca dan dilaporkan; SDN Pangarangan 2 yang menyelenggarakan

---

<sup>10</sup> Data yang sama dari tahun 2010 mengindikasikan hanya 0,3 persen orang berusia 15-29 tahun di Indonesia menyandang disabilitas – angka terendah dari 36 negara yang dikaji, dibandingkan dengan 0,6 persen di Kamboja dan 1,5 persen di Vietnam – sehingga angka perkiraan ini kemungkinan terlalu rendah. Namun demikian, patut dicatat bahwa melakukan perbandingan antar negara dalam hal ini cukup sulit, karena adanya berbagai definisi 'disabilitas' yang digunakan berbagai pemerintah yang berbeda.

sejumlah kegiatan yang mendukung literasi – membaca 30 menit sebelum sekolah mulai, kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan jurnalisme dan puisi (SDN Karangun 1 juga mempromosikan sesi membaca sebelum sekolah) dan pusat bacaan di kelas; SDN Mojorejo 2 yang mendorong pemanfaatan dongeng untuk mengembangkan kemampuan membaca; SDI Al Abror yang menggunakan sembilan strategi berbeda untuk mempromosikan gerakan gemar baca, dengan salah satunya fokus pada gerakan membaca kelas awal; dan SDN Ploso 1 yang fokus pada penulisan komik untuk mendorong pemahaman teks dan kemampuan menulis yang lebih baik. Sekolah lain menggunakan berbagai permainan untuk mendukung pembentukan kalimat.

Contoh-contoh praktik numerasi meliputi: SD Alam Mutiara Umat yang menggunakan kegiatan matematika 'Hari Pasar' atau 'Market Day' dan SD Pembangunan Jaya 2, SDN Pare 1 dan SDN Sepuh Gembol 1 yang menggunakan sejumlah materi lokal, permainan, dan media lain yang berkaitan dengan matematika. Sekolah-sekolah juga menggunakan berbagai permainan untuk membantu siswa menghafal tabel perkalian.



Gambar 2: *Market Day* di SD Alam Mutiara Umat. Bertemakan "Indonesia", para siswa di *Market Day* mengatur kios-kios yang mewakili berbagai provinsi di Indonesia.



Gambar 3: SD Alam Mutiara Umat Dinding Ketenaran atau *Hall of Fame*, berisi ide dan inovasi para siswa.

Secara keseluruhan, dalam hal praktik baik yang menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik, kegiatan-kegiatan yang terpilih lebih fokus pada kemampuan lanjutan daripada keterampilan pembelajaran inti di kelas awal.

### Literasi masyarakat

Lima dari praktik literasi fokus untuk mempromosikan literasi di tengah-tengah masyarakat umum (terkadang orang tua), bukan hanya di sekolah, terutama di kelas-kelas awal. Ini mencakup 'Rumah Literasi' dan 'Toremaos' di Sumenep dan 'Sanggar Pena Ananda' di Tulungagung, yang mengadakan kegiatan di dalam dan luar sekolah (pembangunan perpustakaan umum, festival masyarakat, dan program radio); Program 'Ayo membaca' di pusat pembelajaran masyarakat di Malang Raya; dan 'Teras Pintar' di Jember yang fokus pada sosialisasi di kalangan ibu, dan bukan pada kegiatan sekolah.

### Dukungan terhadap guru

Tiga dari praktik tersebut fokus pada pengembangan dan dukungan terhadap para guru. Ini mencakup pembentukan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Bengkel Kerja Guru di SDN 2 Kebondalem, Mengajar Silang di gugus 5 di Kabupaten Tanggulang district, dan Lesson Study (Studi Pelajaran) di SDN Sidomulyo Sidayu. Praktik-praktik ini lebih ditujukan untuk mendorong praktik baik tertentu dalam mengajar. Dukungan terhadap guru yang lebih komprehensif biasanya dilakukan dalam praktik-praktik yang fokus pada reformasi di seluruh sekolah.

### Dukungan terhadap praktik baik dari dinas pendidikan atau pengawas sekolah

Kami menemukan upaya-upaya komprehensif untuk mendukung pengembangan praktik baik yang sistematis di satu dinas kabupaten (Madiun). Dinas Kabupaten Madiun secara umum berkomitmen untuk menjalankan proses inovasi dan mengembangkan dan mendiseminasikan praktik-praktik baik tertentu. Kasus lain yang menawarkan dukungan komprehensif terhadap peningkatan sekolah melalui kegiatan pengawas yang berpengalaman (Probolinggo dan Malang) kebanyakan berkaitan dengan pengembangan media berbasis ruang kelas, bukan kegiatan yang lebih substansial dalam memandu gugus sekolah, mempromosikan peningkatan kualitas sekolah, dan melatih para guru.

Dinas kabupaten dapat memainkan peran penting dalam mendorong praktik baik, dan lebih penting lagi, inovasi yang lebih luas dan komprehensif, baik di dalam masing-masing sekolah (dengan menggerakkan seluruh aktor yang ada untuk berkolaborasi mewujudkan peningkatan kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa) maupun di kabupaten secara keseluruhan (dengan secara tegas mendorong dan menyambut baik pendekatan yang fleksibel menuju perubahan).<sup>11</sup>

### Pendidikan inklusif

Karena besarnya tantangan untuk mengikutsertakan anak-anak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan, tujuh dari 35 praktik yang dianalisis dalam riset ini difokuskan pada pendidikan yang inklusif untuk penyandang disabilitas. Ini mencakup: sekolah pemerintah yang memasukkan anak penyandang disabilitas dan berbagai kebutuhan khusus dalam jumlah yang relatif besar (di SDN Kutorenon 2 dan SDN 3 Karangrejo, sekolah inti dari satu gugus sekolah inklusif); sekolah yang secara resmi menyebut diri sekolah inklusif yang menerima sumber dana tambahan (guru dan pendanaan) dari pemerintah daerah; sekolah swasta (MI Amanah, SD Al Azhaar, SD Ar Rahman, SD KITA) yang dapat menjadi lebih fleksibel diluar hambatan birokratik dari dinas kabupaten (dan juga terkadang tanpa pendanaan mereka); dan pengembangan materi yang lebih fokus pada kelas untuk mendukung anak-anak disleksia dan mereka yang 'lambat belajar' (SDN Sawocangkring).

#### Inovatif dan inklusif

*SD Ar Rahman adalah sekolah swasta kecil dengan 73 siswa, dengan 14 siswa menyandang disabilitas – delapan diantaranya autis. Sekolah ini sudah menerima siswa berkebutuhan khusus sejak 2005. Semua siswa baru diuji untuk mendapatkan diagnosis terkait kebutuhan mereka. Sekolah ini memiliki profil rinci setiap anak penyandang disabilitas, yang kemudian dihubungkan dengan matriks perencanaan untuk sekolah mereka, lalu untuk program pembelajaran yang disesuaikan dengan setiap siswa. Arsitektur sekolah cukup inovatif (dengan lubang besar di dinding kelas untuk mengakomodir siswa yang mengalami kegelisahan saat berada di tempat tertutup) dan para gurunya adalah campuran dari mereka yang direkrut sekolah dan yang dibayar oleh orang tua, dan relawan dari asrama setempat.*

### Reformasi dan manajemen seluruh sekolah

Isu ini berkaitan dengan kesimpulan yang diambil dari kajian literatur, bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong reformasi di seluruh sekolah. Tiga kasus yang ada – SDN Sumber Gondo 2, SDN Punten 1 dan SDN Pamolokan 3 – pada intinya menunjukkan bagaimana kepala sekolah yang inovatif dan berkomitmen kuat mereformasi sekolah yang tidak bagus melalui berbagai kegiatan. Ini mencakup: renovasi sekolah; pemberlakuan disiplin yang lebih tegas; pengembangan profesional dan pemberdayaan guru; dan membangun ikatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kasus lain (SDN Patihan) fokus pada pembentukan kelompok kerja guru-siswa untuk mengelola dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan sekolah.

<sup>11</sup> Uraian kegiatan dinas kabupaten di Probolinggo dan Malang yang lebih rinci dapat dilihat di Lampiran E.

### 3.2 Pelaksanaan inovasi pendidikan dan praktik menjanjikan yang teridentifikasi di Jawa Timur: proses dan struktur utama yang membuatnya berhasil<sup>12</sup>

Responden mengidentifikasi sejumlah proses dan struktur yang membantu – atau malah penting- untuk membuat inovasi dan praktik baik berhasil di Jawa Timur. Hal ini termasuk: inspirasi dan desain awal; pelaksanaan; monitoring dan evaluasi; replikasi atau diseminasi; dan keberlanjutan.

#### Inspirasi dan desain

Inovasi dan praktik baik harus memiliki katalis, dan berdasarkan diskusi baik di dinas kabupaten maupun sekolah, ada setidaknya tiga proses yang telah membantu menghasilkan inovasi dan praktik baik di Jawa Timur:

- **Kepemimpinan yang karismatik dan inovatif** yang seringkali berada di luar arus utama birokrasi pemerintah, dan oleh karena itu seringkali ditemukan di sekolah swasta, misalnya seorang arsitek di Jombang (SD Ar Rahman), para pensiunan pegawai negeri sipil yang berpikiran sama di Kabupaten Malang (Sekolah Garasi), atau pimpinan Islam ternama di Tulungagung (SD Al Azhaar). Para pimpinan tersebut seringkali memiliki visi tentang sekolah yang berbeda dari biasanya, dengan waktu yang fleksibel dan peraturan yang lebih sedikit (tanpa seragam standar, tanpa pekerjaan rumah), desain sekolah yang inovatif, kelulusan berdasarkan prestasi daripada harus menyelesaikan kelas enam, dan seterusnya.<sup>13</sup> Kategori ini juga mencakup contoh-contoh reformasi seluruh sekolah yang disebutkan sebelumnya, yang pada intinya dimulai dengan ide dan sasaran dari kepala sekolah dengan komitmen tinggi, yang mampu berkolaborasi dan memberdayakan guru di sekolahnya untuk meningkatkan kualitas. Kolaborasi seperti ini kemungkinan besar akan menghasilkan inovasi yang komprehensif, bukan hanya praktik baik dengan fokus yang sempit.
- **Melalui pemecahan masalah yang pragmatis** oleh seorang individu atau sekelompok orang secara bersama (di kalangan kepala sekolah dan/atau guru) yang mengidentifikasi suatu masalah (dalam beberapa kasus, secara sistematis melalui latihan SWOT yang terperinci), lalu menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya, di SDIT Al Faizin di Sampang di Pulau Madura, masalahnya adalah adanya sejumlah siswa yang lambat membaca di kelas satu, dan solusinya adalah memberikan mereka buku bacaan tingkat taman kanak-kanak, dan menyediakan bimbingan ekstra setelah jam sekolah sampai mereka mencapai kemampuan membaca yang setingkat dengan teman-teman mereka. Di SD Karanganyar di Ponorogo, seorang guru berlatar belakang jurnalistik menyadari bahwa meskipun sebagian besar siswanya dapat membaca, mereka kesulitan untuk menulis dan memaparkan. Ia kemudian mendesain proses dimana siswa harus menyusun kuesioner, melakukan wawancara, menulis hasilnya dalam laporan resmi, dan memaparkan temuannya di depan kelas. Ini adalah contoh sesuatu yang lebih bisa dianggap sebagai 'praktik baik' daripada inovasi yang komprehensif.
- **Berasal dari tingkatan sistem yang lebih tinggi**, apakah dari lembaga eksternal atau di lingkungan birokrasi pendidikan. Praktik terbaik dalam beberapa kasus diambil dari proyek-proyek yang didanai donor selama satu dekade terakhir – sebagian sudah diadaptasi dan diperbarui, sebagian masih bertahan meski kekurangan dukungan lokal, dan lainnya berkembang karena adanya dukungan tersebut. Ini seringkali diambil dari kegiatan sejumlah proyek sebelumnya: Proyek *Prioritising Reform, Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators and Students* (PRIORITAS); proyek *Decentralised Basic Education* (DBE); proyek *Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading* (BERMUTU); dan proyek *Creating*

<sup>12</sup> Satu komentar menarik dari Sampang adalah praktik-praktik tersebut mungkin tidak akan disebut sebagai 'baik' atau 'inovatif' oleh guru, sekolah, pengawas, atau bahkan dinas kabupaten, kecuali pihak luar (seperti tim INOVASI) melakukan asesmen. Ini artinya apabila tidak secara khusus mencari inovasi, anda tidak akan mengenali praktik tersebut. Para pendidik lokal perlu secara aktif menemukan praktik baik dan inovasi sehingga mereka dapat terus mengembangkan dan menumbuhkannya.

<sup>13</sup> Mungkin bukan kebetulan bahwa seluruh staf senior di salah satu dinas kabupaten yang paling inovatif yang kami kunjungi memiliki latar belakang di bidang selain pendidikan, dan karenanya dapat menerapkan sudut pandang berbeda terhadap tantangan yang mereka hadapi.

*Learning Communities for Children (CLCC)*, seluruhnya didanai oleh berbagai donor, seperti Bank Dunia, UNICEF, USAID dan DFAT.

Dalam kasus lain, inspirasinya datang dari birokrasi lokal. Dinas kabupaten di Madiun dan Probolinggo secara sistematis mendorong pengembangan praktik baik, sementara dinas kabupaten di Sampang kabarnya aktif mencari ‘benih-benih inovasi’ dalam kegiatan operasional sehari-hari di sekolah, di bidang-bidang seperti literasi, lingkungan, inklusi, dan kelancaran membaca. Di Malang, staf dinas kabupaten diinstruksikan untuk mencari dan menerapkan praktik baik secara independen, tanpa menunggu perintah dari atasan. Lokakarya tahunan dimana seluruh sekolah melaporkan inovasi mereka (seperti yang terjadi di Madiun), peraturan resmi dari bupati atau surat edaran dari dinas pendidikan kabupaten yang mendorong inovasi, dan rapat bulanan kelompok kerja kepala sekolah yang fokus pada praktik baik. Seluruhnya merupakan inspirasi dari tingkatan sistem pendidikan yang lebih tinggi untuk mendesain cara-cara baru untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan.

Selain itu, kompetisi dan penghargaan (medali, piala dan bahkan poin untuk kenaikan jabatan) seringkali disebutkan sebagai cara-cara untuk mendorong penggunaan cara baru untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan – baik berupa praktik baik di sekolah hijau, sekolah inklusif, maupun secara lebih langsung, berupa penghargaan atas kinerja baik dan inovasi pengawas, kepala sekolah, atau guru. Sebagian besar pemangku kepentingan yang kami temui mempertimbangkan alat-alat bantu yang bermanfaat ini untuk menginspirasi praktik yang lebih baik, meskipun dinas kabupaten Probolinggo merasa kompetisi lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, karena lebih mendorong persaingan, bukan kerja sama, dan menjauhkan waktu dan sumber daya berharga dari kegiatan belajar mengajar.

Dalam situasi terbaik, sebagaimana diuraikan di dalam kajian literatur, sumber-sumber inspirasi untuk inovasi saling terhubung dengan fokus yang sama, yakni pada kolaborasi dan saling mendukung. Dengan demikian, seorang kepala sekolah atau guru memiliki ide yang kemudian disempurnakan, ‘dimiliki’ dan diterapkan oleh guru-guru lain di sekolahnya, kemudian diidentifikasi sebagai inovasi oleh sistem, lalu didukung dan dikembangkan, sehingga pada akhirnya disebarluaskan. Ini adalah prinsip dasar sifat ‘iteratif’ dari pendekatan PDIA. Sebagaimana diungkap dalam kajian literatur, rasa ‘kepemilikan’ terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, yang perkembangannya didapatkan melalui kerja sama yang kuat di antara para guru dan kepala sekolah, dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu inovasi, dan membantu menjamin keberlanjutannya.

### *Tantangan*

Namun, ada beberapa disinsentif untuk mencoba hal-hal baru. Budaya di Indonesia, sama seperti di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, cenderung mencurigai siapapun yang mencoba tampil menonjol, sehingga hal ini kurang mendukung cara-cara yang terlalu kelihatan untuk menjadi berbeda. Dinas kabupaten dan pengawas sekolah terkadang melihat peran mereka adalah untuk mengidentifikasi cara-cara ‘berbeda’ dalam melakukan sesuatu, dan dikarenakan praktik berbeda tersebut tidak sesuai aturan, bukannya menginspirasi dan mengembangkannya, mereka justru tidak mendukungnya. Salah satu responden juga menyebutkan bahwa beberapa kepala sekolah takut untuk mencari dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan praktik-praktik yang baru dan lebih baik. Karena kurang jelasnya aturan mengenai bagaimana mencari dana secara sah dari orang tua dan masyarakat, dan untuk tujuan apa, beberapa kepala sekolah memilih untuk tidak jatuh ke dalam perangkap, yaitu dituduh melakukan pemungutan liar:

‘... sekolah memilih untuk diam dan tidak terlalu banyak berinovasi. Rutinitas akhirnya menjadi budaya dalam proses mencerdaskan anak bangsa sejak dini’ (wawancara dengan staf dinas kabupaten).

### **Implementasi**

Implementasi yang sebenarnya dari praktik baru, seberapa pun bagusnya, tidaklah selalu dilakukan secara lempang. Teorinya, para inovator, biasanya guru – mendesain dan menerangkan lebih lanjut tentang ide baru mereka, dengan dukungan dan kerja sama dari para kolega, dan yang terpenting, dari kepala sekolah (yang

bisa juga merupakan pencetus awal ide tersebut). Kepala sekolah dapat membantu memastikan dukungan dari komite sekolah dan masyarakat luas. Gugus sekolah dan dinas kabupaten lalu menyambut baik ide baru tersebut, dan bila perlu, mengadopsi atau mengadaptasinya. Pengawas sekolah berperan penting sebagai mediator atau penghubung praktik dari sekolah ke atas dan ke luar, atau dari dinas kabupaten ke bawah. Dengan dukungan ini, praktik baik tersebut dapat diterapkan, mungkin awalnya di kelas, kemudian di seluruh sekolah, dan akhirnya (harapannya) setidaknya dalam gugus sekolah, lebih baik lagi apabila juga diterapkan di luar dari itu.

Faktor kunci di banyak praktik baik yang diuraikan dalam studi ini adalah semangat berkolaborasi di antara para guru dan juga komitmen mereka. Semangat ini seringkali terinspirasi oleh kepribadian dan keterbukaan kepala sekolah, dan berkaitan erat dengan masalah 'kepemilikan' yang telah dibahas sebelumnya. Pengamatan ini mendukung pandangan Hargreaves dan Fullan yang dikutip dalam kajian literatur. Contoh-contoh baik dari semangat bekerja sama ini adalah: Kelompok Kerja Guru dan lokakarya guru di SDN 2 Kebondalem; peraturan yang fleksibel dan pengajaran yang disesuaikan secara individual di SD Amanah dan SD Ar Rahman; keinginan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas di SD Al Azhaar; dan kegiatan *market day* di SD Alam Mutiara Umat.

Namun demikian, pada akhirnya faktor-faktor yang dibutuhkan untuk berhasil melaksanakan dan mempertahankan inovasi berasal dari dukungan seluruh aktor lokal yang terkait. Dalam diskusi dengan dinas kabupaten, terutama di Gresik dan Malang, berikut ini uraian aktor-aktor beserta peran mereka terkait inovasi:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) – untuk mempertahankan dan meningkatkan pendanaan di bidang pendidikan, terutama untuk kegiatan yang tidak (belum memadai) didanai oleh kementerian;
- Bupati/Wali Kota – untuk mendorong lingkungan yang inovatif di tingkat kabupaten dan memotivasi pengembangan praktik baik tertentu di seluruh sektor (contohnya melalui lomba antar sekolah atau gugus sekolah);
- Dinas Pendidikan dan Dinas Agama – untuk mencari, menggalakan, dan membantu melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi praktik baik serta membantu memperluas penerapan praktik baik yang dianggap berhasil;
- Lembaga Pembangunan – untuk memperkenalkan pendekatan baru dan memberikan dukungan pendanaan dan keahlian yang relevan;
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan – (LPMP) – untuk memberikan arah, dukungan, dan sosialisasi terkait peningkatan kualitas pendidikan (contohnya, melalui program sekolah percontohan);
- Gugus sekolah serta Kelompok Kerja Guru dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah – untuk membantu menyempurnakan, mengadaptasikan, dan menyebarkan praktik baik di tingkat lokal;
- Pengawas sekolah – untuk memetakan kualitas sekolah, mencari, mendorong, dan menyebarkan praktik baik, dan memberikan pengawasan berkala terhadap kepala sekolah, guru, dan gugus sekolah secara keseluruhan, terutama difokuskan pada mereka yang paling membutuhkan pendampingan;
- Kantor desa/kelurahan – untuk merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan baru, bila perlu, dan memberikan dukungan, jika dimungkinkan (contohnya, melalui dana desa untuk program-program yang menghasilkan akses lebih luas dan kualitas lebih baik);
- Komite sekolah – untuk mendukung dan membantu lembaga yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- Organisasi non-pemerintah (seperti Lembaga Ma'arif dan Nahdlatul Ulama), yayasan lokal, dan organisasi profesional (seperti Persatuan Guru Republik Indonesia) – untuk memberikan masukan dan bimbingan agar praktik baik didorong, dirancang, disempurnakan, dan dilaksanakan.

### *Tantangan*

Secara historis dan global, sebagian tantangan untuk melaksanakan praktik-praktik yang baru dan lebih baik muncul karena karakteristik sebagian besar program pendidikan pra-jabatan guru yang konvensional dan seringkali statis. Program tersebut seringkali tertutup terhadap ide-ide baru, diisi oleh dosen-dosen yang hanya memiliki sedikit pengalaman di tingkat pendidikan guru yang sedang mereka persiapkan, dan

karenanya tidak memahami atau menyadari kondisi nyata yang akan dihadapi para siswa mereka di kelas. Salah satu solusinya adalah mengadakan semacam pelatihan untuk pelatih, dengan satu guru di satu sekolah atau gugus (seringkali guru yang terbaik dan paling cerdas, atau guru yang paling disukai kepala sekolah atau dinas kabupaten) dikirimkan untuk mengikuti pelatihan, dengan harapan mereka akan menyebarkan apa yang telah mereka pelajari seluruhnya kepada guru-guru lain di sekolah. Namun, ini kerap kali tidak terjadi, dan situasinya bertambah pelik karena kurangnya pelatihan dalam saat bersamaan mengenai pendekatan baru tersebut bagi kepala sekolah dan pengawas yang bersangkutan.

Pelatihan dalam jabatan di Indonesia telah berevolusi ke arah penggunaan pendekatan perubahan sekolah secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam kajian literatur, di mana aktor-aktor penting (kepala sekolah, guru, pengawas, dan komite sekolah) didorong untuk memiliki pemahaman bersama mengenai apa yang harus dilaksanakan, dan oleh karena itu memiliki motivasi dan komitmen yang lebih tinggi untuk memastikan hal tersebut terjadi. Tantangan terhadap implementasi dapat semakin meningkat apabila DPRD dan Bupati memiliki kepentingan lain (contohnya dalam pembangunan infrastruktur), dimana dinas kabupaten menggunakan pemikiran konvensional secara tidak fleksibel, dimana dukungan keuangan dari pihak luar telah mengering, dimana gugus sekolah dikoordinasikan oleh pengawas yang tidak inspiratif, dan dimana komite sekolah tidak aktif, atau malah tidak ada.

### **Monitoring dan evaluasi**

Bagian penting dari keberhasilan proses inovasi dan reformasi adalah evaluasi – bukan hanya dengan memonitor kondisi dan kualitas proses implementasi, tapi juga mengevaluasi pencapaian terkait tujuan dan sasaran awal. Semua sekolah yang kami kunjungi tampaknya tidak memiliki target khusus terkait peningkatan sekolah atau hasil pembelajaran. Seluruh praktik baik berbasis sekolah yang dikaji dalam studi ini hanya memiliki tujuan umum (siswa dapat membaca lebih baik, lebih banyak anak penyandang disabilitas yang bersekolah, pemahaman lebih baik mengenai prinsip-prinsip matematika tertentu). Hanya ada sedikit referensi terkait apakah atau bagaimana praktik baik dapat dicantumkan ke dalam asesmen sekolah dan rencana peningkatan (serta anggaran mereka) atau ke dalam kuesioner kualitas sekolah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan dikaitkan dengan kemajuan sekolah berkenaan dengan delapan standar nasional. Dengan kata lain, sepertinya hanya ada sedikit ketertarikan untuk menilai secara umum bagaimana rencana peningkatan sekolah yang ada dapat mendukung penyusunan rencana berikutnya, dan apakah praktik-praktik belajar mengajar tertentu berdampak pada kualitas sekolah atau prestasi siswa.

Akibatnya, tidak ada bukti kuantitatif yang substansial terkait keberhasilan atau kegagalan praktik-praktik tersebut. Sebagian besar responden tampak tidak tertarik atau bingung dengan pertanyaan tentang ketersediaan bukti terkait dampaknya secara konkret (atau bahkan penggunaan beberapa data awal yang dapat membantu membuktikan terjadinya dampak tersebut), dan kebanyakan memakai yang sudah tersedia – informasi kualitatif yang sebagian besar bersifat anekdot. Dari pengamatan ini, dikatakan bahwa siswa bisa membaca dengan lebih baik dan lebih percaya diri, mereka lebih aktif belajar dan dapat berkomunikasi lebih baik dengan guru, sementara anak berkebutuhan khusus lebih 'diikutsertakan' dalam pembelajaran. Para guru berkolaborasi lebih erat dan lebih aktif dalam melakukan pekerjaan mereka. Orang tua dan masyarakat luas lebih suportif terhadap sekolah, dan reputasi akademis sekolah meningkat.

Bukti kuantitatif sulit diperoleh, bahkan dengan menggunakan indikator yang relatif mudah, seperti: pendaftaran; partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler; dukungan masyarakat; dan kenaikan ke tingkat yang lebih tinggi (terutama ke 'sekolah favorit'). Walaupun hal-hal ini kemungkinan bisa diukur, pada umumnya datanya tidak tersedia. Ujian sekolah sepertinya tidak digunakan untuk menelusuri perubahan seiring waktu yang dapat dihubungkan dengan praktik baik. Ujian nasional di kelas enam telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perbandingan sebelum dan sesudah inovasi diperkenalkan dalam sekolah yang sama tidak dapat dilakukan dengan mudah. Lebih jauh lagi, alat penilaian untuk kelas empat berdasarkan pada sampel representatif. Karena itu, tidak ada ketertarikan dalam mengumpulkan, menganalisis, berbagi, dan menggunakan data – dan sedikit sekali yang melakukannya (ini tidak mengejutkan, karena staf di semua

tingkatan – termasuk tingkat kementerian – tidak dilatih untuk menggunakan data untuk menyusun rencana dan mengambil keputusan).

Ada satu pengecualian dalam aturan ini. Ini terjadi di Probolinggo, dimana, misalnya, kepala sekolah menandatangani kontrak dengan dinas kabupaten untuk mencakup target seperti peningkatan hasil ujian kelas enam dan kepuasan masyarakat yang lebih besar terhadap sekolah (menggunakan kuesioner yang dirancang untuk menilai kepuasan tersebut). Meskipun kesepakatan kinerja semacam ini merupakan kebijakan nasional terkait dengan akuntabilitas, dan seluruh unit dan staf sudah menandatangani kesepakatan yang dimaksudkan untuk mengukur pencapaian mereka, kasus Probolinggo adalah satu-satunya contoh kasus yang mencakup kriteria terkait hasil sekolah secara eksplisit.

### Tantangan

Tantangan utama dan kemungkinan yang paling sulit sebenarnya hanyalah membuat aktor terkait menganggap penting monitoring dan evaluasi, baik memonitor kemajuan implementasi praktik baru tersebut, maupun mengevaluasi dampaknya di akhir. Jika semua aktor sudah menyadari permasalahan ini, kurangnya alat untuk melaksanakan proses tersebut – baik secara kualitatif maupun kuantitatif – menjadi tantangan lain, di dalam dan antar sekolah. Meski alat yang tepat sudah tersedia, sulit untuk menilai dampak dari praktik baik tertentu secara terpisah dari aspek lain di lingkungan sekolah. Peran LPMP dalam menilai kemajuan sekolah menuju standar pendidikan nasional – dan bagaimana prosesnya berkaitan dengan penilaian sekolah dan rencana peningkatan sebelumnya – sangat penting untuk membantu memastikan bahwa sebagian informasi sistematis dan komparatif tentang apa yang terjadi dan seberapa jauh dampaknya, yang berguna di tingkat sekolah ke atas, telah dikumpulkan.

### Replikasi

Dengan asumsi bahwa suatu inovasi atau praktik terlihat bermanfaat, berdasarkan bukti yang ada, hal tersebut sebaiknya diadopsi, diadaptasi, disebarluaskan, dan direplikasi. Pengalaman terkait hal ini di sekolah-sekolah yang kami kunjungi sangat bervariasi. Contohnya, satu sekolah merasa tidak dapat membahas praktik baiknya secara luas (melalui gugus) karena belum secara resmi disetujui oleh pengawas dan dinas kabupaten. Namun, di seluruh sekolah yang kami kunjungi, praktik ini telah diadopsi, jika relevan, di semua kelas di sekolah tersebut. Semua kelas misalnya ambil bagian dalam kegiatan *market day* (siswa di kelas yang lebih rendah berlaku sebagai pembeli dan siswa di kelas yang lebih tinggi sebagai produsen dan penjual) di SD Alam Mutiara Umat. Baik pembelajaran lewat kegiatan membuat komik di SDN Ploso di Pacitan maupun fokus terhadap membaca, menulis, dan melakukan wawancara di SDN Karanganyar 1 sudah menyebar dari kelas (dan guru) yang menggagasnya ke kelas-kelas yang lebih rendah (dan guru-gurunya), dengan hasil yang diharapkan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Apabila inovasi difokuskan untuk mereformasi seluruh sekolah, penyebaran semangat dan praktik inovasi dalam lingkungan sekolah menjadi sangat penting. Contohnya, budaya inklusi secara umum sudah bergema di seluruh sekolah inklusif yang kami kunjungi – sampai ke guru dan siswa ‘normal’ dan orang tua mereka (di salah satu sekolah besar, guru baru yang tidak mampu menangani anak berkebutuhan khusus di kelasnya kemungkinan dianjurkan untuk keluar dari sekolah).



Gambar 4: Contoh komik siswa yang digunakan di SDN Ploso.



Gambar 5: SDN Ploso memakai buku komik sebagai bagian pembelajaran. Disini, anak-anak bekerja sama menggambar dan mencantumkan teks di komik yang berkaitan dengan pelajaran hari itu.

Replikasi di luar sekolah menjadi lebih problematis – bukan hanya di luar gugus sekolah tapi bahkan di dalam gugus, dimana para guru seringkali hanya bertemu selama dua jam per bulan. Hanya dua sekolah melaporkan telah aktif menyebarkan suatu praktik melalui gugus mereka: SDIT Al Faizin di Sampang terkait menggunakan buku taman kanak-kanak untuk mengajarkan membaca, dan SDN Patihan terkait kelompok kerja yang dipimpin siswa. Sisanya, meskipun praktik baru mungkin telah dibahas dalam rapat gugus, tidak ada mekanisme (seperti guru atau fasilitator khusus) di luar pengawas yang acapkali kelebihan beban kerja, untuk mendorong serta membantu sekolah lain mengadopsi atau mengadaptasinya. Kepala sekolah dan guru biasanya tidak tahu apakah praktik baik sudah diadopsi sekolah lain, dan tidak menganggap ini penting (sama seperti monitoring dan evaluasi yang sebelumnya

dibahas). Apabila pengawas tidak ditugaskan ke gugus tertentu, melainkan dirotasi, kemungkinan untuk replikasi berbasis gugus semakin kecil. Sama halnya apabila praktik baik tersebut dikembangkan di ‘sekolah percontohan’ yang memiliki sekolah imbas yang bukan merupakan sekolah inti di gugus kabupaten (sebagaimana terjadi dalam satu kasus), kemungkinan akan replikasi berskala luas sangat kecil terjadi.

Beberapa cara telah dilakukan untuk memperluas replikasi – misalnya, melakukan kunjungan studi banding di kabupaten lain, pemagangan di sekolah inovatif, dan penempatan sementara kepala sekolah dan guru yang inovatif di sekolah yang kurang inovatif - tapi secara sistematis belum cukup untuk dinilai keberhasilannya. Rapat bulanan yang digelar baru-baru ini, yang menghadirkan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten di Jawa Timur, juga menjadi cara yang berguna untuk mereplikasi praktik baik, apabila hal ini menjadi bagian dari agenda setiap rapat.

### Tantangan

Sejumlah tantangan terkait penambahan dan perluasan replikasi mencakup: kualitas yang bervariasi, waktu yang terbatas dan kurangnya tindak lanjut dari rapat gugus; dukungan yang tidak konsisten atau sistematis dari pengawas; kurangnya unit di dinas kabupaten yang khusus menemukan, menggalakan, dan menyebarkan praktik baik; dan kurangnya sumber daya finansial untuk memfasilitasi diseminasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, satu sekolah merasa tidak dapat membagikan praktik baiknya di gugus sampai praktik tersebut ‘disetujui’ oleh dinas kabupaten. Tapi tidak jelas apakah hal ini membutuhkan persetujuan resmi atau cukup dengan deklarasi dukungan dari pengawas. Dalam kasus lain, inovasi (kegiatan *market day* di SD Alam Mutiara Umat di Tulungagung) dianggap bagian dari “trademark’ sekolah (kata yang sering kami dengar selama kunjungan) dan menjadi faktor penting dalam persaingan dengan sekolah-sekolah terdekat untuk menarik calon siswa baru. Karena itu, sekolah ragu untuk mendorong replikasinya, karena hal itu menjadi cara untuk menarik pendaftar baru .

### Keberlanjutan

Tahap terakhir dari keberhasilan proses inovasi adalah keberlanjutan – praktik baik dan inovasi harus bisa bertahan meskipun terjadi perubahan pada kondisi pendukungnya: seperti penggagas awal, kolega yang mendukung, birokrasi yang simpatik, atau pendanaan yang memadai. Perubahan dapat terjadi ketika orang yang paling peduli dengan inovasi mengundurkan diri, pensiun, atau dimutasi dan digantikan oleh orang lain yang kurang menyadari atau berkomitmen terhadap inovasi, dan juga ketika dukungan donor eksternal berakhir– entah dalam bentuk fasilitas, dana, keahlian eksternal, atau model yang baik. Banyak responden di sekolah dan dinas yang kami kunjungi selama studi menyebutkan contohnya, seperti di Mojokerto, semua

program PRIORITAS (manajemen berbasis sekolah, kelompok kerja guru, literasi, pendidikan inklusif) yang berakhir di 2016 tidak ada yang disebarluaskan lebih lanjut, meskipun dinas kabupaten telah meminta pendanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebaliknya, Madiun telah melanjutkan praktik baik yang dimulai dengan proyek USAID Managing Basic Education (MBE) yang berlangsung dari 2007 hingga 2011 – seperti mengadakan lokakarya dan mempekerjakan narasumber – melalui pendanaan yang cukup besar dari pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saat kami bertanya kepada responden bagaimana cara mendorong (bahkan menjamin) keberlanjutan, mereka memberikan berbagai jawaban, kebanyakan membayangkan adanya sistem dalam sekolah atau kabupaten yang dapat menyatukan seluruh komponen yang dibutuhkan untuk keberlanjutan. Ini mencakup:

#### Desain besar

*Dinas Pendidikan Kabupaten di Kota Madiun, didukung oleh Bappeda, mengembangkan 'desain besar' untuk pendidikan hingga 2025. Tujuan dokumen strategi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten, dan difokuskan pada: manajemen sekolah; kualitas belajar-mengajar; kesehatan sekolah; dan literasi masyarakat. Dokumen ini akan memandu pengembangan kegiatan tahunan yang akan didanai dari anggaran pemerintah daerah. Untuk melaporkan inovasi dan praktik baik di sekolah-sekolah, dinas kabupaten menyelenggarakan lokakarya tahunan selama tiga hari bagi kepala sekolah dari 72 sekolah dasar di kabupaten. Lokakarya ini memacu sekolah untuk mengembangkan inovasi dan praktik baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan persaingan positif antar sekolah. Pengawas sekolah memiliki rencana kunjungan sekolah yang terorganisir setiap minggunya, dengan secara khusus memperhatikan sekolah dengan prestasi rendah.*

**Sesuai dalam konteks yang lebih luas:** Praktik baik atau inovasi harus dianggap sesuai dengan kebijakan yang lebih luas, visi dan misi kabupaten, serta kementerian secara keseluruhan, dan juga harus konsisten dengan penilaian mandiri sekolah dan prioritas perencanaan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Praktik baik yang dianggap berasal dari penilaian sekolah yang transparan dan adil, kemudian dicantumkan dalam rencana perbaikan jangka panjang, memiliki kemungkinan berkelanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan praktik baik yang dimasukkan dari luar, tanpa memperhatikan konteks. Meskipun komponen ini terdengar wajar, kami hanya menemukan sedikit bukti dalam studi kami terkait praktik baik yang dihubungkan dengan penilaian mandiri dan rencana perbaikan, dan hal ini pun jarang disebutkan. 'Desain besar' dari Dinas Kabupaten Madiun merupakan pengecualian, dalam hal konteks inovatif yang lebih besar dapat mempengaruhi praktik-praktik baru (lihat boks). Desain ini – strategi selama sepuluh tahun yang dikembangkan dinas kabupaten, Bappeda, dan perusahaan konsultasi eksternal – ditujukan untuk memandu perkembangan pendidikan jangka panjang di Madiun dan juga mengembangkan, mendukung dan mempertahankan praktik-praktik yang lebih baik.

**Struktur dan lingkungan yang mendukung:** Meskipun staf dinas kabupaten dan pengawas berubah seiring waktu, entah karena alasan politik atau pribadi, mereka kerap kali memiliki masa jabatan yang lebih lama dibandingkan rata-rata jabatan kepala sekolah. Karena itu, aktor-aktor tersebut perlu dipastikan untuk memahami pentingnya untuk mempromosikan lingkungan yang inovatif dengan membuat inovasi tumbuh subur, bukan menghambatnya. Mereka perlu diberikan sosialisasi menyeluruh tentang perlunya mendukung dan melanjutkan praktik-praktik baik tertentu. Dukungan yang diberikan dinas kabupaten di Probolinggo dan Madiun, dijelaskan dalam bagian 3.2, menunjukkan pentingnya komponen ini.

**Mekanisme akuntabilitas:** Jika ada mekanisme yang membuat orang bertanggung jawab untuk melaksanakan inovasi, maka inovasi tersebut akan lebih mudah dilanjutkan. Sebagaimana disebutkan, di Probolinggo misalnya, kepala sekolah menandatangani kontrak tahunan dengan dinas kabupaten, yang menyatakan dengan jelas peningkatan yang diharapkan menyangkut kualitas sekolah selama satu tahun – ini seringkali membuat mereka harus melanjutkan, bahkan memperkuat inovasi yang sedang berjalan. Masa jabatan mereka sebagai kepala sekolah atau kenaikan jabatan mereka dapat bergantung pada pemenuhan kontrak tersebut.

**Proses inovasi yang kolaboratif dan kontinyu:** Mekanisme yang berguna untuk mendorong keberlanjutan adalah membangun kontinuitas di dalam proses penerapan inovasi – dari tahap perencanaan sampai evaluasi final kegiatan. Melekatkan inovasi di dalam rencana jangka panjang, seperti rencana peningkatan masing-masing sekolah (setelah penilaian sekolah) atau sebagai bagian dari ‘desain besar’ untuk pendidikan, seperti di Madiun, juga dianggap efektif untuk mencapai keberlanjutan. Selain itu, kita juga harus memastikan semua guru dan staf di sekolah terlibat dan berkolaborasi dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi. Semua orang harus memiliki peran khusus dalam proses ini. Untuk membantu melakukan tugas dan fungsi mereka, mereka membutuhkan pengembangan profesional berkelanjutan dalam berbagai kompetensi yang dibutuhkan. Contoh yang bagus untuk komponen ini adalah kegiatan rumit yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan *market day* yang diadakan dua kali setahun di Tulungagung. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi yang luas dan pembagian kerja yang jelas. Dengan melekatkan inovasi ke dalam proses jangka panjang dan kolaboratif ini, maka hilangnya actor atau penggagas utama tidak akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan.

Responden menyarankan aspek lain dalam proses mempertahankan praktik baik dan inovasi, termasuk:

- Mengkomunikasikan esensi inovasi atau praktik baik ke seluruh staf sekolah yang baru, dan melakukan sosialisasi tanpa henti. Seperti yang dikatakan salah seorang responden: ‘memahami sebuah konsep perlu waktu, oleh karenanya harus selalu didiskusikan, di ulang-ulang dan disebut-sebut sehingga semakin kenal dengan konsep yang sedang kita jalankan’;
- Mendokumentasikan praktik baik tersebut dalam bahan cetak dan video, serta menyimpan catatan terperinci dari pelaksanaan dan hasil-hasilnya;
- Memperluas pelaksanaannya seluas mungkin, di dalam dan di luar gugus yang terkait, sehingga melekat dalam sistem yang lebih besar;
- Memastikan seluruh kepala sekolah dan guru mengembangkan dan melaksanakan inovasi (atau berusaha mendukung gugus sekolah) untuk mendapatkan poin untuk kenaikan jabatan atau mempertahankan jabatan saat ini.

**Dampak yang terbukti:** Menurut responden studi ini, keberlanjutan lebih mungkin terjadi jika inovasi tersebut dapat menunjukkan dampaknya dan dianggap berguna. Contohnya, inovasi tersebut:

- berkaitan langsung dengan meningkatnya kompetensi terkait profesi dan pedagogi;
- merespon tantangan yang muncul di kalangan masyarakat, dan membantu memecahkan masalah mereka;
- bermanfaat bagi seluruh masyarakat dari segi ekonomi atau non-ekonomi, seperti prestise yang lebih tinggi dan kohesi yang lebih kuat;
- berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peluang kenaikan jabatan bagi mereka;
- menghasilkan bukti kualitatif dan kuantitatif terkait peningkatan sekolah dan hasil pembelajaran siswa;
- memprioritaskan keberhasilan akademis, pelibatan masyarakat, dan lingkungan sekolah (sebagaimana diperlihatkan oleh sekolah adiwiyata atau sekolah ‘hijau’);
- mendorong perkembangan karakter dan perilaku yang baik dari para siswa.

### Market day

*Kegiatan 'market day' dirancang untuk membuat belajar menjadi menyenangkan dan efektif. Beberapa kelompok siswa dari kelas tiga sampai enam merencanakan kegiatan ini, diawasi guru mereka. Mereka memilih tema untuk setiap market day dan memilih makanan dan barang lain yang dijual di pasar tersebut, sesuai tema. Siswa belajar merencanakan kegiatan dan bekerja sama dengan guru dan orang tua, yang membantu mereka mempersiapkan makanan di rumah untuk dijual di pasar. Mereka belajar menghitung biaya bahan makanan dan harga jualnya. Di akhir kegiatan, mereka menghitung apakah untung atau rugi.*

*Siswa kelas satu dan dua menjadi pembeli di pasar. Ini mengajarkan mereka nilai uang. Mereka juga dapat menghitung berapa yang telah digunakan, berapa sisa uangnya, dan berapa kembalian yang mereka harus terima. Anak berkebutuhan khusus juga berperan di market day, dengan tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.*

Seperi telah disampaikan sebelumnya, dampak tersebut biasanya tidak diukur secara kuantitatif, tapi kesan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat luas terkait dampak yang disebutkan diatas seringkali dianggap bukti yang cukup mengenai adanya peningkatan sekolah.

**Dukungan politik:** Keberlanjutan juga dapat didorong melalui dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan administratif (melalui bupati dan kepala desa), dan dukungan legislatif (melalui DPRD dan Komisi 1 yang mengurus pendidikan). Meskipun aktor-aktor ini dapat berubah seiring waktu, karena ada pemilu setiap lima tahun, mereka dapat mempengaruhi penunjukkan di dinas kabupaten (bupati menunjuk kepala dinas kabupaten, yang dapat membalas jasa para pendukungnya melalui penunjukan sebagai staf dinas dan kepala sekolah) dan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh DPRD dan desa. Contoh yang baik terkait dukungan tersebut datang dari Wali Kota Madiun dan penggunaan dana

pemerintah untuk membayarkan gaji guru honorer.

**Kesesuaian budaya:** Beberapa responden berkomentar tentang pentingnya memastikan supaya inovasi dan praktik baik tidak berbenturan dengan budaya dan adat setempat. Ini terutama berlaku di kabupaten yang lebih religius, dimana beberapa sekolah mengalokasikan waktu untuk kegiatan keagamaan di dalam atau di luar jam sekolah. Ini khususnya terjadi di wilayah seperti Malang, dimana ada penentangan terkait sekolah sehari penuh, karena akan mengambil waktu ibadah. Sekolah lain yang sebelumnya menjadi sekolah 'favorit', tapi kehilangan potensi siswa baru dikarenakan mereka lebih memilih untuk mendaftar ke sekolah agama, memutuskan untuk melaksanakan dan mempromosikan kegiatan keagamaan setelah jam sekolah secara gratis, untuk menarik calon siswa baru.

**Dukungan dari komite sekolah dan masyarakat setempat:** Faktor keberlanjutan yang terakhir adalah dukungan dari komite sekolah dan masyarakat luas dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi praktik baik dan inovasi – terutama inovasi yang lebih komprehensif. Dukungan ini membantu untuk memastikan bahwa pimpinan sekolah yang baru akan melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh pendahulunya. Dalam semua tahapan proses ini, seperti di Probolinggo, responden percaya bahwa untuk menjamin keberlanjutan praktik baik dan inovasi, siswa dan orang tua harus dilibatkan secara intensif, bukan hanya untuk memanfaatkan fasilitas sekolah, tapi juga aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kinerja guru dan kebutuhan siswa.

### Tantangan

Menjaga agar inovasi berkelanjutan merupakan tantangan di seluruh dunia. Contohnya terjadi di negara-negara yang dipenuhi oleh hal-hal yang sebetulnya lebih merugikan daripada menguntungkan: lembaga, fasilitas, dan praktik pendidikan yang tidak pernah 'dimiliki' secara lokal; sekolah dengan perpustakaan, lab komputer, dan pusat sumber daya guru yang tidak digunakan dan dirawat; dan dinding kelas yang menampilkan karya-karya siswa yang tersisa dari lima tahun sebelumnya. Apabila kita mengumpulkan seluruh faktor yang vital bagi keberlanjutan dalam satu sistem yang logis dan koheren, kita punya peluang untuk mempertahankan peningkatan dalam kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa.

Salah seorang staf kabupaten merangkum tentang inovasi mana yang kemungkinan besar dapat dipertahankan: yaitu yang 'mudah dipahami, mudah dibuat, bahannya mudah didapat, biayanya murah, dan bermanfaat'.

### 3.3 Bukti dampak inovasi dan praktik baik terhadap hasil yang diperoleh siswa dan guru

Seperti telah dibahas sebelumnya, hanya ada sedikit bukti tentang dampak inovasi dan praktik baik yang ditinjau dalam studi ini, terutama secara kuantitatif. Staf sekolah dan dinas secara umum tampak kurang tertarik untuk mengumpulkan bukti tersebut, dan kebanyakan bukti yang ada bersifat kualitatif. Dalam hal **hasil pembelajaran siswa**, dimana praktik baik difokuskan pada kelas dan berkaitan dengan literasi atau numerasi, disebutkan bahwa siswa lebih tertarik dan ingin belajar, percaya diri, termotivasi, dan ingin tahu. Mereka memahami pelajaran lebih cepat dan mendalam (terutama saat guru menggunakan media yang berbeda dalam mengajarkan materi). Beberapa praktik baik (*market day*, kelompok kerja yang dipimpin siswa) mendorong kepemimpinan dan kemampuan manajemen, dan praktik yang lain memperkuat kebiasaan membaca siswa. Satu praktik meningkatkan kemampuan bercerita dan yang lain menggunakan puisi dan penugasan jurnalisme. Terkait anak dengan kesulitan belajar, responden melaporkan bahwa: kemampuan anak disleksia untuk membaca meningkat; anak hiperaktif dan autis lebih tenang dan mampu berpartisipasi lebih teratur dan bermanfaat di kelas reguler; dan lebih sedikit kasus anak penyandang disabilitas yang dirundung oleh anak lain. Setidaknya di satu sekolah (SD Al Azhaar) dimana salah satu fokusnya adalah membuat anak penyandang disabilitas mengikuti kurikulum nasional dan mengambil ujian nasional, beberapa siswa telah berhasil mencapai hal ini, bahkan sampai ke pendidikan tinggi.

#### Memenuhi kebutuhan khusus

*SD Islam Al Azhaar menerima siswa autis dan hiperaktif, siswa yang lambat belajar, dan anak-anak yang memiliki Sindrom Down. Dari lebih dari 800 siswa di sekolah dasar tersebut, ada 28 siswa dengan kebutuhan khusus. Setiap kelas yang terdiri dari 25-28 siswa memiliki sekitar tiga anak berkebutuhan khusus dan satu guru pembimbing. Ruang sumber daya di sekolah digunakan untuk pengajaran tambahan dan memberikan lingkungan yang menenangkan bagi anak berkebutuhan khusus. Makanan khusus diberikan saat makan siang untuk meredakan efek autisme dan hiperaktivitas. Sekolah menggunakan kurikulum nasional, tapi hal ini bergantung pula pada kebutuhan khusus anak didiknya. Anak-anak ini dapat mengikuti ujian sekolah untuk memperoleh tanda kelulusan sekolah, atau, jika mengikuti kurikulum nasional, mereka dapat mengikuti ujian nasional dan mendapatkan sertifikasi biasa yang diperlukan untuk naik ke sekolah menengah pertama.*



Gambar 6: Guru memakai ruang sumber daya untuk menenangkan anak penyandang disabilitas.

Namun, hanya ada sedikit bukti konkret untuk membuktikan dampak ini. Jadi, tidak ada keterkaitan langsung dan dapat dibuktikan antara praktik baik dan hasil pembelajaran siswa yang lebih baik, seperti meningkatnya nilai membaca dan matematika. Satu sekolah mencatat peningkatan jumlah buku yang dipinjam dari perpustakaan dari satu semester ke semester berikutnya (tapi tidak melihat hal ini sebagai dampak dari upaya yang telah dilakukan). Sekolah lain mengindikasikan bahwa dikarenakan kegiatan intensif dengan siswa lambat belajar di kelas satu, maka semua siswa (kecuali yang didiagnosis sebagai penyandang disabilitas) berada pada tingkatan yang diharapkan di kelas dua. 'Sekolah favorit' bangga atas angka kenaikan kelas hampir 100 persen ke sekolah menengah pertama, dan hampir setiap sekolah memiliki satu (atau tiga) lemari kaca, yang memamerkan piala dan medalnya, meskipun ini tidak terkait langsung dengan praktik baik tertentu manapun.

Tidak ada dampak yang disebutkan terkait kesejahteraan dan status kesehatan siswa. Peningkatan pendaftaran dan kehadiran di sekolah, di lain pihak, seringkali dihubungkan dengan peningkatan kualitas sekolah secara umum (tapi tidak dihubungkan dengan praktik baik atau inovasi tertentu, kecuali kegiatan *market day*). Dua sekolah dengan cepat kehilangan calon siswa yang lebih memilih untuk mendaftar ke Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini mencerminkan, sebagaimana dikatakan seorang kepala sekolah, 'pola berpikir berbeda daripada dulu'. Seperti akan dibahas lebih lanjut di bawah, anak perempuan secara universal dianggap memiliki prestasi lebih baik dibandingkan anak laki-laki – lebih rajin, tangguh, dan terorganisir – tapi tidak ada bukti atau analisis untuk membuktikan kesimpulan ini, dan tidak ada upaya untuk melakukan apapun untuk meningkatkan prestasi siswa laki-laki.

Bukti seputar **hasil mengajar guru**, meski tidak secara kuantitatif, tampaknya lebih jelas berkaitan dengan praktik baru. Lingkungan yang mendorong inovasi (seperti di Madiun) berarti bahwa guru (atau sekelompok guru berusia muda) tampak lebih bersemangat untuk mencoba metode baru, mengembangkan materi dan media baru, aktif berpartisipasi dalam manajemen sekolah dan rapat gugus, dan berlomba mendapatkan medali dan piala. Ini mencakup praktik 'lesson study' dan 'pengajaran silang'<sup>14</sup> yang terdapat pada tahap pertama studi praktik baik. Selain itu, beberapa proyek yang diamati dalam studi ini secara gamblang mendukung guru melakukan pengembangan profesional seperti ini: lokakarya pelatihan tambahan bagi para guru di Madiun; guru yang dilatih untuk memberikan dukungan pengajaran kepada siswa yang lambat membaca di SDIT Al Faizin; dan guru yang dilatih untuk mendukung anak berkebutuhan khusus di kelas reguler di SDN Al Azhaar dan SD Ar Rahman.

Kami mengamati tidak adanya akibat atau hasil yang tidak disengaja dari praktik baik atau inovasi yang dikaji. Perancang dan pelaksana praktik baik mengidentifikasi hasil yang diharapkan, dan tidak terjadi hasil tambahan yang tidak terduga.

### 3.4 Bukti dampak inovasi dan praktik baik terhadap peningkatan kualitas sekolah dan kabupaten

Sebagaimana tercermin dalam kajian literatur dalam hal **peningkatan sekolah**, ada beberapa bukti (lagi-lagi sebagian besar bersifat anekdotal) terkait peningkatan di sekolah dan dinas kabupaten yang fokus untuk mengubah seluruh institusi. Sejumlah kepala sekolah baru mampu menjadikan sekolah yang mengalami penurunan mutu dan status kembali pulih dan meningkat: menanamkan lebih banyak disiplin di antara siswa dan staf; bekerja lebih erat dengan guru untuk mengidentifikasi masalah; mengakui peran guru dalam membantu memecahkan masalah tersebut; dan membuat guru bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka (dan memberikan penghargaan ketika kualitasnya baik). Dampak ini juga terdapat di sejumlah sekolah inklusif yang telah beralih seiring waktu dari ragu untuk menerima anak penyandang disabilitas menjadi lebih inklusif dalam sukma dan pedagogi, dengan menerima semua siswa dengan beragam disabilitas dan secara tulus membantu mengikutsertakan siswa penyandang disabilitas dalam pelajaran.

Tidak ada terlalu banyak bukti bahwa praktik baik yang telah dianalisis berdampak pada **peningkatan di dinas kabupaten**. Tentunya dukungan kuat terhadap praktik baik di kabupaten seperti Madiun dan Probolinggo seharusnya bersinergi dengan bagaimana kabupaten tersebut melakukan inovasi dalam pekerjaan mereka sendiri. Dengan kata lain, karena kedua kabupaten tersebut mendorong sejumlah inovasi, – berbagai ide dan praktik baru – maka kemungkinan ini akan berujung pada lingkungan kreatif di dalam kabupaten itu sendiri, yang mendorong inovasi lebih jauh dalam kegiatan operasional kabupaten. Memahami dinamika proses ini akan menjadi hal yang bermanfaat dalam mempromosikan inovasi dalam sistem pendidikan.

Yang jelas muncul adalah kabupaten yang kami kunjungi ingin menjadi proaktif dalam meningkatkan mutu sekolah, dan lebih rajin menilai kemajuan mereka. Ini tercermin pada semakin meningkatnya dukungan

---

<sup>14</sup> Lesson Study, pertama kali dikembangkan di Jepang, mengumpulkan sekelompok kecil guru untuk menganalisis masalah pengajaran dan mencoba berbagai solusi. Pengajaran silang mengatur agar guru, didukung oleh pengawas dan rekan sejawat, untuk mengajar di sekolah lain di kabupaten, sehingga dapat berbagi pengalaman dan keahlian di banyak sekolah.

mereka untuk menghasilkan lebih banyak praktik baik, misalnya dengan menyelenggarakan kompetisi dan secara langsung menghubungkan praktik baik dengan kenaikan jabatan. Namun, hanya ada sedikit bukti bahwa proses penilaian mandiri yang dilakukan sekolah membantu hal tersebut, dan rencana peningkatan sekolah jarang disebutkan dalam diskusi bersama dinas kabupaten atau staf sekolah. Terlepas dari hal itu, ada gerakan yang jelas terlihat untuk menilai kualitas sekolah. Ini sebagian besar dilakukan langsung melalui penilaian mandiri internal tahunan yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan LPMP dan berdasarkan pada delapan standar pendidikan nasional.

### 3.5 Isu besar dari studi – apa yang berhasil dan tidak berhasil meningkatkan hasil pembelajaran?

Setelah menganalisis 35 inovasi dan praktik baik yang dipilih untuk studi ini, dan tanggapan dari banyak informan, sejumlah tema besar muncul terkait dengan apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam proses meningkatkan sekolah dan hasil pembelajaran siswa.

#### **Apa yang berhasil meningkatkan hasil?**

**Melekatkan proses inovasi ke dalam rencana kabupaten jangka panjang di bidang pendidikan:** Ini paling tercermin dalam ‘Desain besar di bidang pendidikan’ di Madiun, yang disusun melalui kerja sama dengan dinas kabupaten dan Bappeda, dibantu oleh perusahaan konsultan eksternal. Dokumen ini menguraikan hasil yang diharapkan untuk setiap tingkatan dan jenis pendidikan di kabupaten, dan salah satu prinsip dasar yang tercantum dalam desain besar ini adalah mendorong inovasi.

**Kolaborasi kuat menuju perubahan di kalangan staf sekolah dan masyarakat:** Ini terinspirasi oleh kepala sekolah yang inovatif. Contohnya, kepala sekolah yang karismatik dan berdisiplin kuat dari SD Ar Rahman dan SD Al Azhaar bekerja erat dengan guru-guru mereka untuk mengembangkan lingkungan yang menerima keberagaman dan praktik-praktik yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang timbul karena keberagaman tersebut. Sama halnya dengan itu, faktor terbesar dalam mengembalikan mutu SDN Sumber Gondo 2, SDN Puntan 1 dan SDN Pamolokan 3 adalah cara kepala sekolah baru mereka yang secara sadar memberdayakan dan berkolaborasi dengan guru-guru mereka untuk memperbaiki sekolah dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat setempat.

**Dukungan awal bagi anak dengan kesulitan belajar:** Sekolah di Sampang adalah satu-satunya sekolah yang fokus untuk mempromosikan kemampuan membaca awal dan mengatasi kesulitan belajar – dengan menggunakan buku bacaan taman kanak-kanak dan pengajaran tambahan untuk membantu anak-anak menguasai literasi awal. Meskipun demikian, sekolah lain, seperti SDN Mojokarang di Mojokerto, mengakui pentingnya memberikan dukungan untuk mengatasi kesulitan di awal masa sekolah, biasanya dengan semacam program pengajaran di luar jam sekolah. Contoh terbaik praktik seperti ini mencakup pencatatan yang seksama untuk melihat kemajuan masing-masing anak, dan melakukan konsultasi berkala dengan orang tua. Namun tidak ada bukti, dalam penjelasan guru kelas awal tentang cara mereka mengajar, bahwa mereka memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk menerapkan langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk mengajar literasi atau numerasi yang disebutkan dalam kajian literatur. Dalam kegiatan ‘Rumah Literasi’ misalnya, yang mendorong literasi di masyarakat dan melatih guru untuk mengajarkan literasi, dua fasilitator menjabarkan dua pendekatan berbeda yang mereka gunakan dalam pelatihan.

**Menggunakan buku-buku besar untuk mengajarkan membaca:** Meskipun banyak digunakan di sekolah-sekolah dasar di Indonesia, buku-buku besar dapat digunakan secara kreatif ketika digabungkan dengan berbagai jenis latihan membaca: membaca bersama; membaca dengan bimbingan dan membaca sendiri; bercerita dan bermain peran; dan sebagai pelajaran tambahan bagi mereka yang lambat belajar di luar jam sekolah.

**Mendorong produksi buku dan kebiasaan membaca:** Praktik baik dalam hal ini mencakup:

- Kegiatan seperti Gerakan Budaya Literasi berskala nasional dan program 'Gembar Membaca di Sidoarjo;
- Proyek buku, yaitu 'satu sekolah, satu buku' (dimana setiap sekolah harus memproduksi satu buku setiap tahun, yang ditulis bersama oleh guru dan siswa) dan 'satu guru, satu buku' (SAGU, SABU);
- Keluarga berbagi buku dengan siswa lain secara bergantian melalui perpustakaan;
- Mencatat semua buku yang telah dibaca siswa; dengan ringkasan secara verbal dan tertulis untuk masing-masing buku;
- Menggunakan persentase dana operasional sekolah untuk buku perpustakaan;
- Menunjuk kelas enam sebagai 'kelas ahli' dalam literasi, yang bertanggung jawab membantu siswa di kelas yang lebih rendah untuk belajar dan menikmati membaca;
- Mempromosikan kegiatan membaca melalui radio dan film, yang merupakan kegiatan dua organisasi masyarakat sipil di Sumenep. Mereka menyelenggarakan festival Sabtu yang menekankan pada kegiatan membaca dan mendorong para guru dan orang tua untuk membaca, sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap siswa dan anak-anak mereka.

**Kegiatan serta materi dan media pengajaran praktis yang dikembangkan secara lokal:** Banyak dari praktik baik yang diuraikan melibatkan guru dan pengawas dalam mengembangkan atau menggunakan berbagai jenis kegiatan praktis dan materi, seperti: komik, permainan, mainan, biji-bijian, kardus, dan jam alarm besar. Kegiatan *market day* berada dalam kategori ini, karena merupakan kegiatan praktis yang dirancang untuk mengembangkan sejumlah keterampilan. Keuntungan alat bantu pembelajaran dan kegiatan ini adalah bahwa semuanya berdasarkan bahan-bahan lokal yang tidak mahal, dan dapat dengan mudah diciptakan ulang oleh guru dan sekolah lain. Kekurangannya adalah, karena dilakukan secara lokal, kegiatan ini mungkin tidak dipromosikan dan bisa jadi hanya digunakan secara terbatas oleh penggagasnya, dan tidak diadopsi oleh guru-guru lain.

**Kontrak kesepakatan antara dinas kabupaten dan kepala sekolah untuk peningkatan sekolah:** Sebagaimana disebutkan sebelumnya, di Probolinggo, dinas kabupaten mengadakan kontrak kesepakatan dengan setiap kepala sekolah (serta pengawas dan kepala sub-divisi di dinas kabupaten) dengan fokus khusus pada peningkatan sekolah. Kesepakatan serupa banyak dibuat di wilayah lain di Indonesia, tapi di Probolinggo, kontrak tersebut menyebutkan dengan rinci indikator-indikator peningkatan sekolah yang dimaksud.

**Target khusus untuk inovasi:** Menetapkan jumlah inovasi atau praktik baik minimal yang harus dikembangkan guru, kepala sekolah, sekolah, atau gugus sekolah dan menjabarkan proses yang jelas untuk membagikan dan memilih inovasi tersebut, serta memberikan insentif untuk kenaikan jabatan, akan membantu menstimulasi guru dan menghasilkan ide-ide baru. Dinas kabupaten paling progresif yang kami kunjungi mempunyai persyaratan seperti ini, dan memberikan insentif terhadap praktik-praktik tersebut.

### **Apa yang belum berhasil?**

**Monitoring dan evaluasi:** Seperti yang telah disebutkan, budaya memonitor dan mengevaluasi proses dan hasil praktik baik, baik secara formatif maupun sumatif, belum dikembangkan dengan baik di Jawa Timur. Ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya monitoring dan evaluasi. Ini juga berarti kurangnya data awal, tidak adanya alat bantu yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut, dan belum cukupnya pemahaman tentang apa yang harus dinilai, mengapa, dan bagaimana menilainya.

**Dukungan pemerintah daerah:** Dalam beberapa kasus, ada dukungan yang kuat dari bupati (contohnya melalui peraturan bupati yang fokus pada inovasi atau inklusi) dan dana pemerintah daerah tambahan dari DPRD, misalnya untuk tunjangan gaji guru honorer dan melatih guru sekolah inklusif. Namun, dalam kasus lain, dukungannya minim sekali. Sebagian permasalahannya bersifat politis, dikarenakan bupati dan anggota DPRD dipilih setiap lima tahun – dan beberapa dari mereka memberi perhatian pada bidang pendidikan dan lainnya tidak – tapi sebagian juga dikarenakan masalah ekonomi, di mana beberapa kabupaten memiliki jauh

lebih banyak dana dibandingkan kabupaten lain, dan oleh karenanya mampu dan bersedia memberikan dukungan ke sektor yang 'lebih lunak' seperti pendidikan.

**Program untuk mendorong kesetaraan dan inklusi:** Selain perhatian yang sangat focus terhadap pendidikan inklusif, kami hanya menemukan sedikit ketertarikan di isu eksklusi atau ketidaksetaraan lain seperti gender, keterpencilan, dan bahasa. Salah satu kabupaten (Blitar) yang dulu dikenal dengan pengajaran kelas rangkap, kini telah meninggalkan pendekatan tersebut. Pendekatan kreatif seperti pengajaran kelas rangkap sangat diperlukan di sekolah kecil yang terpencil, dengan terbatasnya jumlah siswa per kelas dan tenaga guru yang tidak memadai (Lihat studi kasus sekolah ini di Lampiran D).

**Mendefinisikan pendidikan inklusif:** Sebagian besar sekolah inklusif mengabaikan anak dengan kesulitan sensorik dan fisik dan lebih memilih anak dengan permasalahan kognitif atau intelektual dan sosial emosional. Sementara gangguan sensorik bisa jadi sulit ditangani di sekolah biasa (membutuhkan teks braille dan bahasa isyarat), kesulitan secara fisik seringkali membutuhkan beberapa fasilitas dan pendanaan tambahan, sehingga anak-anak dengan kesulitan ini hampir selalu dikirimkan ke sekolah berkebutuhan khusus daripada diintegrasikan di sekolah biasa.

**Pola pikir reformasi:** Kata 'pola pikir' muncul dalam diskusi kami dengan kepala dinas agama provinsi, dua dinas kabupaten, dan dua sekolah. Ini biasanya terkait dengan konteks mengapa sekolah tertentu terbuka, mendukung, dan berkomitmen mendukung perubahan, sementara sekolah lain tidak – sebagian besar gurunya cenderung tetap menggunakan cara mengajar yang tradisional dan tidak menerima ide-ide baru. Ini tercermin dalam beberapa rapat, yang dihadiri sebagian besar guru dari setiap sekolah. Mereka yang paling terlibat dalam praktik baik biasanya duduk di baris depan, senang dengan pekerjaan mereka, dan bersemangat untuk menerima komentar tentang hal ini, sementara baris belakang diisi dengan guru yang lebih tua dan kurang tertarik, banyak diantara mereka yang segera akan pensiun. Para guru ini kebanyakan memiliki gelar sarjana, telah memperoleh sertifikasi profesional, dan menerima uang saku tambahan setara dengan gaji pokok mereka. Namun, mereka dianggap belum memiliki pola pikir yang dibutuhkan untuk berubah, entah dalam cara mereka belajar atau mengajar (Chang, Shaeffer *et al.* 2013; de Ree 2017) dan dengan demikian dapat disebut sebagai 'guru berpengalaman' tapi mungkin bukan 'ahli' (Hattie 2003). Ini diutarakan oleh salah satu responden terkait SDN Sawakaring: 'Yang senior sudah merasa puas dengan metode pembelajaran konvensional sebagaimana biasa mereka lakukan sebelumnya'.

Karena itu tantangannya adalah bagaimana mendorong pergeseran pola pikir, contohnya melalui: forum dan kolaborasi antar banyak pemangku kepentingan; peningkatan konsistensi dan kontinuitas dalam menyosialisasikan pendidik ke arah inovasi dan reformasi; dan peningkatan stabilitas staf sekolah dan dinas kabupaten, sehingga ketika pola pikir yang tepat sudah terbentuk, hal ini dapat lebih mudah dipertahankan. Ini akan mencegah apa yang disebutkan oleh satu responden sebagai permasalahan yang umum terjadi: 'Ganti pimpinan, ganti kebijakan, berhenti proyek, berhenti berinovasi'.

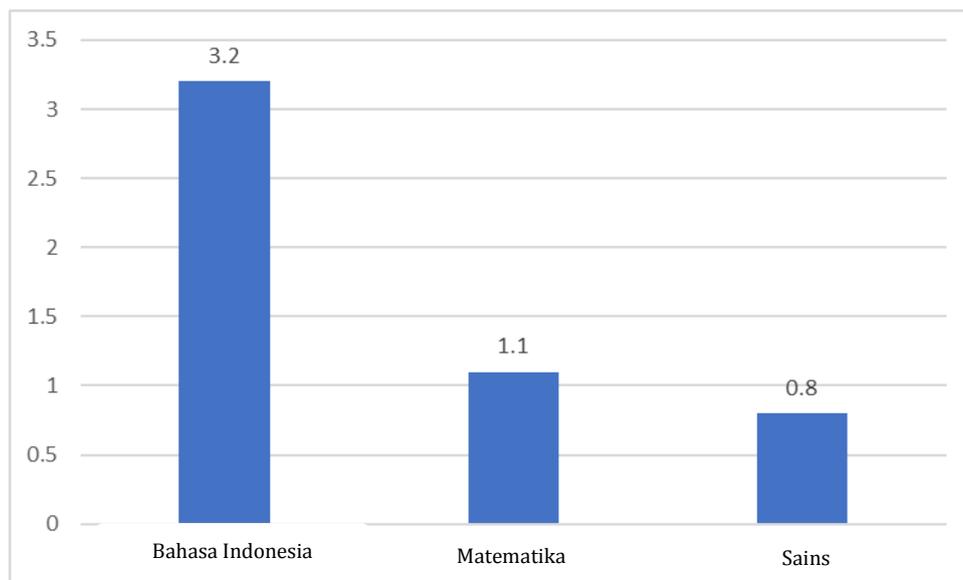
### **3.6 Bagaimana praktik yang ada mencerminkan komitmen INOVASI terhadap kesetaraan gender, inklusi sosial, dan perlindungan anak**

Salah satu upaya penting dari kegiatan INOVASI adalah berkaitan dengan isu lintas bidang, yaitu kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), termasuk: penyandang disabilitas; anak perempuan, perempuan dewasa, anak laki-laki, dan laki-laki dewasa; dan orang dari berbagai suku – dan perlindungan anak, sesuai dengan praktik terbaik internasional di wilayah ini.

Berikut ini adalah kesimpulan kami terkait sejauh mana praktik-praktik di Jawa Timur mencerminkan komitmen INOVASI terhadap isu-isu tersebut:

**Kesetaraan gender:** Praktik baik yang kami kaji dan sekolah atau kabupaten yang mendukungnya tampak kurang tertarik pada isu gender. Menurut hasil AKSI terakhir (Gambar 2), nilai anak perempuan lebih tinggi dari anak laki-laki di Jawa Timur – sebesar lebih dari tiga poin di bidang bahasa, lebih dari satu poin di bidang matematika, dan sekitar 0,8 poin di bidang sains (Kemendikbud, tanpa tanggal). Meskipun sekolah dan dinas kabupaten biasanya mengakui siswa perempuan nilainya lebih baik daripada siswa laki-laki (mereka mengatakan anak perempuan lebih ‘rajin’, ‘ulet’, dan ‘lebih mudah ditangani’) di sebagian besar kelas dan dalam sejumlah mata pelajaran, mereka tidak menganggap perbedaan ini sebagai masalah yang perlu penanganan khusus.

**Gambar 7: Perbedaan nilai AKSI antara anak perempuan dan laki-laki di Jawa Timur, di bidang bahasa, matematika, dan sains (signifikansi secara statistik)**



**Perlindungan anak:** Isu seputar perlindungan anak jarang diangkat. Ketika ditanyakan, beberapa sekolah, terutama di kabupaten yang miskin, sepakat bahwa banyak siswa hidup dalam rumah tangga dimana satu atau kedua orang tuanya telah merantau untuk bekerja, sehingga mereka biasanya dibesarkan oleh kakek-neneknya. Terdapat pengakuan bahwa ini mungkin berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak, tapi sekali lagi, ini tidak dianggap sebagai masalah yang dapat dibantu oleh sekolah.

Satu-satunya isu besar seputar perlindungan anak adalah yang berkaitan dengan perundungan terhadap anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Ini tidak menjadi masalah di satu sekolah kecil yang memiliki tradisi mengikutsertakan anak penyandang disabilitas, dimana perbedaan dan disabilitas dipandang sebagai kontribusi terhadap pendidikan yang ‘utuh’. Di sekolah yang lebih besar, dengan populasi yang lebih beragam dan persentase anak penyandang disabilitas yang lebih kecil, para guru harus berdiri di pintu masuk pada pagi hari untuk memastikan mereka tidak mengalami perundungan saat tiba di sekolah.

**Isu inklusi sosial yang lebih luas** muncul dalam berbagai konteks. Secara teori, isu inklusi dalam pendidikan seharusnya mencakup seluruh rintangan yang dihadapi anak-anak, baik dalam mengakses sekolah maupun dalam belajar. Rintangan tersebut meliputi:

- **Kemiskinan:** Responden merasa permasalahan kemiskinan telah dipecahkan oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penghapusan biaya sekolah (SPP), atau mereka menganggapnya sebagai tanggung jawab lembaga lain, seperti Kementerian Sosial. Pengecualian terjadi di Pasuruan, dimana terdapat peraturan bupati yang memandatkan bahwa seluruh anak miskin harus bersekolah, sehingga dinas kabupaten memetakan anak-anak ini dan memberikan subsidi ekstra dan layanan bis untuk mendorong mereka agar bersekolah dan tidak putus sekolah. Kota Malang juga menyediakan 16 bis untuk tujuan ini, didanai dari anggaran pemerintah daerah.

- **Keterpencilan:** Sekolah-sekolah kecil dan terpencil yang berada di lokasi yang jauh dan kebanyakan di tengah-tengah masyarakat perdesaan terkadang dianggap sebagai suatu masalah, tapi tidak cukup banyak tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Ini terbukti di satu sekolah yang kami kunjungi di Blitar, yang sebelumnya terkenal dengan pencapaiannya dalam pengajaran kelas rangkap melalui program PRIORITAS dan proyek lainnya. Kepala sekolah yang relatif baru mengumumkan bahwa setelah datang ke sekolah, ia menimbang kekuatan dan kelemahan pengajaran kelas rangkap, dan menyimpulkan bahwa hal itu membuat kelas terlalu berisik bagi anak-anak. Dikarenakan kini sekolah itu memiliki cukup guru untuk kelas 1 – 6 (termasuk PNS dan guru honorer), meskipun jumlah kelas belum cukup, ia mulai menghentikan pengajaran kelas rangkap di sekolah tersebut. Ia tidak menyebutkan adanya keuntungan dari pendekatan tersebut. Lebih jauh lagi, ia mengatakan hal ini di depan kepala sekolah yang telah merintis keberhasilan pengajaran kelas rangkap di sekolah itu sebelum dimutasi ke tempat lain. Kepala sekolah dan guru-guru yang baru belum terlatih untuk menerapkan pengajaran kelas rangkap, yang mungkin menjadi alasan di balik sikap negatif mereka terhadap pendekatan tersebut. Namun, kepala dinas pendidikan kabupaten menyatakan akan mengalokasikan dana untuk mendukung pengajaran kelas rangkap di sekolah-sekolah terpencil pada tahun 2019. Satu-satunya solusi alternatif terhadap permasalahan sekolah yang kecil adalah mengelompokkan ulang sekolah-sekolah tersebut. Ini berarti menggabungkan sekolah dan akan menyebabkan sebagian sekolah ditutup dan sebagian anak harus menempuh jarak lebih jauh untuk pergi ke sekolah.
- **Bahasa pengantar:** Secara global, salah satu faktor utama gagalnya pembelajaran adalah perbedaan antara bahasa yang digunakan anak-anak di rumah dan bahasa yang digunakan di sekolah. Di Jawa Timur, ini tidak dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan inklusi, meskipun banyak anak-anak di provinsi tersebut tidak memakai Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu (melainkan Bahasa Jawa, Madura, atau Osing). Di tempat-tempat seperti Madura, responden mengakui mereka menggunakan bahasa ibu untuk secara verbal membantu anak-anak mempelajari kurikulum berbahasa Indonesia, tapi tidak ada yang melihat perbedaan antara bahasa di rumah dan di sekolah sebagai faktor penyebab eksklusi.
- **Disabilitas dan kebutuhan khusus:** Pendidikan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas menjadi isu besar di Jawa Timur, dan ini dikarenakan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif (Pemerintah Indonesia, 2010; Kemendikbud, 2009). Peraturan ini mengkategorikan kebutuhan khusus secara: fisik (termasuk sensorik), emosi, mental, intelektual, dan sosial (termasuk siswa berbakat). Kategori-kategori ini lalu diuraikan lebih lanjut ke dalam 13 disabilitas khusus yang mencakup kesulitan belajar dan lambat belajar.<sup>15</sup> Salah satu isu yang muncul dari kunjungan ke dinas pendidikan dan sekolah, termasuk sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif, adalah kurang jelasnya apa yang termasuk ke dalam disabilitas atau kebutuhan khusus, dan anak-anak mana yang harus dikelompokkan ke dalam label tersebut. Pada beberapa sekolah, mereka yang lambat belajar atau lambat membaca dianggap sebagai kategori anak penyandang disabilitas, tanpa acuan tertentu terkait alasan mengapa mereka 'lambat'. Kebanyakan sekolah tidak memasukkan anak-anak dengan gangguan sensorik dan fisik, sehingga mereka harus masuk ke sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka percaya biaya ekstra untuk menyediakan alat dan fasilitas pendukung bagi anak-anak tersebut terlalu mahal, bahkan bagi sekolah yang katanya inklusif.

Beberapa kabupaten (Sidoarjo, Probolinggo, Gresik, Kota Madiun, Tulungagung dan Kediri) telah mendeklarasikan sebagai 'kabupaten inklusif', dan hal ini berujung pada pelatihan dan pendanaan khusus untuk guru kelas dan guru mata pelajaran supaya menjadi guru pendamping di bidang pendidikan khusus, dan menghadiri acara-acara yang membahas potensi anak penyandang disabilitas. Terdapat pusat sumber

<sup>15</sup> Kategorisasi ini berlawanan dengan praktik profesional internasional yang mengidentifikasi 'disabilitas intelektual' dan 'disabilitas pembelajaran khusus' (Kategori Disabilitas menurut IDEA, Center for Parent Information and Resources, 2017, <https://www.parentcenterhub.org/categories/>). Dalam kasus Indonesia, memberi label 'lambat belajar' kepada anak-anak berarti menjadikan diagnosis mengapa mereka lambat, contohnya karena alasan intelektual atau gangguan visual atau berbicara, menjadi kurang penting.

daya untuk kebutuhan khusus di Sidoarjo yang menangani semua jenis disabilitas, setidaknya di tahap diagnosis, dan mereka juga mengajarkan kepada orang tua dan masyarakat untuk menjadi lebih 'inklusif terhadap penyandang disabilitas'. Ada satu lagi pusat sumber daya untuk pendidikan inklusif di Gresik yang meraih 'Penghargaan Pendidikan Inklusif' pada tahun 2013 dari Kemendikbud. Kabupaten tersebut juga telah mengeluarkan peraturan yang mendorong sekolah-sekolah yang sebelumnya menolak memasukkan anak penyandang disabilitas untuk memasukkan mereka. Sekolah-sekolah bersaing supaya diberi label sebagai sekolah inklusif, dan saat ini ada 37 sekolah inklusif di Kabupaten Gresik, dengan 41 guru pendamping. Selain itu, pemerintah daerah di Gresik memberikan sekolah-sekolah Rp115.000 ekstra per bulan dari anggaran pemerintah kabupaten (BOSDA) untuk setiap anak penyandang disabilitas yang dimasukkan ke sekolah.

Sebaliknya, Pasuruan dan Jombang tidak memiliki sekolah inklusif, dan responden berpikir ini dikarenakan tidak adanya arahan kebijakan dari atas, dan karenanya tidak ada peraturan bupati mengenai pendiriannya. Dalam hal ini, hanya ada sedikit data tentang anak penyandang disabilitas (jumlahnya, apakah bersekolah, dan bersekolah dimana). Mereka yang teridentifikasi dikirim ke sekolah khusus. Salah satu alasan dari pengabaian ini adalah kabupaten-kabupaten tersebut masih menunggu pelatihan tentang kurikulum 2013, sehingga para guru mendapat pengalaman dalam mengajar anak penyandang disabilitas.

Beberapa praktik baik dari pengamatan kami, yang berkaitan dengan sekolah inklusif, adalah sebagai berikut:

- Membatasi pemakaian guru pendamping supaya mendorong anak-anak dengan disabilitas ringan untuk ambil bagian di kelas reguler;
- Membuat ruangan sumber daya khusus untuk anak penyandang disabilitas yang juga berfungsi sebagai ruangan yang tenang bagi anak-anak yang terganggu atau mengganggu kelas reguler;
- Memiliki terapis terlatih untuk mendukung sejumlah kemampuan motorik dan permasalahan lainnya;
- Memiliki jadwal sekolah sehari penuh tanpa pekerjaan rumah, sehingga anak-anak (termasuk anak penyandang disabilitas) mempunyai kebebasan untuk melakukan minat mereka masing-masing dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga;
- Mengadakan psikotes sebelum masuk dan setelah lulus sekolah untuk mendiagnosis kebutuhan dan menentukan kemajuan;
- Program pembelajaran disesuaikan dengan anak penyandang disabilitas, dimana guru menulis laporan terperinci tentang kemajuan harian dalam sejumlah kemampuan, dan fokus pada kemampuan khusus yang mungkin dimiliki anak penyandang disabilitas (musik, komputer, desain grafis);
- Menyusun buku panduan untuk semua guru tentang penerapan pendidikan inklusif, khusus untuk sekolah masing-masing;
- Memastikan makanan khusus bagi anak autisme dan hiperaktif;
- Memfokuskan upaya untuk menghapuskan perundungan kepada anak penyandang disabilitas oleh anak lain di sekolah;
- Mendorong sebagian anak penyandang disabilitas untuk mengikuti kurikulum nasional resmi dan ujian kelas enam, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama.

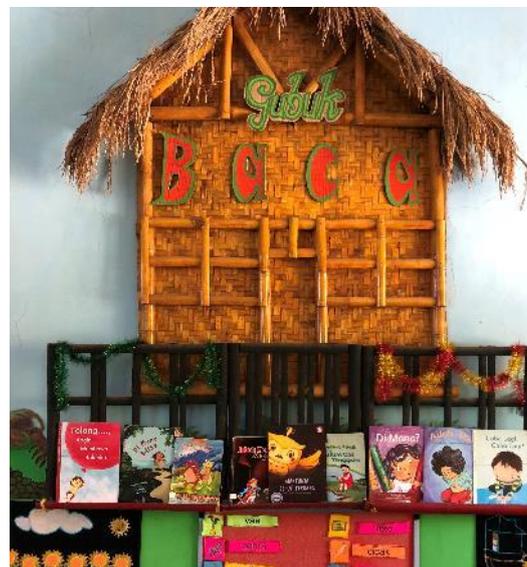
### **3.7 Bagaimana kebijakan dan praktik profesional dipengaruhi oleh inovasi dan praktik menjanjikan**

Di dua wilayah yang kami kunjungi, inovasi dan praktik baik sepertinya mempengaruhi kebijakan di tingkat kabupaten. Sudah jelas bahwa praktik inovatif di sekolah inklusif (baik yang resmi berlabel inklusif maupun tidak) menunjukkan bahwa inklusi dapat berhasil – bahkan di sekolah biasa. Penggunaan guru pendamping bagi anak penyandang disabilitas (sebagian sebagai relawan, sebagian digaji), rencana pembelajaran yang disesuaikan untuk setiap individu, dan pemberian pelatihan dan sensitivitas kepada guru di sekolah biasa tentang pendidikan inklusif sepertinya telah membuat kabupaten lebih bersedia menetapkan atau memperluas program pendidikan inklusif mereka.

Praktik-praktik yang bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi juga tampaknya telah mendorong kabupaten untuk menyambut baik inisiatif pemerintah di tingkatan yang lebih

tinggi, seperti gerakan nasional “Gerakan Literasi”. Ini menjadi contoh di mana kombinasi antara kebijakan di tingkat pusat dengan praktik lokal dapat mempengaruhi peraturan tingkat menengah. Sejumlah besar sekolah dan organisasi lain yang menangani literasi di Sumenep, misalnya, membantu meningkatkan perhatian dinas kabupaten terhadap isu ini.

Selain itu, pengaruh lain di tingkat kebijakan berangkat dari pemahaman bahwa inovasi itu sendiri merupakan sesuatu yang diinginkan, perlu, dan baik. Contoh paling baik adalah dari Madiun, dimana seluruh 71 sekolah dasar harus memaparkan suatu inovasi atau praktik baik dalam lokakarya tahunan selama tiga hari tersebut. Dengan kebijakan ini, sekolah didorong untuk menjadi inovatif dan menggunakan praktik baik di bidang manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar. Pada tingkat yang lebih tinggi, Bupati Madiun menggelar rapat setiap Senin bersama seluruh kepala dinas kabupaten, dimana setiap kepala harus melaporkan kegiatan minggu sebelumnya dan menyoroti setidaknya satu inovasi. Ditambah lagi, semua kepala sekolah harus menyusun rencana dan anggaran berdasarkan penilaian mandiri sekolah. Sekolah didorong untuk mengembangkan ‘ciri khas’ mereka sendiri dengan mengidentifikasi praktik baik yang dapat mereka pakai untuk menarik siswa baru, misalnya mendeklarasikan sebagai sekolah ‘hijau’ atau sekolah ‘literasi’, atau, seperti SDN Pangarangan 3 di Sumenep, sebagai sekolah ‘inspirasi’. (Kabupaten juga telah melekatkan ciri khas terkait inklusivitas, kesehatan sekolah, dan seterusnya.)



Gambar 8 dan 9: Contoh inovasi kelas di SDN Pamalokan, Sumenep district

Praktik-praktik profesional terkini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai jenis praktik baik dan inovasi sebagaimana ditemukan dalam studi inventarisasi ini. Beberapa praktik yang diuraikan dalam studi ini terbatas untuk satu kelas atau sekolah saja, sementara yang lain telah disebarluaskan melalui kelompok kerja guru. Dalam kasus Madiun, contohnya, praktik baik telah disebarluaskan ke seluruh sekolah lewat rapat tahunan mengenai inovasi, dan di dua kabupaten lain, hal ini dilakukan melalui kunjungan studi banding yang lebih informal antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Namun, ini merupakan pengecualian, dikarenakan masih terbatasnya diseminasi atau replikasi secara keseluruhan antar gugus, apalagi antar kabupaten. Sehingga, inovasi ini tidak terlalu mempengaruhi praktik mengajar dari lembaga guru yang lebih luas di suatu kabupaten.

Berbicara tentang hasil pembelajaran, karena sedikit sekali praktik baik yang fokus pada pembelajaran kelas awal, semuanya belum berujung pada klarifikasi yang sangat kita butuhkan, yaitu bagaimana cara terbaik untuk menjadikan anak-anak di Indonesia unggul dalam literasi dan numerasi, atau bagaimana memperbaiki praktik yang ada untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagian besar praktik-praktik tersebut mengajarkan atau memperkuat kemampuan lanjutan, mendukung literasi di masyarakat luas, dan mendorong penguatan kebiasaan membaca.

Hanya di dua kabupaten kami menemukan penekanan untuk mengurangi kesenjangan kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa. Karena itu hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa praktik baik yang kami lihat meningkatkan mutu sekolah yang berkinerja rendah menjadi lebih tinggi.

Mengingat definisi praktik baik dan inovasi dalam studi ini adalah inisiatif yang berkembang dari lingkungan masyarakat setempat dan melalui proses dari bawah ke atas (bottom-up), dan meskipun sebaiknya ia mencakup contoh baik berupa penyimpangan positif (positive deviance), namun sepertinya sejauh ini tidak ada yang memperoleh dukungan eksternal atau pengaruh yang diperlukan di luar kabupaten mereka sendiri (atau bahkan gugus mereka sendiri) agar dapat diperluas. Mekanisme seperti lokakarya tahunan di Madiun yang menghadirkan inovasi dari setiap sekolah bisa jadi menginspirasi sekolah lain untuk mencoba hal baru, tapi tidak berarti bahwa inovasi terbaik yang dipaparkan tersebut didukung secara sistematis oleh kabupaten. Dengan kata lain, mekanisme kementerian atau pemerintah provinsi untuk memperluas praktik baik dan inovasi sangatlah terbatas, kecuali di dalam gugus sekolah.

### 3.8 Pendidikan di Jawa Timur: konteks untuk inovasi?

Satu pertanyaan yang esensial dalam studi inventarisasi adalah 'mengapa memilih Jawa Timur'? Apa yang mendorong inovasi dalam konteks provinsi? Jawa Timur dikenal sebagai provinsi yang kaya akan inovasi di bidang pendidikan – seorang staff kabupaten (Sidoarjo) menyebutnya 'barometer' untuk inovasi pendidikan. Salah satu alasan mudah mengapa demikian adalah Jawa Timur menjadi lokasi dari beberapa program pembangunan eksternal, didanai baik oleh lembaga bilateral dan multilateral - contohnya, Creating Learning Communities for Children (CLCC), PRIORITAS, MBE dan Decentralised Basic Education (DBE). Jadi, provinsi ini telah memetik manfaat dari praktik global terbaik dan sebagian telah dipertahankan atau diadaptasi atau menginspirasi pola pikir inovatif yang saat ini tercermin di seluruh provinsi. Meski hal ini benar dalam hal tertentu, berbagai faktor-faktor krusial lain muncul, seperti kemudahan dan transparansi komunikasi di seluruh provinsi dan sejumlah besar lembaga pendidikan tinggi yang dapat mendukung riset dan mendorong praktik yang lebih baik. Berbagai faktor juga tampaknya berperan dalam mengembangkan konteks di Jawa Timur yang 'berhasil' terkait pengembangan dan penerapan (tapi tidak dalam hal perluasan) praktik baik, meliputi:

- **'Ekosistem' untuk inovasi:** Sistem seperti ini digambarkan lebih dari satu kali, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) kepala sekolah yang berpikiran terbuka dan pengawas yang memberikan wadah bagi ide baru dan mendorong kolaborasi dengan dan antara guru dan dinas kabupaten, dan (2) pengawas memberitahuk guru dan kepala sekolah bahwa mereka secara proaktif akan mencari dan memberi penghargaan terhadap inovasi. Seorang staf dinas kabupaten di Jawa Timur mengatakan inovasi adalah keinginan, bukan kebutuhan. Dalam contoh lain, kepala dinas agama provinsi mengindikasikan bahwa kepala sekolah bisa diganti apabila sekolahnya tidak menerapkan inovasi.
- **Dinas pendidikan mendorong inovasi:** Ada perbedaan yang jelas antara dinas pendidikan yang proaktif dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya, dan yang tidak. Ini seringkali tercermin dalam slogan dinas, contohnya: satu slogan mengimbau seluruh kepala sekolah untuk bersikap 'Aktif, Kreatif, Inovatif, Komunikatif' (AKIK), dinas lain menyemangati guru dengan slogan 'satu sekolah tiga inovasi' (SAKTI); di Gresik slogannya 'satu agen, satu inovasi'; dan di Kota Malang slogannya Sekolah 3 M: Mudah mencari sekolah, Murah, dan Merata kualitasnya.
- **Meningkatnya jumlah dan ukuran sekolah swasta:** Sekolah-sekolah tersebut bersaing dengan sekolah negeri dan sesama swasta, sehingga memerlukan praktik baik yang menonjol untuk menarik siswa - 'no inovasi, mati', sebagaimana dikatakan seorang kepala sekolah swasta. Sekolah swasta juga lebih bebas untuk mengembangkan pendekatan baru, karena hubungannya yang tidak terlalu erat dengan dan tidak terlalu bergantung pada dinas kabupaten. Upaya mereka untuk mengembangkan praktik baik sebagai bagian dari 'ciri khas' mereka bisa jadi menginspirasi sekolah negeri untuk melakukan lebih baik lagi.
- **Fokus yang kuat pada persaingan (sehat):** Meskipun persaingan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten antara kepala sekolah, guru, sekolah, siswa, dan gugus sekolah dapat berakibat negatif,

hal tersebut juga dapat mendorong inovasi dan praktik yang lebih baik (lihat catatan tentang sindrom piala). Sehingga, dinas kabupaten yang kuat, seperti di Gresik, mendorong seluruh guru dan kepala sekolah untuk mencoba ide baru dan berbeda, serta menyelenggarakan kompetisi dengan hadiah dan penghargaan; di dua kabupaten, praktik-praktik terbaik kemudian diterbitkan dan disebarluaskan.



Gambar 10. Lemari kaca penuh piala ini mewakili 'sindrom piala' di Indonesia – bukti material kualitas pendidikan, tapi tidak selalu akurat.

Namun demikian, konteks mempromosikan perubahan dan inovasi ini dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat menghambat perubahan atau setidaknya tidak mendukungnya:

**Kondisi budaya, tradisi, dan sosial ekonomi:** Isu ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi pendidikan dan inovasi di Jawa Timur. Staf di dua dinas kabupaten meyakini bahwa budaya Madura umumnya kurang mendukung pendidikan, dibandingkan dengan budaya lain di Jawa Timur. Pengaruh Islam yang kuat, bukan hanya di Madura, tapi juga di kabupaten lain sepanjang pantai timur Jawa Timur, dianggap berdampak negatif terhadap pendidikan anak perempuan. Contohnya ketika anak perempuan meninggalkan sekolah untuk menjalani pernikahan di usia muda. Sebaliknya, konteks perkotaan wilayah Malang-Batu, dikombinasikan dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi, menjadi

faktor mengapa sejumlah praktik baik dan inovasi ditemukan di dua kabupaten tersebut. Faktor terkait lain yang menghambat inovasi mencakup kemiskinan struktural di Situbondo dan Bondowoso, yang salah satunya menyebabkan minimnya pendanaan lokal tambahan untuk meningkatkan sekolah.

**Otonomi daerah di kabupaten:** Otonomi daerah di kabupaten, hasil dari proses desentralisasi, dapat mendukung dan menghambat inovasi. Salah satu dampak otonomi ini adalah bahwa setiap dinas kabupaten dapat memilih untuk mengikuti kebijakan menteri (seperti peraturan menteri), atau mengabaikannya. Semuanya kecuali satu kabupaten mengetahui tentang peraturan yang mengharuskan adanya minimal satu sekolah inklusif per kabupaten, dan sebagian di antaranya telah memperkuatnya dengan peraturan bupati, sementara sisanya jauh tertinggal dalam penerapannya. Otonomi daerah di kabupaten mempunyai beberapa konsekuensi:

- Kementerian pusat kehilangan sebagian besar pengaruh dan kewenangannya dalam memastikan akurasi dan ketepatan waktu pengumpulan dan pelaporan data serta pelaksanaan kebijakan menteri. Kebijakan seringkali menjadi rekomendasi, bukan kewajiban. Sehingga, misalnya, dinas pendidikan nasional tidak dapat berbuat banyak untuk memastikan bahwa peraturan presiden atau pendidikan nasional tentang pendidikan inklusif dilaksanakan di setiap kabupaten.
- Meskipun terdapat proses pra-kualifikasi untuk calon kepala sekolah melalui Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), satu kabupaten di Solo masih melaporkan bahwa kepala sekolah diganti melalui penunjukkan provinsi atau kabupaten, dan mempromosikan dewan sekolah tanpa referensi dari dinas pendidikan. Ini berarti mereka yang ditunjuk belum tentu merupakan yang paling layak menempati jabatannya, dan karena itu bukan figur yang paling tepat untuk bisa menginspirasi perubahan.
- Ada perbedaan terkait bagaimana pengawas ditugaskan dalam kantor dinas dan gugus sekolah. Sebagian ditugaskan secara permanen ke satu atau dua gugus, sehingga memberikan dukungan yang konsisten terhadap gugus sekolah (dengan asumsi pengawas ini kompeten). Di wilayah lain yang jumlah pengawasnya lebih sedikit dibandingkan jumlah gugus, mereka berpindah-pindah dari satu gugus ke gugus lain, tergantung dari program rapat gugus (seperti yang dijelaskan seorang responden). Meskipun perbedaan ini belum tentu berdampak negatif, keuntungan dan kerugiannya

terkait peningkatan kualitas sekolah patut dikaji lebih lanjut agar dapat ditemukan cara terbaik untuk menugaskan pengawas ke gugus-gugus sekolah.

- Isu pengawasan gugus juga berkaitan dengan inkonsistensi terkait kondisi, kegiatan, dan kualitas gugus itu sendiri. Seluruh dinas kabupaten dan sekolah yang kami kunjungi menghargai keberadaan gugus, tapi hanya separuhnya yang memenuhi persyaratan minimum (yaitu menyelenggarakan rapat sebulan sekali selama dua jam antar guru kelas atau guru mata pelajaran untuk membahas permasalahan bersama), sementara separuh sisanya bertindak lebih jauh, dengan memanggil narasumber dari organisasi seperti LPMP untuk mengadakan pelatihan tambahan, misalnya, dan mencari cara supaya sekolah yang lebih kuat mendukung sekolah yang lebih lemah.
- Selain kekurangjelasan terkait gugus dan pengawas, kami juga menemukan sekolah model dan sekolah rujukan, tapi tidak jelas fungsi mereka apa, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sekolah. Terdapat satu sekolah model di setiap kecamatan, dan sekolah yang berada di bawah binaan LPMP lokal harus memiliki 12 kelas (dua kelas untuk setiap tingkatan) dan harus memenuhi delapan standar nasional untuk pendidikan. Ada satu sekolah rujukan di setiap kabupaten, dan sekolah ini berada di bawah bimbingan Kemendikbud, melalui Direktorat Pengembangan Sekolah Dasar, dan sebagian besar muncul dari sistem sekolah berstandar internasional yang sebelumnya ada. Sekolah model dimaksudkan untuk memiliki sekolah imbas di dalam gugusnya. Sebagian besar sekolah model sepertinya mengikuti pedoman kementerian dan memilih sekolah imbasnya berdasarkan kedekatan geografis. Satu sekolah model secara logis memiliki sekolah-sekolah inti dari gugusnya sebagai sekolah imbasnya. Selain itu, di sebagian kabupaten, ada asumsi bahwa sekolah model akan lulus menjadi sekolah rujukan. Tidak jelas bagaimana dan sejauh mana kombinasi kompleks berbagai jenis sekolah ini dikoordinasikan secara optimal agar fokus pada peningkatan sekolah.

### 3.9 Tantangan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa

Studi ini mengungkapkan beberapa tantangan yang masih ada, baik bagi INOVASI maupun Kemendikbud, terkait peningkatan kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa, termasuk:

**Kurangnya pemahaman bersama tentang bagaimana mengajarkan literasi** (dan dalam tingkatan yang lebih kecil, mengajarkan numerasi):<sup>16</sup> Di banyak dinas kabupaten dan sekolah yang kami kunjungi, staf dan guru sulit untuk menjelaskan bagaimana mereka mengajarkan literasi di sekolah mereka. Kebanyakan menjelaskan pendekatan fonik, tapi berfokus pada penghafalan huruf, bukan vokalisasi bunyi. Di satu organisasi non-pemerintah yang mempromosikan literasi, seorang guru menggambarkan pendekatan fonik, sementara guru lain mengatakan ia menggunakan pendekatan satu kata secara penuh. Jadi literasi sepertinya tidak secara jelas atau konsisten dipahami sebagai konsep (apa definisi literasi), proses (bagaimana mempelajarinya) atau pedagogi (bagaimana cara terbaik untuk mengajarkannya), dan karenanya pengajaran literasi tidak selalu mengikuti praktik internasional terbaik terkait dengan langkah-langkah yang sistematis dan berurutan seperti dijelaskan dalam kajian literatur.

Namun, semua sekolah memahami adanya permasalahan dengan yang 'lambat' membaca atau belajar (slow reader/learner), dan pentingnya mengidentifikasi isu ini lebih awal dan memberikan b tambahan kepada anak-anak ini. Setidaknya separuh dari sekolah tersebut bersedia dan mampu membantu anak-anak ini, terutama di kelas awal, dengan jam belajar tambahan, dan dalam satu kasus, menggunakan buku bacaan taman kanak-kanak sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan literasi yang lebih kuat.

**Kurangnya pendekatan strategis untuk mengembangkan, melaksanakan, menyebarluaskan, dan mempertahankan praktik baik, terutama yang berkaitan dengan belajar mengajar yang lebih baik dan**

---

<sup>16</sup> Tingkatan yang lebih kecil disini berkaitan dengan dua isu: (1) kasus-kasus relatif baru yang berhubungan dengan numerasi di antara 35 praktik baik yang dipilih; dan (2) perbandingan kemudahan anak-anak dalam mempelajari dasar-dasar numerasi (angka dan perhitungan sederhana) di kelas awal.

memanfaatkan lembaga dan individu yang saat ini tersedia: Sejumlah besar aktor di tingkat kabupaten dan di bawahnya seharusnya membantu meningkatkan kualitas sekolah, dan lebih spesifik lagi, meningkatkan praktik belajar mengajar dan pada akhirnya, hasil pembelajaran. Ini meliputi staf dinas kabupaten, pengawas, LPMP, sekolah model, sekolah rujukan, sekolah inti dalam gugus sekolah, gugus itu sendiri; rapat guru dan kepala sekolah yang dikoordinir gugus-gugus tersebut, serta kepala sekolah dan guru, terutama yang paling senior dan berpengalaman (jika bukan selalu yang paling 'ahli').

Meskipun desentralisasi memberikan dinas kabupaten otonomi untuk mengatur diri mereka sendiri, hasilnya sangat bervariasi dalam hal bagaimana entitas-entitas tersebut bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu mengembangkan praktik baik dan inovasi. Sebagian kabupaten menugaskan pengawas secara permanen ke gugus-gugus sekolah, sementara di kabupaten lain, mereka berpindah dari gugus ke gugus. Peran pengembangan kapasitas dari sekolah rujukan yang didukung kementerian tidak jelas dan kurang dipahami. Peran sekolah model lebih jelas, di mana setiap sekolah membawahi gugus sekolah yang berada di dekatnya. Tapi struktur ini hanya sedikit membantu sekolah lain yang berada di kecamatan yang bersangkutan. Hanya satu kabupaten yang memiliki sekolah imbas yang merupakan sekolah inti dari seluruh gugus di kecamatan. Ini membentuk piramida dukungan dan komunikasi (top-down dari atas ke bawah dan bottom-up dari bawah ke atas) dari LPMP ke sekolah model, kemudian ke sekolah inti dan anggota gugusnya (sekolah reguler). Oleh karena itu, secara umum, kurangnya kejelasan - dan sifat saling melengkapi - terkait peran berbagai aktor menyulitkan mereka dalam menjamin adanya dukungan sistematis terhadap praktik baik dan inovasi yang menghasilkan sekolah dan hasil pembelajaran yang lebih baik.

**Inkonsistensi pengawasan dan dukungan profesional:** Terkait dengan hal di atas adalah inkonsistensi dukungan bagi para guru, entah guru yang baru dan masih belajar, atau yang lebih tua dan kurang bersedia belajar. Ini dimulai dari tahap pendidikan pra-jabatan, diluar dari cakupan laporan ini, dan berlanjut hingga pelatihan dalam jabatan dan pengembangan profesional lanjutan. Tidak ada sekolah yang mempertanyakan apakah mereka memakai pendekatan sistematis untuk menangani guru baru, yakni dalam melakukan masa perkenalan dan percobaan, dua bagian penting dari proses perekrutan dan pengembangan profesional. Namun, sekolah terpilih yang memiliki praktik baik memastikan adanya pengawasan, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan bagi para guru mereka melalui kepala sekolah, gugus, dan pengawas sekolah. Seluruh sekolah atau dinas, kecuali satu, mengindikasikan bahwa kepala sekolah baru mereka telah memenuhi pra-kualifikasi lewat LP2KS di Solo, dan sistem perekrutan dan sertifikasi yang baru kini menjamin pengawas yang lebih memenuhi syarat. Secara umum, responden merasakan peningkatan dalam kepemimpinan kepala sekolah dan pengawas, dan seluruh pihak yang diwawancarai menghargai kegiatan yang dilakukan gugus, dengan tingkat antusiasme yang bervariasi. Namun, ini berbeda dengan Madiun, dimana pengawas mengunjungi sekolah yang berbeda setiap harinya selama tiga jam yang diwajibkan (fokus pada sekolah berkinerja rendah). Sementara di kabupaten lain, kunjungan pengawas tidak terlalu sering, tidak terlalu intensif, dan cenderung fokus pada urusan administrasi dibandingkan pedagogi.

**Kurangnya konsistensi dukungan pemerintah daerah,** entah dari wali kota, bupati, DPRD, atau pejabat tingkat desa: Dalam kasus terparah, hanya ada sedikit dukungan dikarenakan berbagai alasan, salah satunya prioritas yang lebih condong ke infrastruktur daripada pengembangan kapasitas manusia. Karena itu hanya sedikit peraturan bupati yang fokus pada pendidikan (seperti pendidikan universal atau pendidikan inklusif) dan pendanaan dari pemerintah daerah atau desa untuk pendidikan seringkali terbatas (selain dari dana operasional kabupaten untuk sekolah). Ini menjadikan guru kontrak misalnya, hanya memiliki gaji terbatas yang diberikan oleh sekolah melalui dana operasionalnya, dan tidak ada pengawasan kinerja dari dinas pendidikan kabupaten dan sekolah tempat mereka mengajar. Dalam kasus terbaik, seperti di Madiun, dana pemerintah daerah digunakan untuk menambah pemasukan guru kontrak (hingga Rp1,6 juta per guru, dan Malang memberikan Rp500.000 per guru).

**Adanya ketidaksetaraan dan kurangnya ketertarikan untuk mendorong pemerataan:** Hanya dua dari tujuh dinas kabupaten yang kami kunjungi merujuk secara mendalam tentang pemerataan atau mendorong kesetaraan sebagai salah satu tantangan dan fungsi terbesar mereka. Kedua kabupaten ini terutama menyadari adanya ketidaksetaraan antara sekolah perkotaan dan perdesaan, sekolah kaya dan miskin, dan

sekolah yang dianggap 'favorit' (istilah yang rupanya saat ini tidak lagi digunakan), dan yang bukan favorit. Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti sejarah dan reputasi mutu yang rendah, kurangnya guru yang memenuhi syarat, fasilitas dan materi yang tidak memadai, dan masyarakat sekitar dengan kemiskinan yang tinggi serta rendahnya dukungan bagi sekolah dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Meskipun semua orang sepertinya memahami masalahnya, hanya beberapa dinas atau sekolah model yang mengambil tindakan. Di Probolinggo contohnya, ada upaya melalui 'klinik pendidikan', di mana sekolah di tengah kota memberikan bantuan pendampingan dan sumber daya ke sekolah yang berada di pinggir kota. Banyak hal lain yang bisa dilakukan, misalnya dengan melihat fungsi gugus bukan hanya untuk meningkatkan kualitas gugus secara keseluruhan, tapi juga secara khusus mengurangi kesenjangan antara sekolah dengan prestasi terbaik dan terburuk. Kebijakan menteri yang baru untuk mengirim guru dan kepala sekolah yang bagus ke sekolah miskin dapat membantu proses ini.

Salah satu gejala permasalahan ini adalah istilah yang berlaku di Indoneia, yaitu 'sindrom piala'. Hampir semua sekolah yang kami kunjungi mempunyai setidaknya satu (terkadang tiga) lemari kaca yang berisi piala dan medali, yang mewakili lomba yang dimenangkan oleh sekolah atau kepala sekolah, guru, dan siswanya di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, di bidang-bidang seperti inklusivitas, inovasi, dan lingkungan. Penghargaan ini jelas digunakan sebagai bukti kualitas sekolah yang dapat menarik siswa baru, dan terkadang diulas dalam publikasi sekolah. Namun semua pihak yang kami wawancarai tidak memikirkan bagaimana kompetisi tersebut memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan sekolah di perkotaan yang kaya dan memiliki reputasi bagus, serta mengabaikan sekolah di perdesaan yang lebih miskin dan kurang terkenal (dan akibatnya memperlebar jurang ketimpangan).

Madiun, sekali lagi, merupakan pengecualian. Untuk mendorong kesetaraan yang lebih besar, siswa baru dimasukkan ke sekolah tanpa diuji, tidak ada kompetisi antar sekolah yang digelar, dan pengawas yang kompeten dikirim ke sekolah yang lemah untuk menilai cara-cara meningkatkan sekolah tersebut.

## 4. RINGKASAN TEMUAN DAN KESIMPULAN

Sejumlah kesimpulan dapat ditarik dari hasil studi inventarisasi praktik baik dan inovasi ini.

**Ketertarikan untuk mengembangkan praktik yang lebih baik dan inovasi yang lebih luas cukup tinggi di Jawa Timur, karena alasan yang disebutkan responden dan dilaporkan di studi ini.** Hal ini mencakup:

- 'ekosistem' yang mendukung inovasi;
- dinas pendidikan kabupaten yang mendorong inovasi;
- meningkatnya jumlah dan ukuran sekolah swasta, dimana hal ini, dalam rangka persaingan untuk mendapatkan siswa baru, mendorong banyak sekolah untuk tampil 'inovatif';
- fokus kuat pada persaingan (sehat).

Contoh dari studi inventarisasi terkait pendekatan menuju perubahan yang lebih luas di tingkat sekolah, sebagaimana disebutkan dalam kajian literatur, menunjukkan bahwa **perubahan menyeluruh dapat diwujudkan**. Tapi mereka juga menunjukkan bahwa hal ini harus difasilitasi oleh kombinasi antara pimpinan-kepala sekolah yang kuat, guru yang mau bekerja sama dan mengambil risiko, komunitas yang mendukung, dan pengawas serta dinas kabupaten yang mampu dan bersedia mendukung proses ini. Perubahan tersebut mereplikasi pendekatan PDIA, dimana permasalahan diidentifikasi di tingkat bawah oleh sekolah dan masyarakat lokal, kemudian dipecahkan melalui proses iteratif dan langkah demi langkah, yang membuka ruang terhadap pembelajaran dan adaptasi fleksibel, dan berujung pada inovasi dan praktik yang berhasil. Untuk membantu proses ini, berbagai mekanisme dan prosedur harus ditetapkan dan dikoordinasikan lebih baik untuk menjamin perubahan itu berkelanjutan, bahkan setelah sang 'penggagas' telah pindah.

Meskipun banyak praktik baik telah dikembangkan dan dilaksanakan di Jawa Timur, yang dirancang oleh kepala sekolah yang kreatif dan para guru, baik secara individu maupun berkelompok, untuk memecahkan permasalahan belajar-mengajar tertentu, **banyak praktik baik ini tidak menjadi bagian dari pendekatan di tingkat sekolah secara komprehensif terkait inovasi dan perubahan atau proses perluasan ke lebih banyak guru, sekolah, dan lainnya.**

Ini dapat disebabkan oleh:

- terbatasnya dukungan (atau bahkan ketertarikan) dari kepala sekolah dan pengawas untuk mendorong dan menyebarkan praktik tersebut;
- kurangnya minat dan metode untuk menilai dampak dari praktik ini dan menunjukkan potensi manfaatnya dalam lingkup yang lain;
- kurangnya minat atau kemauan guru-guru lain untuk mengadopsi praktik tersebut (atau tidak sesuai dengan kelas dan mata pelajaran lain);
- tidak adanya mekanisme di luar sekolah dan gugus untuk memperluas praktik tersebut.

**Selama pelatihan pra-jabatan, guru tidak cukup dilatih secara sistematis menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan siswa dan secara bertahap mengajarkan literasi dan numerasi, terutama di kelas-kelas awal.** Kurangnya perhatian yang diberikan untuk literasi dan numerasi dalam kurikulum pra-jabatan (walaupun tim studi tidak menjajaki hal ini lebih jauh) diperkuat dengan sulitnya guru dan kepala sekolah menjelaskan dengan rinci bagaimana mereka mengajarkan kedua mata pelajaran tersebut – atau, dalam satu kasus, dua guru menyarankan pendekatan yang saling bertentangan untuk program yang sama. Contoh-contoh pendekatan pembelajaran kelas awal yang lebih baik dan sistematis mungkin ada, tapi dalam contoh yang kami analisis dan setidaknya menyangkut literasi, pada umumnya terdapat ketertarikan yang lebih besar untuk mendorong kebiasaan membaca yang lebih kuat dan literasi masyarakat dibandingkan menjamin seluruh siswa memperoleh fondasi kemampuan dasar yang solid di awal, yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang sukses.

**Meskipun Indonesia memiliki komponen sistem pendukung peningkatan sekolah dan pengembangan guru yang kuat, responden dalam studi ini merasa berbagai komponen tersebut tidak selalu bersinergi untuk memberikan dukungan yang diharapkan.** Fungsi yang dijalankan gugus sekolah umumnya dihargai, tapi terdapat ketidakjelasan terkait: (1) peran sekolah model, sekolah rujukan, dan sekolah inti (serta LPMP dan tim penjaminan mutu); dan (2) bagaimana hubungan antar berbagai jenis sekolah ini, hubungan sekolah-sekolah tersebut dengan dinas kabupaten dan sekolah lain, serta bagaimana mereka bekerja untuk mendukung peningkatan sekolah. Kebingungan ini menyulitkan dalam membangun sistem pendukung yang kuat dan komprehensif.

**Proses monitoring pelaksanaan praktik dan inovasi baru serta evaluasi dampak akhirnya terhadap peningkatan sekolah dan hasil pembelajaran siswa belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik di Jawa Timur** – dan ini dapat terjadi pula di daerah lain di Indonesia. Para pendidik seringkali tidak melihat pentingnya proses tersebut (dan beberapa responden bahkan terkejut saat kami mengajukan pertanyaan ini). Mereka umumnya belum mengembangkan indikator yang jelas dan mengumpulkan data awal yang cukup untuk membuat proses tersebut bermanfaat, dan cenderung lebih mengacu pada dampak anekdotal dan kualitatif dibandingkan pengukuran secara kuantitatif – meskipun aspek terakhir harus diakui sulit untuk diidentifikasi. Kurangnya minat untuk mencatat dampaknya – kuranglebih sama dengan ketidakmauan untuk secara proaktif mereplikasi praktik baik yang ada – mungkin disebabkan karena perasaan bahwa praktik baik atau inovasi baru merupakan ‘solusi sementara’ – dengan kata lain, memang berguna (untuk memecahkan masalah guru, memenangkan piala, atau memperoleh kenaikan jabatan), tapi tidak penting diluar kegunaan tersebut.

**Definisi pendidikan inklusif yang diadopsi di Jawa Timur hanya terbatas pada anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.** Analisis terhadap dan upaya untuk menangani hambatan pembelajaran lain – gender, keterpencilan, bahasa, kemiskinan – sangat minim, ditandai dengan ditinggalkannya metode pengajaran rangkap kelas yang dulu merupakan kegiatan rintisan.

Walaupun sekolah-sekolah dan dinas-dinas kabupaten di Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, pelaksanaan peraturan presiden dan menteri pendidikan nasional terkait pendidikan inklusif tersebut tidak konsisten. Beberapa kabupaten telah melampaui persyaratan peraturan dengan mendirikan dan secara serius mendanai sekolah-sekolah inklusif, sementara yang lain hanya melakukan sedikit upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Definisi pendidikan inklusif yang terbatas dikaitkan dengan pengabaian umum terhadap isu ketidaksetaraan dan ketimpangan akses dan kualitas. Dalam diskusi dengan dinas kabupaten, pada umumnya hanya terdapat sedikit ketertarikan untuk secara sistematis membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi sekolah berprestasi rendah, baik secara mutlak ataupun dibandingkan dengan sekolah berprestasi tinggi .

## 5. REKOMENDASI

### Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan informasi dan kesimpulan dari studi ini, direkomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- **Mencari cara-cara untuk mendorong ketertarikan yang lebih besar untuk mengembangkan, menerapkan, dan menyebarkan praktik baik dan inovasi yang lebih komprehensif di seluruh sistem pendidikan** serta mendorong dinas-dinas kabupaten dan pengawas mereka untuk mengidentifikasi dan memelihara inovasi tersebut. Praktik-praktik baik seharusnya menjadi satu komponen penting dari pendekatan menuju perubahan di tingkat sekolah. Ini perlu dilakukan melebihi sekedar memberikan sponsor untuk kompetisi atau piala, dengan mengembangkan mekanisme yang mendorong seluruh aktor terkait untuk bekerja sama mengembangkan, mengadaptasi, mengevaluasi, menyebarkan, dan memperluas praktik baik. Contohnya, peran pengawas dapat didefinisikan lebih jelas untuk mencapai tujuan ini, gugus dapat diperkuat dan diisi sumber daya yang lebih baik, dan mekanisme antar gugus dan antar dinas dapat dikembangkan agar dapat memperluas praktik baik.
- **Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas pembelajaran awal, terutama terkait literasi dan numerasi.** Ini sebaiknya meliputi:
  - transisi yang lebih mulus dan lancar dalam hal konten dan pedagogi – dari pra-literasi atau literasi yang muncul di PAUD dan kurikulum numerasi yang seharusnya diberikan di tingkat PAUD<sup>17</sup> menjadi kurikulum lanjutan yang diajarkan di kelas awal sekolah dasar, yang dimaksudkan agar siswa menguasai kemampuan tersebut;
  - pendekatan dan langkah jelas dan direkomendasikan yang dapat dipahami dan digunakan guru di kelas awal, agar siswa mereka lebih mudah menguasainya;
  - melakukan revisi terhadap kurikulum pelatihan dan pendidikan pra-jabatan agar memberikan lebih banyak waktu dan pendekatan lebih sistematis untuk mengajarkan literasi dan numerasi; ini sebaiknya mencakup proporsi waktu yang lebih banyak untuk melakukan observasi kelas dan praktik mengajar;
  - memperbanyak variasi metode yang dapat digunakan guru untuk memberikan dukungan tambahan bagi pembaca atau pelajar lambat, dan memberikan pelatihan terkait metode-metode tersebut.

Satu studi tentang pendidikan di Indonesia menarik kesimpulan berikut ini:

'...faktor-faktor terkait belajar mengajar mempunyai dampak akumulatif tertinggi terhadap hasil pembelajaran literasi dan numerasi ... Terdapat bukti yang kuat bahwa menggunakan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan dan kesulitan siswa dapat meningkatkan hasil pembelajaran ... guru seharusnya memiliki pemahaman yang memadai terkait mata pelajaran serta pengetahuan pedagogik dan keterampilan sosial yang memadai untuk memahami

---

<sup>17</sup> Pendidikan Anak Usia Dini

permasalahan di kelas, untuk kemudian memilih dan menerapkan strategi pengajaran yang paling tepat' (Rarasati *et al.* 2017).

Kesimpulan ini dinyatakan secara lebih umum oleh definisi 'guru ahli' menurut Hattie, bukan 'guru berpengalaman' yang disebutkan dalam studi ini – keduanya berbeda dalam hal:

'... cara mereka menampilkan kelas, tingkat tantangan yang mereka berikan kepada siswa, dan yang terpenting, kedalaman proses yang dialami siswa mereka. Siswa yang diajar guru ahli menunjukkan pemahaman konsep yang disasar dalam pengajaran secara lebih terpadu, koheren, dan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan pemahaman yang didapatkan siswa lain' (Hattie 2003).

Ini mencerminkan pembelajaran 'lebih dalam' yang juga dibahas Fullan (2015).

- **Mengembangkan mekanisme yang lebih sistematis dan komprehensif untuk mendorong peningkatan kualitas sekolah.** Salah satu yang terpenting adalah, Kemendikbud perlu **memperjelas peran berbagai aktor yang fokus pada kualitas sekolah di tingkat daerah dan hubungan di antara mereka:** LPMP; sekolah model, sekolah rujukan, sekolah inti dan gugusnya; staf dinas kabupaten dan pengawas; kepala sekolah dan guru; dan masyarakat lokal serta komite sekolah.
- **Mendorong budaya monitoring dan evaluasi yang lebih kuat dalam sistem pendidikan, dari atas ke bawah hingga sampai ke tingkat sekolah.** Ini dapat dimulai dari pelatihan pra-jabatan, kemudian dalam jabatan, bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas, dengan menekankan pentingnya dan berbagai manfaat monitoring dan evaluasi, pertanyaan yang dapat dijawab dengan proses tersebut, dan metode, alat bantu, dan indikator yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.
- **Mengadopsi definisi lebih luas untuk pendidikan inklusif** – sesuai dengan penggunaan yang lebih diterima di dunia internasional – untuk mencakup segala rintangan terkait akses dan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, kementerian sebaiknya:
  - memastikan terdapat mekanisme untuk menjamin akses bersekolah bagi seluruh anak yang hidup dalam kemiskinan;
  - membentuk dan mendorong program pelatihan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengajaran rangkap kelas untuk sekolah kecil, perdesaan, dan terpencil;
  - menjajaki apakah perbedaan prestasi di sekolah terkait gender cukup signifikan untuk diberikan perhatian khusus;
  - mendorong literasi awal berbahasa ibu pada program pendidikan usia dini dan kelas awal sekolah dasar.
- **Memperkuat peraturan presiden dan menteri pendidikan nasional yang terkait dengan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas.** Dalam melakukan hal ini, kementerian sebaiknya:
  - menindaklanjuti dengan berbagai mekanisme yang ada untuk menjamin bahwa pemerintah kabupaten memahami dan mematuhi peraturan tersebut, dan mengalokasikan dana tambahan untuk memberikan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai demi keberhasilan pendidikan inklusif, sebagai bagian dari perencanaan anggaran daerah mereka;
  - melihat bagaimana dan kapan dapat menjamin inklusi yang lebih baik bagi anak-anak dengan gangguan fisik dan sensorik di sekolah inklusif, karena saat ini mereka lebih mudah menerima dan menangani anak-anak dengan permasalahan sosial emosional (autisme, hiperaktivitas) dan mereka yang termasuk 'lamban belajar';
  - meningkatkan jumlah jam yang dicurahkan untuk mengidentifikasi dan mengajarkan anak penyandang disabilitas dalam program pendidikan pra-jabatan guru, sehingga semua guru baru mempunyai keterampilan dasar mengenai pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan asumsi lebih banyak anak penyandang disabilitas yang akan memasuki sekolah reguler dan/atau lebih banyak sekolah akan menjadi sekolah inklusif.
- **Menilai kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan secara lebih menyeluruh, dan bertindak lebih agresif untuk menguranginya.** Studi ini mengindikasikan kurang

memadainya perhatian dari dinas pendidikan di Jawa Timur menyangkut ketidaksetaraan. Dalam dunia yang ditandai dengan semakin tingginya perbedaan terkait peluang dan pencapaian—perdesaan-perkotaan, miskin-kaya, minoritas-mayoritas, normal-penyandang disabilitas – kementerian harus memberikan lebih banyak perhatian untuk mengurangi disparitas dalam akses bersekolah dan hasil pembelajaran. Dalam hal ini, kementerian dapat:

- mempertimbangkan rekomendasi tentang inklusi di atas sebagai salah satu cara yang esensial untuk mengurangi kesenjangan;
- meninjau kembali pendekatan kompetisi, piala, dan medali yang cenderung memberikan penghargaan kepada institusi dan individu yang sudah berhasil (dan seringkali berasal dari latar belakang elit dan perkotaan) agar dapat memberikan penghargaan atas peningkatan kualitas di sekolah-sekolah yang lebih lemah, kecil, miskin, dan berada di wilayah perdesaan atau terpencil (sebagai penyimpangan positif yang sebenarnya) yang dapat melaksanakan penilaian diri yang efektif, untuk kemudian merencanakan dan melaksanakan rencana peningkatan sekolah yang ambisius.

### Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten

Sedangkan berikut ini adalah rekomendasi untuk dinas pendidikan kabupaten:

- **Memberikan dukungan yang lebih kuat dan konsisten untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memperluas praktik baik dan inovasi demi peningkatan sekolah dan hasil pembelajaran siswa yang lebih baik.** Studi ini menunjukkan bahwa meskipun praktik baik dan inovasi dapat dipromosikan secara efektif di satu kabupaten, hal ini juga bisa diabaikan dan tidak didukung di kabupaten yang lain. Variabel yang penting sepertinya adalah sikap terbuka terhadap perubahan dan fleksibilitas kepala sekolah, pengawas, dan dinas kabupaten. Tidak semua praktik dan inovasi baru terbukti bermanfaat atau dapat diadaptasi ke konteks yang berbeda, atau diperluas, tapi dinas kabupaten sebaiknya:
  - mendorong guru dan kepala sekolah untuk berkolaborasi dalam rangka mengidentifikasi permasalahan belajar mengajar dan mengembangkan serta mencobapraktik-praktik baru untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara iteratif;
  - mendorong pengawas untuk mengidentifikasi, memelihara, dan menyebarluaskan praktik ini lebih lanjut;
  - menetapkan target khusus bagi sekolah, pengawas, dan kepala sekolah terkait pengembangan praktik baik, dan menjamin akuntabilitas mereka terhadap pelaksanaan dan dampaknya;
  - mendukung penekanan pada monitoring dan evaluasi antar sekolah dan gugus, baik terhadap program reguler mereka, maupun praktik dan inovasi baru;
  - mendukung inovasi lebih komprehensif yang dilakukan di tingkat sekolah dan reformasi melampaui praktik baik dengan fokus sempit untuk memastikan dampak yang lebih besar dan keberlanjutan hasil perubahannya.
- **Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara seluruh aktor yang terlibat dalam peningkatan kualitas.** Studi ini menyebutkan sejumlah aktor, di dalam dan luar sektor pendidikan, yang dapat bekerja lebih erat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terlihat bahwa ini seringkali tidak terjadi di kabupaten yang kami kunjungi. Karena itu, banyak hal yang harus dilakukan, dan dinas kabupaten dapat:
  - mengklarifikasi peran dan memperkuat kapasitas – dan kolaborasi – LPMP, staf dinas kabupaten, pengawas, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah;
  - menjajaki kebijakan dan mekanisme yang lebih efisien dan efektif dalam menugaskan pengawas untuk mendukung sekolah dan gugus;
  - menggali cara-cara yang lebih efisien dan efektif untuk memastikan sekolah model, sekolah rujukan, sekolah inti, dan anggota gugus mereka lebih terstruktur dan terorganisir untuk mendorong peningkatan kualitas sekolah dan hasil pembelajaran siswa.

- **Memberikan lebih banyak dukungan dan pengembangan profesional kepada guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.** Ini sebaiknya mencakup:
  - memfasilitasi pembagian informasi antara guru program pendidikan anak usia dini dan kelas satu SD untuk mengidentifikasi siswa mana yang lemah dalam literasi dan numerasi, serta memberikan dukungan tambahan kepada siswa-siswa tersebut lebih awal, yaitu di kelas satu; ini dapat diperluas ke penyelenggaraan lokakarya tentang pendidikan anak usia dini, yang dihadiri para guru PAUD dan kelas awal sekolah dasar;
  - memastikan guru-guru yang ditugaskan untuk mengajar pelajaran ini di kelas awal memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya.
- **Memberikan perhatian lebih besar terhadap permasalahan ketidaksetaraan dan kesenjangan** dan karenanya memastikan bahwa fungsi penting dari staf dinas kabupaten, pengawas, gugus, dan kompetisi bukan hanya untuk meningkatkan mutu seluruh sekolah di kabupaten, tapi juga mengurangi kesenjangan antara sekolah dengan kinerja tertinggi dan terendah.
- **Terus mempromosikan dan mengembangkan pendidikan yang inklusif untuk penyandang disabilitas.** Dinas kabupaten pertama-tama dapat memastikan bahwa persyaratan yang tercantum dalam peraturan presiden dan menteri pendidikan nasional tentang sekolah inklusif dipenuhi, dan kemudian melampaui persyaratan tersebut untuk menjamin bahwa seluruh sekolah siap sedia untuk menerima anak penyandang disabilitas. Definisi kategori disabilitas yang dapat diterima sekolah harus diperluas seiring waktu, agar mengikutsertakan anak-anak dengan disabilitas sensorik dan fisik. Selain itu, sekolah juga harus diberikan sumber daya agar hal tersebut mungkin untuk dilakukan. Ini menyiratkan bahwa peran dan pendaftaran di sekolah berkebutuhan khusus akan berkurang, sehingga membebaskan staf berpengalaman untuk memberikan lebih banyak dukungan untuk para guru yang menangani anak penyandang disabilitas di kelas mereka.

## LAMPIRAN

### A. Ringkasan inovasi dan praktik baik yang diidentifikasi di Jawa Timur

Sekolah/ Institusi	Judul	Uraian inovasi/praktik baik
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Faizin, Kabupaten Sampang	Dukungan untuk anak yang lamban membaca	Banyak siswa, meskipun sebagian datang dari taman kanak-kanak, belum memiliki kemampuan pra-literasi yang memadai, dan karenanya lambat dalam belajar membaca saat mereka memulai kelas satu SD. Untuk mengatasi masalah ini, para guru menggunakan buku TK yang lebih sederhana untuk mengajarkan membaca setelah jam sekolah usai. Setiap hari siswa yang belum bisa membaca dengan baik memperoleh pengajaran tambahan. Sasarannya adalah, setelah tiga bulan, siswa-siswa tersebut dapat membaca seperti anak lain. Apabila sasaran ini belum tercapai, pengajaran dapat diperpanjang hingga enam bulan. Siswa mendapatkan bimbingan tambahan ini secara gratis.
Sekolah Dasar (SD) Ar Rahman, Kabupaten Jombang	Program pendidikan individu untuk siswa berkebutuhan khusus	Sekolah swasta ini – sekolah ‘hijau’ (sekolah yang fokus dengan keramahan lingkungannya, juga dikenal dengan sekolah adiwiyata) dengan jam sekolah sehari penuh – menerapkan aturan fleksibel (tidak ada seragam dan siswa dapat datang ke sekolah kapanpun mereka mau) dan menggunakan kurikulumnya sendiri, selain kurikulum kementerian dan Cambridge. Sejak 2005, sekolah ini telah menerima anak berkebutuhan khusus (anak autisme, hiperaktif, dan pelajar lambat). Seluruh siswa diberikan ujian psikologis di Surabaya sebelum masuk sekolah. Program pembelajaran individu (termasuk lembar kerja yang disesuaikan) disusun – dan dengan seksama dilaporkan – untuk setiap siswa berkebutuhan khusus, dan saat belajar mereka dibantu oleh guru pendamping yang terlatih (beberapa dibayar oleh orang tua) dan relawan dari pesantren setempat.
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Patihan, Kota Madiun	Pembentukan kelompok kerja siswa untuk meningkatkan manajemen lingkungan sekolah	<p>Benda-benda di sekitar digunakan untuk menghitung di kelas satu, termasuk kotak pasta gigi dan bungkus sabun. Benda-benda tersebut dipilih setiap harinya, sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Guru selalu mencoba memilih benda yang relevan dengan tema yang dibahas di hari itu – saat kami mengamati, tema hari itu adalah kebersihan diri.</p> <p>SDN Patihan juga merupakan sekolah adiwiyata mandiri. Artinya sekolah ini memiliki budaya yang berpusat pada lingkungan, dan telah berhasil membimbing sekolah lain untuk menjadi sekolah ‘hijau’. Sekolah adiwiyata mencoba mengikuti praktik baik terkait lingkungan dengan menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan prinsip Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang atau 3R (<i>Reduce, Reuse and Recycle</i>), dan mempromosikan pembuangan dan pengomposan sampah.</p> <p>Yang paling kami perhatikan, peningkatan sekolah dipertahankan dengan membentuk banyak kelompok kerja di sekolah. Contohnya kelompok kerja yang bertanggung jawab atas: kebersihan toilet; kebersihan sekolah; dan mengumpulkan dan memilah sampah di sekolah. Kelompok-kelompok ini diawasi oleh seorang guru dan anggotanya adalah siswa dari kelas empat hingga enam. Kapanpun siswa harus melakukan kegiatan untuk kelompoknya, mereka</p>

		memakai selempang, menandakan bahwa mereka adalah anggota dari kelompok kerja tersebut. Selempang ini memberikan status kepada siswa, dan mereka bangga terhadapnya. Setiap tahun, saat siswa kelas enam lulus, siswa-siswa kelas empat yang baru direkrut.
Dinas Pendidikan Kota Madiun	Mendorong praktik baik di bidang pendidikan	Dinas pendidikan kota Madiun sangat mendukung sekolah untuk mengembangkan inovasi. Sekali setahun mereka menyelenggarakan lokakarya selama tiga hari, dimana 71 sekolah dasar di kabupaten/kota tersebut harus memaparkan inovasi dari sekolah masing-masing. Ini menciptakan atmosfir inovasi di seluruh kabupaten/kota. Kota Madiun juga menyusun 'Desain Besar Pendidikan' hingga 2025, bekerja sama dengan Bappeda, dinas pendidikan kabupaten, dan konsultan eksternal. Desain besar ini memandu pengembangan semua tingkat pendidikan di Kota Madiun, dan mendukung kegiatan seperangkat pengawas yang terorganisir dengan baik, beberapa di antaranya fokus pada sekolah berkinerja rendah.
SDN Karanganyar 1, Kabupaten Ponorogo	Kemampuan membaca, menulis, dan melakukan wawancara	Seorang guru dengan latar belakang jurnalisisme menyadari bahwa meski siswa memiliki kemampuan dasar membaca, mereka tidak memiliki kemampuan terkait literasi lainnya – mereka tidak dapat menyusun pertanyaan, melakukan wawancara, menulis laporan, dan memaparkan laporan tersebut kepada khalayak. Karena itu, mulai dari kelas tiga, siswa diajarkan untuk melakukan wawancara, awalnya dengan menyusun daftar pertanyaan. Mereka kemudian berlatih dengan mewawancarai orang tua, lalu warga masyarakat setempat, lalu menulis laporan dan memaparkannya secara verbal di depan kelas. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan kemampuan menulis dan presentasi, tapi juga lebih percaya diri.
SDN Ploso, Kabupaten Pacitan	Belajar menggunakan komik	Agar siswa tidak bosan dan membuat mereka lebih memperhatikan pelajaran, guru kelas lima meminta siswa untuk menggambar komik setelah pelajaran selesai. Komik ini untuk menunjukkan – baik dalam gambar maupun teksnya – bahwa mereka memahami isi pelajaran. Strategi merangkum pelajaran dalam bentuk komik telah diterima dengan baik oleh kepala sekolah dan guru lain. Beberapa guru lain kini menerapkan strategi yang sama di kelas mereka. Siswa kelas awal menggambar komik yang lebih sederhana dibandingkan siswa di kelas yang lebih tinggi, tapi ini tetap menunjukkan bahwa siswa memahami pelajaran.
SD Islam Al Azhaar, Kabupaten Tulungagung	Pendidikan inklusif dan pembangunan karakter	Moto sekolah ini adalah 'melayani dengan hati', dan banyak anak penyandang berbagai disabilitas diterima di sekolah ini (contohnya anak autis atau hiperaktif, pelajar lambat, anak dengan sindrom Down). Sekolah ini memiliki beberapa Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi anak penyandang disabilitas, dan setiap guru pendamping bertanggung jawab atas tiga siswa. Dari 800 lebih siswa sekolah dasar ini, ada 28 anak yang menyandang disabilitas. Tersedia ruang sumber daya untuk mengadakan sesi khusus dengan anak penyandang disabilitas. Orang tua dari anak yang autis dan hiperaktif harus memberikan menu makanan khusus bagi anak-anak mereka, yang diyakini akan membantu mereka belajar lebih baik.
SD Alam Mutiara Umat,	Hari Pasar ( <i>Market day</i> )	Kegiatan <i>market day</i> dilakukan setiap semester, dan direncanakan oleh siswa di bawah pengawasan guru. Setiap kelas membuka kios di pasar dan menjual barang dan jasa sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Tema <i>market day</i> saat tim studi kami berkunjung adalah

Kabupaten Tulungagung		<p>'Indonesia'. Berbagai kelas memiliki kios untuk Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Para siswa berpakaian sesuai daerah mereka, dan menjual makanan khas daerah tersebut. Dalam kegiatan ini, siswa belajar untuk merencanakan kegiatan dan bekerja sama, dengan dukungan dari guru dan orang tua. Orang tua mempersiapkan kudapan di rumah, untuk dijual di pasar. Mereka belajar menghitung biaya bahan makanan dan harga jual. Di akhir hari, mereka menghitung apakah memperoleh untung atau rugi. Siswa yang lebih muda juga belajar tentang membeli dan menghitung uang yang mereka gunakan, dan membantu anak yang lebih tua di kios. Sekali setahun, warga yang berada di sekitar sekolah diundang ke acara <i>market day</i>, yang juga dianggap sebagai bagian dari 'pencitraan' sekolah, yang dapat menarik siswa baru.</p>
SDN Suruh Wadang 2, Kabupaten Blitar	Belajar dan mengajar rangkap kelas	<p>Di tahun 2005, sekolah ini dinilai dapat menerapkan pengajaran rangkap kelas (MGT) dengan baik. Kepala sekolah dan guru dilatih untuk menerapkan pengajaran rangkap kelas. Namun, di tahun 2017, kepala sekolahnya dipindahkan dan para guru yang dilatih telah pensiun. Hanya satu guru yang dulu dilatih yang masih mengajar di sekolah tersebut. Kepala sekolah yang sekarang belum dilatih dan belum memahami manfaat pengajaran rangkap kelas, selain tantangannya saja (kelas yang terlalu berisik). Meskipun ada cukup guru di sekolah untuk menerapkan satu guru per kelas, hanya ada lima ruang kelas yang tersedia, sehingga ruang kelas satu dan dua masih digabung. Pengamatan yang dilakukan terhadap satu kelas rangkap ini menunjukkan bahwa gurunya tidak mengerti konsep pengajaran rangkap kelas. Ketika ditanya, ia mengakui masih baru dan belum menerima pelatihan mengenai pengajaran rangkap kelas.</p>

## B. Institusi dan sekolah yang dikunjungi dan responden yang ditemui selama kunjungan

### Institusi dan sekolah yang dikunjungi

Provinsi	Institusi
Jawa Timur	Dinas Pendidikan Provinsi
	Kanwil Kementerian Agama

Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Sekolah Dasar		Institusi Lain
		Negeri	Swasta	
Kabupaten Gresik	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	--	--	--
Kabupaten Sidoarjo	Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo	--	--	--
Kabupaten Probolinggo	Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo	--	--	--
Kabupaten Pasuruan	Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan	---	--	--
Kota Batu	Dinas Pendidikan Kota Batu	--	--	--
Kota Malang	Dinas Pendidikan Kota Malang	--	--	--
Kabupaten Malang	--	--	MI Amanah	--
Kabupaten Sampang	Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang	--	SDIT Al Faizin	--
Kabupaten Sumenep	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep	SDN Pamelokan SDN Pangarangan 3 SDN Pabian 1	--	Rumah Literasi Komunitas Toremaos
Kabupaten Mojokerto	--	SDN Mojokarang	--	--
Kabupaten Jombang	--	--	SD Ar Rahman	--
Kota Madiun	Dinas Pendidikan Kota Madiun	SDN Patihan	--	--
Kabupaten Ponorogo	--	SDN Singkil SDN Karang 1	--	--
Kabupaten Pacitan	--	SDN Ploso 1	--	--
Kabupaten Tulungagung	--	--	SDI Al Azhaar SD Alam Mutiara Umat	--
Kabupaten Blitar	Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar	SDN Suruh Wadang 2	--	--
Kabupaten Kediri	--	SDN Kandangan 1	--	--

<b>16 kabupaten/kota</b>	<b>10 dinas pendidikan kabupaten/kota</b>	<b>10 sekolah dasar negeri</b>	<b>4 sekolah dasar swasta</b>	<b>2 institusi lain</b>
------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

## **Pihak yang Ditemui Selama Kunjungan ke Institusi dan Sekolah**

### **Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik – 2 Juli 2018**

2 Kepala Seksi, Dinas Pendidikan Kabupaten  
1 Kepala Pusat Sumber Daya untuk Anak Berkebutuhan Khusus  
2 Pengawas Sekolah  
1 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
1 Kepala Sekolah Dasar (SD)

### **Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur – 2 Juli 2018**

Kepala Dinas Pendidikan  
Sekretaris Dinas Pendidikan

### **Dinas Agama Provinsi Jawa Timur – 2 Juli 2018**

Kepala Divisi Pendidikan  
1 Kepala Seksi

### **Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo – 3 Juli 2018**

Sekretaris Dinas Pendidikan  
2 Kepala Seksi  
1 Pengawas Sekolah  
1 Kepala Sekolah SD  
1 Guru SD

### **Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo – 4 Juli 2018**

Kepala Dinas Pendidikan  
Sekretaris Dinas Pendidikan  
2 Kepala Divisi  
6 Kepala Seksi  
1 Kepala Subdivisi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  
2 Pengawas Sekolah  
2 Kepala Sekolah SD  
1 Guru SD  
1 Guru SMP

### **Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan – 5 Juli 2018**

Sekretaris Dinas Pendidikan  
3 Kepala Divisi  
2 Kepala Seksi  
1 Pengawas Sekolah  
1 Staf  
1 Operator

### **Dinas Pendidikan Kota Batu – 6 Juli 2018**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
1 Kepala Divisi  
12 Kepala Seksi

### **Dinas Pendidikan Kota Malang – 6 Juli 2018**

Kepala Dinas Pendidikan  
Sekretaris Dinas Pendidikan  
3 Kepala Divisi

1 Staf

**Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang – 25 Juli 2018**

Sekretaris Dinas Pendidikan

1 Kepala Seksi

1 Kepala Sekolah SD

**SDIT Al Faizin, Kabupaten Sampang – 25 Juli 2018**

Kepala Sekolah SDIT Al Faizin

6 Guru

2 Anggota Manajemen Yayasan Al Faizin

2 Pengawas Sekolah

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

3 Kepala Sekolah dari sekolah lain

Kepala Sekolah TK Al Faizin

**Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep – 26 Juli 2018**

Kepala Dinas Pendidikan

1 Kepala Divisi

**SDN Pamolokan, Kabupaten Sumenep – 26 Juli 2018**

Kepala Sekolah

12 Guru

1 Kepala Divisi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

**Rumah Literasi, Kabupaten Sumenep – 26 Juli 2018**

Manajer

Sekretaris

Bendahara

3 Koordinator (publikasi, sumber daya manusia, pengembangan potensi)

3 Staf

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

**Komunitas Toremaos, Kabupaten Sumenep – 26 Juli 2018**

Koordinator

7 Anggota (guru/staf)

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

**SDN Pangarangan 3, Kabupaten Sumenep – 27 Juli 2018**

Kepala Sekolah

7 Guru

1 Staf Administrasi

1 Pengawas Sekolah

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

1 Anggota Komite Sekolah

**SDN Pabian 1, Kabupaten Sumenep – 27 Juli 2018**

Kepala Sekolah

5 Guru

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

1 Anggota Komite Sekolah

**MI Amanah, Kabupaten Malang – 4 Juli 2018**

Kepala Sekolah  
6 Guru

**SDN Mojokarang, Kabupaten Mojokerto – 8 Juli 2018**

Kepala Sekolah  
9 Guru  
Kepala Desa  
2 Anggota Komite Sekolah  
1 Pengawas Sekolah

**SD Ar Rahman, Kabupaten Jombang – 9 Juli 2018**

Kepala Sekolah  
Ketua Yayasan  
3 Guru

**SDN Patihan, Kota Madiun – 10 Agustus 2018**

Kepala Sekolah  
16 Guru  
1 Anggota Komite Sekolah  
1 Operator  
1 Kepala Seksi, Dinas Pendidikan Kota Madiun  
1 Pengawas Sekolah

**Dinas Pendidikan Kota Madiun – 10 Agustus 2018**

Kepala Dinas Pendidikan  
1 Kepala Seksi

**SDN Singkil, Kabupaten Ponorogo – 11 Agustus 2018**

Kepala Sekolah  
1 Guru  
1 Kepala Divisi, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo  
1 Pengawas Sekolah  
1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

**SDN Karang 1, Kabupaten Ponorogo - 11 Agustus 2018**

Kepala Sekolah  
1 Guru  
1 Anggota Komite Sekolah  
1 Kepala Divisi, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo  
1 Pengawas Sekolah  
1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

**SDN Ploso 1, Kabupaten Pacitan – 13 Agustus 2018**

Kepala Sekolah  
3 Guru

**SDI Al Azhaar, Kabupaten Tulungagung – 14 Agustus 2018**

Kepala Sekolah  
Manajer Penjaminan Mutu, Yayasan Al Azhaar  
Manajer untuk Pendidikan Inklusif, Yayasan Al Azhaar  
1 Kepala Seksi, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

**SD Alam Mutiara Umat, Kabupaten Tulungagung – 14 Agustus 2018**

Kepala Sekolah

Ketua Yayasan

3 Guru

1 Psikoterapis

1 Kepala Seksi, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

**Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar – 15 Agustus 2018**

Kepala Dinas Pendidikan

2 Kepala Divisi

1 Kepala Seksi

**SDN Suruh Wadang 2, Kabupaten Blitar – 15 Agustus 2018**

Kepala Sekolah

4 Guru

1 Kepala Sekolah SD

3 Pengawas Sekolah

1 Kepala Divisi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

1 Kepala Seksi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

1 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

**SDN Kandangan 1, Kabupaten Kediri - 16 Agustus 2018**

Kepala Sekolah

1 Guru

2 Pengawas Sekolah

2 Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

9 Kepala Sekolah SD

### C. Jadwal wawancara

**[Untuk dinas kabupaten atau provinsi]  
Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Pendidikan**

Kabupaten/kotamadya \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ Waktu \_\_\_\_\_

Nama/jabatan responden \_\_\_\_\_

1. Jawa Timur tampaknya sangat kaya dalam inovasi pendidikan dan praktik yang baik, baik yang diperkenalkan oleh program seperti PRIORITAS dan CLCC dan yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing sekolah.
  - Menurut Anda, mengapa ada begitu banyak inovasi di provinsi ini?
  - Siapa / lembaga apa yang paling bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan inovasi-inovasi ini?
2. Apa peran Dinas Pendidikan Anda dalam mengidentifikasi dan memelihara inovasi dan praktik yang baik – misalnya, dengan mendorong guru dan kepala sekolah untuk mencoba sesuatu yang baru dan berbeda?
  - Apa peran unit-unit berbeda dari dinas dalam proses ini?
  - Apakah prioritas dinas masih terfokus pada infrastruktur dan akses atau lebih pada pembelajaran yang baik dan kesuksesan belajar?
  - Apakah ada unit yang hanya menangani peningkatan kualitas sekolah (mis. Tim penjamin mutu sekolah)? Bila tidak, mengapa tidak?
  - Bagaimanakah dinas dapat diubah atau diperkuat untuk mendorong lebih banyak inovasi dan praktik yang baik?
3. Apakah konteks sosial dan budaya dari kabupaten/kota ini mendorong atau menghambat inovasi – misalnya, mendorong guru dan kepala sekolah untuk mencoba berbagai hal dengan sendirinya daripada menunggu instruksi dari atas? Jika ya, bagaimana caranya?
4. Peran apa yang dilakukan lembaga / entitas berikut di kabupaten/kota ini dalam mempromosikan inovasi dan praktik yang baik untuk meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan hasil belajar anak-anak? Bagaimana mereka melakukan ini?
  - DPRD
  - Kantor bupati/walikota
  - Dinas Pendidikan
  - Kandep Agama
  - Dana asing melalui proyek bantuan (UNICEF, USAID, DFAT dsb)
  - LPMP
  - Gugus/KKG/KKKS
  - Pengawas/penilik
  - Kantor desa/kelurahan
  - Komite Sekolah
  - Lembaga non pemerintah, LSM, seperti PGRI, Lembaga Ma'arif NU, dll.
5. Ada banyak strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan hasil belajar. Manakah dari ini yang paling bermanfaat di kabupaten/kota ini dan mengapa berhasil?
  - Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
  - Gugus/KKG/KKKS
  - Lomba sekolah tingkat nasional/provinsi/kabupaten-kota/ gugus
  - Olimpiade untuk siswa (matematika, sains dsb)
  - Penghargaan untuk guru perorangan (Pemilihan Guru SD Berprestasi dari tingkat kecamatan sampai nasional)
  - Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)
  - Sekolah imbas dan sekolah inti dalam gugus

- Sekolah model binaan LPMP
  - Sekolah rujukan binaan Direktorat Pembinaan SD
  - Gerakan Literasi Sekolah; Gerakan Literasi Keluarga; dan Gerakan Literasi Masyarakat
  - Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk kesehatan dan gizi siswa
  - Pendidikan orang tua untuk memberikan dukungan kepada sekolah dan belajar anak
  - Pendidikan inklusi
6. Banyak kepala daerah mendeklarasikan / mengeluarkan perbup dan atau perda tentang berbagai hal dalam pendidikan (misalnya, Anak Berkebutuhan Khusus/ABK). Seberapa efektif / bermanfaat / penting deklarasi/perbup/perda itu menurut Anda dalam meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah ada contoh di kabupaten/kota ini?
  7. Salah satu fokus utama INOVASI dalam pekerjaannya dengan Kementerian adalah mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah dan memastikan agar mereka masuk sekolah dan belajar. Seberapa besar tantangan pada kategori anak di bawah ini yang tidak bersekolah di kabupaten/kota ini dan apa yang sedang dilakukan untuk mengembalikan mereka ke sekolah? Bagaimana? Apa hasilnya?
    - Perempuan (atau laki-laki)
    - Anak-anak miskin
    - Anak-anak dengan bahasa ibu yang digunakan di rumah bukan Bahasa Indonesia
    - Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau perbatasan (3T)
    - Anak berkebutuhan khusus
      - Apakah ada Sekolah Inklusi di kabupaten/kota Anda?
      - Bila ada, bagaimana melayani ABK?
  8. Bagaimana inovasi lokal dan praktik yang baik biasanya dibiayai? Dari sumber biaya mana?
    - APBD, Dana desa, Bantuan asing (proyek)
    - BOS/BOSDA
    - Dukungan masyarakat
  9. Seringkali sulit untuk menilai dampak dari inovasi atau praktik yang baik pada kualitas sekolah dan belajar siswa.
    - Bagaimana dampak inovasi pada sekolah dan siswa di kabupaten ini dijelaskan dan dievaluasi?
    - Apakah dampak ini diukur secara lebih kuantitatif? Misalnya. Apakah inovasi tertentu telah meningkatkan nilai prestasi? (UN, penilaian formatif, AKSI, EGRA, persentase transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase mengulang, dll.)
  10. Banyak inovasi bergantung pada kepribadian / kewenangan satu orang (misalnya kepala sekolah) dan / atau kerjasama antara guru-guru inovatif dan / atau pejabat dinas yang inovatif dan dukungan pemerintah yang kuat. Tetapi guru, kepala sekolah, dan staf dinas akan pensiun atau dipindahkan. Banyak inovasi yang telah mereka kembangkan tidak dilanjutkan setelah mereka pergi.
    - Apakah hal ini merupakan masalah di kabupaten/kota ini?
    - Apa yang telah berhasil dilakukan, atau harus dilakukan, untuk membantu memastikan bahwa inovasi dan praktik yang baik dapat dipertahankan?
  11. Banyak inovasi berhasil karena cocok dalam konteks tertentu – lingkungan sosial-budaya yang berorientasi inovasi, komunitas yang mendukung, kepala sekolah yang menginspirasi, dan guru yang termotivasi.
    - Apa yang harus dilakukan untuk mereplikasi / mengadaptasi inovasi dan praktik-praktik yang baik di sekolah dan lokasi lain?
  12. Banyak inovasi dimulai dari proyek-proyek yang didanai oleh donor. Dalam beberapa kasus, perubahan/praktik yang baik yang diperkenalkan oleh proyek-proyek ini telah dipertahankan dan dilembagakan – dan bahkan disebarkan ke sekolah lain. Di lain pihak, ada yang nyaris hilang sama sekali. Apa yang menyebabkan dua hasil berbeda ini?

---

Inovasi khusus di kabupaten/kota ini:

- Menurut Anda, apakah inovasi atau praktik yang baik yang paling menjanjikan di kabupaten/kota ini?
- Bagaimana inovasi dan praktik yang baik ini dirancang dan diimplementasikan? Apakah yang menjadi motivator utama dari kegiatan ini?

- Apa buktinya, jika ada, bahwa inovasi ini telah berdampak pada peningkatan sekolah dan hasil siswa?
- Bagaimana kebijakan dan praktik di tingkat dinas dipengaruhi oleh inovasi dan praktik yang baik ini? Perubahan apa yang telah terjadi pada kebijakan dan praktik ini?

[Untuk sekolah dan program lain]

**Pertanyaan Wawancara untuk Sekolah/Madrasah Ibtidiyah/Institusi**

Sekolah/institusi \_\_\_\_\_ Kabupaten/Kotamadya \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_ Nama/jabatan responden2 \_\_\_\_\_

1. Jawa Timur tampaknya sangat kaya dalam inovasi pendidikan dan praktik yang baik, baik yang diperkenalkan oleh program seperti PRIORITAS dan CLCC dan yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing sekolah.
  - iii. • Menurut Anda, mengapa ada begitu banyak inovasi di provinsi ini?
    - Apakah kabupaten/kota ini kaya dalam inovasi pendidikan? Ya atau tidak – kenapa?
    - Apakah konteks sosial dan budaya dari kabupaten/kota ini mendorong atau menghambat inovasi – misalnya, mendorong guru dan kepala sekolah untuk mencoba berbagai hal dengan sendirinya daripada menunggu instruksi dari atas? Jika ya, bagaimana caranya?
    - Apakah Dinas Pendidikan kabupaten ini sangat mendukung inovasi/praktik yang baik? Bila ya, bagaimana mendukungnya?
2. Peran apa yang dilakukan lembaga/entitas berikut di kabupaten/kota ini dalam mempromosikan inovasi dan praktik yang baik untuk meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan hasil belajar anak-anak? Bagaimana mereka melakukan ini?
  - Kantor bupati/wali kota
  - Dinas pendidikan
  - Kandep agama
  - Dana asing melalui proyek bantuan (UNICEF, USAID, DFAT dsb)
  - LPMP
  - Gugus/KKG/KKKS
  - Pengawas/penilik
  - Kantor desa/kelurahan
  - Komite Sekolah
  - Lembaga non pemerintah, LSM, seperti PGRI, Lembaga Ma'arif NU, dll.
  - Lainnya.....
3. Ada banyak strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan hasil belajar. Manakah dari ini yang paling bermanfaat di sekolah ini dan mengapa berhasil?
  - Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
  - Gugus/KKG/KKKS (misalnya sebagai sekolah imbas atau sekolah inti)
  - Lomba sekolah/penghargaan untuk guru tingkat nasional/provinsi/kabupaten-kota/gugus
  - Sekolah model binaan LPMP
  - Sekolah rujukan binaan Direktorat Pembinaan SD
  - Gerakan Literasi Sekolah; Gerakan Literasi Keluarga; dan Gerakan Literasi Masyarakat
  - Pendidikan orang tua untuk memberikan dukungan kepada sekolah dan belajar anak anak
  - Strategi lain . . . .
4. Apakah keberhasilan siswa-siswa Anda dalam Bahasa Indonesia dan Matematika memuaskan? Bila tidak memuaskan, mengapa?
  - iv. Apa yang dilakukan sekolah Anda untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut?
5. Salah satu fokus utama INOVASI dalam pekerjaannya dengan Kementerian adalah mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah dan memastikan agar mereka masuk sekolah dan belajar. Seberapa besar tantangan pada kategori anak di bawah ini yang tidak bersekolah di sekolah Anda dan apa yang sedang dilakukan untuk mengembalikan mereka ke sekolah? Bagaimana? Apa hasilnya?
  - Perempuan (atau laki-laki)
  - Anak-anak miskin
  - Kalau ada, anak-anak dengan bahasa ibu yang digunakan di rumah bukan Bahasa Indonesia

- Kalau ada, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau perbatasan (3T)
- Anak berkebutuhan khusus
  - Apakah sekolah ini siap untuk menerima ABK? Kalau ada, jumlahnya ABK disini berapa? Kalau tidak ada, alasannya apa?
  - Apakah ada sekolah inklusi di kabupaten/kota Anda?
  - Bila ada, bagaimana sekolah inklusi melayani ABK?

#### **APABILA SEKOLAH YANG DIKUNJUNGI ADALAH SEKOLAH INKLUSI:**

- Bagaimana sekolah ini mendapat label sebagai sekolah inklusi?
  - Dari mana ABKnya? Bagaimana mereka bisa terdaftar di sekolah Anda?
  - Bagaimana ABK dimasukkan ke dalam sekolah dan kelas?
  - Dukungan khusus (fasilitas, guru) apa yang dimiliki sekolah untuk berperan sebagai sekolah inklusi?
  - Dukungan tambahan apa yang masih diperlukan?
6. Banyak inovasi bergantung pada kepribadian/kewenangan satu orang (misalnya kepala sekolah) dan/atau kerja sama antara guru-guru inovatif dan/atau pejabat dinas yang inovatif dan dukungan pemerintah yang kuat. Tetapi guru, kepala sekolah, dan staf dinas akan pensiun atau dipindahkan. Banyak inovasi yang telah mereka kembangkan tidak dilanjutkan setelah mereka pergi.
- Apakah hal ini merupakan masalah di sekolah ini?
  - Apa yang telah berhasil dilakukan, atau harus dilakukan, untuk membantu memastikan bahwa inovasi dan praktik yang baik di sekolah ini dapat dipertahankan?

#### **UNTUK PRAKTIK DI KELAS**

1. Mengenai praktik baik di sekolah ini, yaitu \_\_\_\_\_
  - Bagaimana praktik baik ini dirancang dan diimplementasikan? Apakah yang menjadi motivator utama dari praktik ini? Dari mana ide tsb didapat?
  - Bagaimana proses/tahapan pelaksanaannya?
  - Apakah guru-guru lain, kepala sekolah dan pengawas mengetahui tentang praktik ini? Bagaimana tanggapan dan dukungan mereka?
  - Apakah paguyuban orang tua atau komite sekolah juga mengetahui tentang praktik pembelajaran yang anda lakukan? Jika iya, bagaimana tanggapan dan dukungan mereka?
2. Seringkali sulit untuk menilai dampak dari inovasi atau praktik yang baik pada kualitas sekolah dan belajar siswa.
  - Menurut Anda, bagaimana hasilnya dari praktik baik? Dampak apa yang terjadi dan sejauh mana hal tersebut dicapai? Sebagai contoh: kualitas pembelajaran, hasil belajar siswa, sistem pendukung guru, dll.
  - Apakah ada dampak khusus pada hasil literasi dan numerasi siswa?
  - Untuk memperlihatkan dampak, apa buktinya?
  - Apakah dampak praktik yang baik bisa diukur secara lebih kuantitatif? Misalnya, apakah praktik tertentu telah meningkatkan nilai prestasi? (UN, penilaian formatif, AKSI, EGRA, persentase transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase mengulang, dll.)
  - Selain dampak yang telah disebutkan tadi, apakah ada dampak lain Anda lihat dari praktik ini baik terhadap diri anda sendiri, orang lain, maupun lingkungan secara umum?
  - Apakah ada dampak yang tidak direncanakan?
3. Adakah tantangan khusus dalam menerapkan praktek baik ini? Bagaimana cara mengatasinya?
4. Bagaimana potensi keberlanjutan praktik ini di sekolah ini?
5. Sejauh mana praktik yang baik ini telah diadopsi/diadaptasi/disebarkan kepada guru lain di sekolah ini?
  - v. Ke sekolah lain?
  - vi. Di dalam gugus/KKG?
  - vii. Bagaimana replikasi/adaptasi dilakukan? Apa peran dinas, pengawas dan gugus/KKG dalam replikasi ini?
6. Bagaimana inovasi/praktik baik di sekolah ini dibiayai? Dari sumber biaya mana?

- APBD
- Dana desa
- Bantuan asing (proyek)
- BOS/BOSDA
- Dukungan masyarakat
- Lainnya....

#### **UNTUK INOVASI TINGKAT SEKOLAH:**

- Bagaimana inovasi ini dirancang dan diimplementasikan? Apakah yang menjadi motivator utama dari kegiatan ini? Dari mana ide tsb didapat?
  - Bagaimana proses/tahapan pelaksanaannya?
  - Bagaimana tanggapan dan dukungan guru-guru di sekolah dan pengawas terhadap inovasi ini?
  - Apakah paguyuban orang tua atau komite sekolah juga mengetahui tentang inovasi yang dilakukan ini di sekolah ini? Jika ya, bagaimana tanggapan mereka?
  - Adakah tantangan khusus dalam menerapkan inovasi ini? Bagaimana cara mengatasinya?
  - Sejauh mana praktik yang baik ini telah diadopsi/diadaptasi oleh sekolah lain?
  - Bagaimana replikasi/adaptasi dilakukan? Apa peran dinas, pengawas dan gugus/KKG dalam replikasi ini?
7. Seringkali sulit untuk menilai dampak dari inovasi atau praktik yang baik pada kualitas sekolah dan belajar siswa.
- Menurut Anda, bagaimana hasilnya dari inovasi ini? Dampak apa yang terjadi dan sejauh mana hal tersebut dicapai? Sebagai contoh: kualitas pembelajaran, hasil belajar siswa, sistem pendukung guru, dll.
  - Apakah ada dampak khusus pada hasil literasi dan numerasi siswa?
  - Apakah ada bukti yang menunjukkan dampak ini?
  - Apakah dampak inovasi bisa diukur secara lebih kuantitatif? Misalnya. Apakah inovasi tertentu telah meningkatkan nilai prestasi? (UN, penilaian formatif, AKSI, EGRA, persentase transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase mengulang, dll.)
  - Selain dampak yang telah disebutkan tadi, apakah ada dampak lain anda lihat dari inovasi ini baik terhadap diri anda sendiri, orang lain, maupun lingkungan secara umum?
  - Adakah tantangan khusus dalam menerapkan Inovasi ini? Bagaimana cara mengatasinya?
  - Bagaimana potensi berlanjutnya inovasi di sekolah ini?
8. Bagaimana inovasi/praktik baik di sekolah ini dibiayai? Dari sumber biaya mana?
- APBD
  - Dana desa
  - Bantuan asing (proyek)
  - BOS/BOSDA
  - Dukungan masyarakat

Lainnya....

## D. Uraian rinci praktik baik dan inovasi yang diidentifikasi untuk studi inventarisasi tahap kedua

### **Market day**

**Sekolah:** SD Alam Mutiara Umat, Kabupaten Tulungagung

#### **Tujuan:**

Untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan, kepemimpinan, matematika, dan bahasa, dengan fokus pada:

- pembangunan karakter (kejujuran, kepercayaan diri, kesopanan)
- pelatihan manajemen (kerja tim, kerja sama, pembagian tugas, implementasi rencana)
- penerapan praktik dari prinsip-prinsip matematika

#### **Uraian kegiatan:**

Ide ini berasal dari moto sekolah – ‘meningkatkan potensi dan prestasi siswa’ – untuk mencari cara membuat belajar lebih menyenangkan. Ini menghasilkan pengembangan acara *market day* yang diadakan dua kali setahun, dengan tema yang berbeda-beda. Satu *market day* terbatas hanya untuk komunitas sekolah, dan yang lain melibatkan orang tua dan masyarakat yang berada di sekeliling sekolah. Perencanaan kegiatan dilakukan oleh tim yang berisi siswa kelas tiga hingga enam, dan di bawah pengawasan guru. Tema untuk acara *market day* pada Agustus 2018 adalah Indonesia. Para siswa mempersiapkan kios yang menjual barang-barang dari Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa dan Indonesia Timur. Makanan dipersiapkan oleh siswa dan orang tua di rumah. Mereka harus menghitung harga bahan makanan dan menentukan harga jualnya. Beberapa siswa membuat kerajinan tangan, seperti bros, gantungan kunci, pembatas buku, dan lain-lain. Satu kios di wilayah Jawa tidak menjual barang apapun. Mereka malah memajang buku-buku cerita yang dapat disewa oleh siswa. Ada juga ‘pesulap’ yang dapat memprediksi usia seseorang. Terkadang mereka mengadakan permainan, dan siswa dapat bermain dengan membayar sejumlah uang.

Beberapa hari sebelum acara, sekelompok siswa menawarkan barang untuk dijual melalui iklan yang diletakkan di beberapa titik di sekolah agar dilihat semua orang.

Siswa kelas satu dan dua berpartisipasi sebagai pengunjung pasar dan pembeli, sehingga harus memahami nilai uang dan belajar menghitung kembalian yang mereka terima saat membeli sesuatu. Mereka terkadang juga membantu anak yang lebih tua untuk menjaga meja berisi barang yang dijual. Anak berkebutuhan khusus juga diberikan peran di acara ini, sesuai dengan kemampuan mereka.

Di penghujung hari, barang yang tidak terjual dibagikan kepada para tamu. Siswa yang lebih tua membuat daftar dan tabel yang mencantumkan barang-barang yang ditawarkan, dan berapa yang terjual. Lalu mereka menghitung berapa uang yang masuk dan apakah mereka untung atau rugi di hari itu. Setelah melapor kepada guru, daftar dan tabel tersebut akan dibahas di kelas enam. Ini menjadi sumber daya pembelajaran yang baik bagi para siswa.

#### **Cakupan diseminasi:**

Konsep *market day* belum disebarluaskan ke sekolah lain. Sebagai sekolah swasta, SD ini menggunakannya sebagai bagian dari ‘citra’ sekolah, dan mereka mempromosikan kegiatan ini pada saat penerimaan siswa baru.

#### **Kesimpulan:**

*Market day* adalah konsep yang sangat bagus untuk menerapkan berbagai mata pelajaran, dan melibatkan seluruh siswa dan guru di sekolah. Kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan acara, dengan tujuan khusus untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan dan manajemen di antara siswa. Anak-anak juga membentuk ikatan dengan orang tua mereka selama kegiatan

ini. Biaya produksi barang menentukan harganya, dan untung rugi dihitung di penghujung hari, sehingga siswa bukan hanya memperoleh kemampuan matematika, tapi juga memahami prinsip untung rugi dalam kegiatan ekonomi. Karena itu *market day* merupakan pengalaman yang kaya bagi para siswa.

SD Alam Mutiara Umat juga merupakan sekolah adiwiyata, dan karena itu memfokuskan kegiatan belajar mengajarnya mengenai lingkungan. Di lapangan sekolah terdapat pohon-pohon besar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sekolah ini juga memiliki ruang kelas di luar yang digunakan selama belajar.

Sekolah ini, meskipun tidak dilabeli sebagai sekolah inklusif oleh dinas kabupaten, telah memasukkan 13 siswa (dari total 160 siswa) berkebutuhan khusus. Walaupun tidak ada guru pendamping untuk membantu siswa-siswa tersebut, para orang tua ikut membantu mereka di kelas dan sekolah memiliki terapis yang telah mendapatkan pelatihan di Kanada, yang memberikan pelatihan ke setiap siswa ini, tergantung dari kebutuhan mereka. Terapis ini menggunakan ruang sumber daya yang berisi peralatan latihan dan mainan khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

## **Pengajaran rangkap kelas**

**Sekolah:** SDN Suruh Wadang 2, Kabupaten Blitar

### **Tujuan:**

Untuk melaksanakan pengajaran rangkap kelas di sekolah kecil

### **Uraian kegiatan:**

Sebelum pengajaran rangkap kelas diperkenalkan di Blitar, dinas kabupaten memilih sepuluh sekolah awal berdasarkan hasil analisis kualitas sekolah dan pengetahuan lokal, dan melaksanakan pelatihan selama tiga hari dalam bidang pembelajaran aktif di sekolah (dikenal dengan PAKEM – Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Pelatihan PAKEM ini merupakan kegiatan diseminasi, yang didanai kabupaten, menggunakan PRIORITAS modul 1, dengan fasilitator dibayarkan oleh PRIORITAS. Empat sekolah dipilih dari sepuluh untuk percontohan rangkap kelas. Pelatihan lanjutan selama tiga hari mengenai pengajaran rangkap kelas kemudian diberikan kepada empat sekolah tersebut. Pelatihan ini didesain dan diberikan oleh konsultan independen yang direkomendasikan oleh PRIORITAS (Pak Suyitno, yang sebelumnya bekerja dengan MBE). Pelatihan ini ditanggung penuh oleh kabupaten. Lima fasilitator kabupaten yang sebelumnya dilatih PRIORITAS, secara bersamaan dilatih dalam teknik rangkap kelas dan setelah itu memberikan pendampingan ke sekolah-sekolah.

SDN Suruh Wadang merupakan sekolah kecil, yang memiliki 45 siswa di tahun 2015 dan 57 siswa di 2018. Sekolah ini dipilih sebagai satu dari empat sekolah yang melaksanakan pengajaran rangkap kelas, dan kepala sekolah serta guru-gurunya sudah dilatih untuk menerapkan pengajaran rangkap kelas. Saat kami berkunjung pada 2018, kepala sekolah yang dilatih tersebut sudah dipindahkan ke sekolah lain. Dari empat guru yang dilatih, hanya tersisa satu yang masih mengajar, sementara yang lain telah pensiun. Satu-satunya rangkap kelas tersisa yang kami amati terdiri dari siswa kelas satu dan dua. Mereka duduk dalam kelompok terpisah dan gurunya berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ia mengajarkan Bahasa Indonesia ke satu kelompok dan matematika ke kelompok lain. Ketika ditanya, ia mengatakan belum pernah dilatih untuk menerapkan pengajaran rangkap kelas. Kepala sekolah yang baru mengindikasikan bahwa ketika tiba di sekolah, ia melakukan asesmen terkait kelebihan dan kekurangan pengajaran rangkap kelas, dan satu-satunya kesimpulan yang ia dapatkan adalah teknik ini terlalu berisik dan membuat anak-anak sulit belajar. Karena itu, ia perlahan-lahan menghentikan pengajaran rangkap kelas, hanya menyisakannya untuk kelas satu dan dua, karena sekolah ini hanya memiliki lima ruang kelas.

### **Kesimpulan:**

Kepala sekolah yang baru belum pernah dilatih untuk melaksanakan pengajaran rangkap kelas, dan belum memahami konsep dibaliknya. Para guru yang baru juga tidak mengerti bahwa mereka perlu melakukan analisis kurikulum, baru kemudian menyusun rencana pembelajaran khusus untuk melaksanakan pengajaran rangkap kelas.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa kabupaten mendukung pengajaran rangkap kelas dan telah membiayai pelatihan dan pelaksanaan pengajaran rangkap kelas, dengan dukungan dari PRIORITAS. Setelah proyek PRIORITAS berakhir, tidak ada lagi dana yang tersedia untuk terus memberikan pendampingan bagi guru-guru pengajaran rangkap kelas di sekolah-sekolah. Rencananya sekarang adalah memberikan pendanaan melalui APBD di tahun 2019 untuk mencoba merevitalisasi pengajaran rangkap kelas di kabupaten ini.

Anggota tim kami menemukan situasi yang serupa di Batu, dimana beberapa sekolah yang dulu menggunakan pengajaran rangkap kelas, kini sudah meninggalkannya. Karena masih banyak sekolah kecil di Indonesia, dan banyak diantaranya tidak memiliki jumlah guru yang memadai, Direktorat Pengembangan Sekolah Dasar di Kemendikbud seharusnya meninjau kembali pelaksanaan pengajaran rangkap kelas yang ada dan mengeluarkan kebijakan dan pedoman baru untuk pengembangannya lebih jauh.

## **Peran kelompok kerja siswa dalam meningkatkan manajemen sekolah**

**Sekolah:** SDN Patihan, Kota Madiun

### **Tujuan:**

Untuk meningkatkan manajemen sekolah dan mendukung budaya kesadaran lingkungan di sekolah, kelompok kerja yang dikelola siswa telah dibentuk untuk melakukan sejumlah kegiatan dan program sekolah.

### **Uraian kegiatan:**

SDN Patihan adalah sekolah adiwiyata mandiri. Ini berarti sekolah memiliki budaya dan praktik kesadaran lingkungan yang kuat, dan telah berhasil membimbing sekolah lain untuk menjadi sekolah hijau. Sekolah hijau dipilih oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan mereka diharuskan memiliki program belajar mengajar berbasis lingkungan. Budaya SDN Patihan dalam hal ditunjukkan antara lain melalui prinsip pemandunya, yakni SEKAM:

- **Sampah** – sekolah yang bersih, dimana sampah dipilah untuk digunakan kembali atau didaur ulang
- **Energi** – mengurangi penggunaan sumber energi
- **Keanekaragaman hayati** – mendorong keanekaragaman hayati
- **Air** – air bersih
- **Makanan** – makanan sehat yang diberikan di kantin sekolah

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan di sekolah dan untuk mendukung pengelolaan sekolah yang lebih baik, beberapa kelompok kerja (Pokja) telah dibentuk; contohnya Pokja MCK – Mandi, Cuci, Kakus – (untuk menjaga kebersihan toilet), Pokja Hamparan (untuk menjaga lapangan sekolah yang digunakan untuk olahraga, bermain, dan upacara agar tetap bersih dan siap digunakan), Pokja Sampah (untuk memilah sampah untuk dijadikan kompos, plastik, kertas, dan lainnya), Pokja Perpustakaan (untuk merawat perpustakaan), Pokja Mushola (untuk merawat mushola), dan Pokja Kantin (untuk menjaga kebersihan kantin). Terdapat juga Pokja untuk rumah kaca sekolah, pembuangan sampah, 3R (mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang), kurikulum, dan taman obat. Selain melakukan kegiatan sebagai anggota kelompok, siswa juga diharapkan dapat menjelaskan kegiatan sekolah kepada pengunjung yang datang ke sekolah.

Siswa dari kelas empat sampai enam dipilih untuk menjadi anggota kelompok kerja, sesuai dengan minat mereka. Kapanpun siswa melakukan kegiatan untuk kelompoknya, mereka memakai selempang, menandakan bahwa mereka adalah anggota dari kelompok kerja tersebut. Selempang ini memberikan status khusus kepada siswa, dan mereka bangga terhadapnya. Setiap tahun, siswa kelas enam lulus dan siswa-siswa kelas empat yang baru direkrut untuk menjadi anggota Pokja.

### **Cakupan diseminasi:**

Diseminasi telah dilakukan ke sepuluh sekolah dasar di gugus SDN Patihan. Sekolah-sekolah ini memiliki forum untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman, yang disebut dengan FORADIMA (Forum Komunikasi Adiwiyata Mangunharjo).

Diseminasi juga dilakukan ke sekolah mitra di Papua. Kepala sekolah dan guru dari sekolah tersebut pergi ke SDN Patihan untuk melakukan studi banding, dan terkesan dengan yang dilakukan SDN Patihan, sehingga berencana untuk menerapkan program serupa di sekolah mereka.

### **Kesimpulan:**

Pembentukan kelompok kerja merupakan praktik baik untuk mendukung pengelolaan sekolah dan melanjutkan program-program yang bermanfaat di sekolah, dimana banyak diantaranya berkaitan dengan status sekolah sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Kelompok kerja ini juga mengembangkan rasa tanggung jawab siswa dan mendorong kolaborasi antara guru dan siswa. Selama kelompok kerja ini berlanjut di sekolah, bahkan jika kepala sekolahnya dipindahkan dan/atau guru pensiun, program-program sekolah akan dapat dilanjutkan. Ini juga menjadi mekanisme yang baik untuk menjajaki pengembangan praktik baik dan

inovasi lain di sekolah tersebut. Ide untuk membentuk berbagai kelompok kerja yang melibatkan siswa dapat dengan mudah disebarluaskan ke sekolah lain, bukan hanya ke sekolah hijau.

## Literasi sekolah

**Sekolah:** SDIT Al Faizin, Kabupaten Sampang

### Tujuan:

Siswa diharuskan dapat membaca di kelas awal sekolah dasar. Tapi banyak siswa di kelas satu, terutama yang sebelumnya tidak mengikuti PAUD, belum memiliki kemampuan pra-literasi yang dibutuhkan untuk dapat membaca. Selain itu, banyak siswa di kelas dua sampai empat belum dapat membaca dengan lancar. Strategi belajar mengajar yang dikembangkan di sekolah ini digunakan untuk mendorong munculnya kebiasaan membaca di antara siswa, dan terutama untuk membantu pelajar lambat yang masih tidak bisa membaca di kelas-kelas awal.

### Uraian kegiatan:

Di awal tahun ajaran, guru kelas satu menguji apakah siswanya telah menguasai kemampuan pra-literasi, dan melakukan pemetaan terhadap kemampuan membaca mereka. Pada tahun ajaran 2018, ada 14 siswa yang tidak bisa membaca.

Berdasarkan pemetaan ini, dan untuk membantu siswa yang belum bisa membaca, sekolah memberikan sesi pelajaran setelah jam sekolah, selama satu jam, tiga hari seminggu. Ada empat guru yang mengajarkan membaca kepada siswa. Satu guru menangani dua hingga tiga siswa. Sasarannya adalah setelah tiga bulan, seluruh siswa dapat membaca cukup baik untuk mengikuti pelajaran di kelas 1. Para guru menggunakan buku 'Anak Islam Suka Membaca' (1–5) yang awalnya ditulis untuk anak-anak taman kanak-kanak (pra-sekolah) dan diberikan kepada sekolah untuk tujuan tersebut oleh yayasan sponsor. Apabila siswa adalah pelajar lambat, pelajaran ini dapat diperpanjang hingga enam bulan. Pelajaran tambahan ini diberikan secara gratis.

Buku bacaan berjenjang dari USAID PRIORITAS juga digunakan untuk membaca setiap hari sebelum pelajaran dimulai agar menambah minat siswa untuk membaca.

### Cakupan diseminasi:

Strategi untuk mengajarkan membaca kepada siswa kelas satu ini telah didiseminasikan melalui kelompok kerja guru dan sekarang sedang dilaksanakan oleh dua sekolah dasar yang berdekatan dengan sekolah ini. Strategi ini juga telah disebarkan ke kecamatan lain selama pelatihan tentang kurikulum 2013.

### Kesimpulan:

Ini adalah praktik baik karena terdapat identifikasi jelas tentang siswa-siswa yang tertinggal atau lambat membaca, materi yang tepat untuk kemampuan dan kebutuhan mereka, pengajaran untuk masing-masing siswa dan sasaran yang ditetapkan (tiga atau enam bulan) agar siswa tersebut mampu membaca di tingkat kelas satu. Kegiatan ini dapat dengan mudah diduplikasi di sekolah lain yang memiliki siswa kelas satu yang belum dapat membaca. Selain itu, penggunaan bacaan berjenjang di awal setiap hari sekolah menjadi metode yang bermanfaat untuk mendorong kebiasaan membaca yang lebih kuat.

## **Belajar dengan komik**

**Sekolah:** SDN 1 Ploso 1, Kabupaten Pacitan

### **Tujuan:**

Kegiatan ini membantu siswa lebih memahami dan belajar melalui proses yang menyenangkan. Menggunakan komik, siswa yang lamban belajar menjadi lebih tertarik dengan sekolah, dapat belajar lebih mudah, dan mampu menjelaskan yang telah mereka pelajari dengan membuat komik mereka sendiri.

### **Uraian kegiatan:**

Seorang guru kelas lima mengembangkan ide menggunakan komik ini di akhir sesi belajar agar siswanya dapat lebih memahami apa yang telah mereka pelajari. Dalam kegiatan ini, guru pertama-tama menjelaskan ke siswa tentang komik dan bagaimana menggunakannya untuk belajar. Mata pelajaran yang dengan mudah diubah menjadi komik adalah sains, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan kesenian. Tidak semua siswa bisa menggambar dan menuliskan teks, jadi terkadang para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan tugas ini. Setelah guru menjelaskan isi pelajaran, siswa diminta untuk menggambar komik tentang pelajaran tersebut. Ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap pelajaran, dan di saat yang sama membuat guru mengetahui apabila mereka belum memahami betul isi pelajaran. Para siswa bersemangat ketika diberi tugas menggambar komik di akhir pelajaran. Jika belum selesai di kelas, mereka melanjutkan di rumah.

Strategi merangkum pelajaran dalam komik telah disambut baik oleh kepala sekolah dan guru lain di sekolah. Beberapa guru kini juga menerapkan strategi ini untuk kelas mereka. Komik-komik yang digambar oleh siswa di kelas awal terlihat lebih sederhana, tapi tetap menunjukkan bahwa para siswa memahami pelajaran.

### **Cakupan diseminasi:**

Strategi ini telah didiseminasikan dan digunakan oleh guru lain di sekolah. Kepala sekolah menyebutkan bahwa strategi menggunakan komik belum disetujui oleh pengawas dan dinas kabupaten, sehingga tidak dapat didiseminasikan di rapat kelompok kerja guru.

### **Kesimpulan:**

Strategi siswa menggambar komik untuk menunjukkan mereka memahami pelajaran ini mendorong siswa untuk memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran, dan kemudian memperdalam topik tersebut dengan memperkaya gambar mereka, dengan menambahkan tulisan atau bahkan konteks. Selama melakukan tugas ini, para siswa meningkatkan pemahaman serta kemampuan menggambar serta menulis, dan mereka tampak senang belajar melalui kegiatan ini. Menampilkan komik yang telah mereka gambar juga meningkatkan kepercayaan diri mereka.

## **Kemampuan wawancara, menulis, dan presentasi**

**Sekolah:** SDN Karang 1, Kabupaten Ponorogo

### **Tujuan:**

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat sejumlah kemampuan siswa, termasuk bukan hanya membaca dan menulis sehari-hari, tapi juga menyusun pertanyaan, melakukan wawancara, menulis laporan, dan memaparkannya di depan kelas. Karena itu, pendekatan ini menggunakan teknik literasi untuk riset dan jurnalisme.

### **Uraian kegiatan:**

Guru yang menciptakan kegiatan ini mempunyai latar belakang jurnalisme, dan tengah melatih siswa kelas tiga untuk bisa melakukan wawancara. Ia memulai dengan menunjukkan gambar di layar LCD, dan meletakkan kartu berisi tanda tanya di meja: siapa, kapan, apa, mengapa, yang mana, dimana, dan bagaimana. Siswa bergiliran untuk mengarang pertanyaan dengan kata tanya sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Latihan kedua adalah menulis paragraf singkat yang akan dibaca oleh masing-masing siswa. Mereka kemudian menuliskan pertanyaan tentang liputan atau kisah tersebut, disertai jawabannya. Lembar jawaban kemudian dikumpulkan oleh ketua kelas.

Di kelas empat, para siswa diajarkan untuk menyusun pertanyaan untuk mewawancarai orang tua mereka. Wawancara ini dilakukan di rumah dan harus direkam. Video ini kemudian dikirim ke guru sebagai laporan latihan. Siswa juga harus menuliskan ringkasan singkat dari wawancara, dan memaparkannya di depan kelas.

Siswa kelas lima menyusun seperangkat pertanyaan lain untuk mewawancarai pengusaha dan petani lokal, misalnya pembuat tempe, petani padi, pemilik toko, dan seterusnya. Para siswa bekerja dalam kelompok beranggotakan empat orang untuk melakukan wawancara. Rekaman video dan foto menjadi bukti bahwa kelompok yang bersangkutan benar sudah melakukan wawancara. Setelah wawancara, video tersebut diperlihatkan di kelas agar dilihat seluruh siswa. Setelah itu, siswa menuliskan laporan singkat tentang yang mereka pelajari dari wawancara, dan menyerahkannya ke guru. Latihan akhirnya adalah memaparkan temuan mereka di depan kelas.

Kegiatan terkait lainnya adalah Buletin ESKAR yang disusun oleh guru dan siswa yang menjadi anggota tim 'Wartawan Cilik'. Buletin ini berisi artikel yang ditulis oleh guru dan siswa, dan juga digunakan untuk mempromosikan sekolah.

### **Cakupan diseminasi:**

Kegiatan ini telah ditampilkan dalam rapat kelompok kerja guru dan di lokakarya tentang kurikulum 2013, tapi sekolah lain belum mengadopsinya.

### **Kesimpulan:**

Selain memperkuat kemampuan membaca, kegiatan siswa dalam melakukan wawancara, menulis laporan, dan membuat presentasi membuat mereka lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang lain dan berbicara di depan publik. Latihan ini juga mempererat ikatan dengan keluarga mereka dan memperkuat pengetahuan mereka tentang masyarakat setempat. Kemampuan penulisan laporan mereka pun meningkat selama latihan. Lebih jauh lagi, keterampilan yang diperoleh siswa dari kegiatan ini akan menjadi vital ketika mereka naik ke sekolah menengah, kuliah, dan universitas.

## **Program pendidikan individu untuk anak berkebutuhan khusus**

**Sekolah:** SD Ar Rahman, Kabupaten Jombang

### **Tujuan:**

Tujuan program ini adalah untuk memberikan pendidikan individual bagi anak berkebutuhan khusus (anak-anak autis dan hiperaktif serta lamban belajar) dalam atmosfer yang ramah anak dan lingkungan.

### **Uraian kegiatan:**

SD Ar Rahman adalah sekolah swasta kecil dengan 73 siswa, dan dari jumlah tersebut, 14 merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sekolah ini telah menerima anak berkebutuhan khusus sejak 2005. Seluruh siswa baru dites secara profesional di Surabaya untuk memperoleh diagnosis tentang disabilitas mereka. Sekolah memiliki profil rinci untuk setiap anak berkebutuhan khusus, yang kemudian dihubungkan ke matriks perencanaan bersekolah dan ke program pembelajaran individual. Semua siswa diperlakukan sama di kelas, tanpa membedakan antara siswa yang berkebutuhan khusus dan yang tidak. Meskipun demikian, tugas yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus terkadang sedikit berbeda.

Ada dua guru pendamping khusus yang dipekerjakan oleh sekolah, tiga relawan dari sekolah pesantren terdekat, dan tiga guru pendamping yang khusus disediakan oleh orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dalam setiap pelajaran, meski seluruh anak mengikuti kurikulum yang sama, ada lembar kerja yang lebih mudah atau telah disesuaikan bagi anak berkebutuhan khusus. Lima belas menit sebelum akhir pelajaran, anak berkebutuhan khusus dikumpulkan untuk mendapatkan pelajaran tambahan tentang isi pelajaran. Ada buku penghubung khusus untuk anak-anak tersebut, dimana guru melaporkan kepada orang tua tentang kegiatan sehari-hari anak-anak. Orang tua juga mengisi formulir untuk memberitahukan guru tentang kegiatan anak di rumah.

SD Ar Rahman menerapkan konsep sekolah sehari penuh selama lima hari seminggu, artinya hari sekolah lebih lama dari biasanya. Siswa mendapatkan makan siang di sekolah setiap harinya. Meskipun secara fisik kecil dan hampir tidak memiliki ruangan bermain, sekolah ini merupakan sekolah ramah lingkungan. Dinding ruang kelas juga diberi lubang berbentuk lingkaran-lingkaran besar untuk memberikan atmosfer lebih terbuka untuk anak berkebutuhan khusus yang terganggu dengan tempat tertutup. Ketua Yayasan juga secara berkala menggunakan jasa pijat, dengan berfokus pada syaraf-syaraf tertentu, agar dapat sedikit meringankan permasalahan fisik dan lainnya yang diharapkan anak berkebutuhan khusus.

Aturan di sekolah ini tidak ketat, jadi siswa boleh datang terlambat tanpa dihukum, dan mereka tidak memakai seragam ke sekolah. Sekolah ini menggunakan pendekatan 'keluarga besar' di sekolah, sehingga siswa tidak merasa terisolasi atau malu. Siswa yang tidak berkebutuhan khusus bekerja sama dengan temannya yang berkebutuhan khusus di kelas, dan tidak melakukan perundungan, justru menunjukkan empati terhadap mereka. Beberapa anak berkebutuhan khusus di sekolah ini merupakan pindahan dari sekolah negeri, dimana mereka sering dirundung oleh anak lain.

### **Cakupan diseminasi:**

Program pendidikan individual dan karakteristik sekolah belum disebarluaskan ke sekolah lain, meskipun SD Ar Rahman adalah anggota gugus. Ini sebagian karena jika dibandingkan dengan sekolah lain, sekolah ini termasuk mahal, dengan biaya masuk dan tahunan tinggi, begitu pula dengan biaya pelayanan khusus, seperti ujian pra-masuk sekolah di Surabaya.

### **Kesimpulan:**

Meski terdapat pendekatan inovatif terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, dinas kabupaten belum memberikan label sekolah inklusif kepada SD Ar Rahman. Salah satu alasannya karena dinas harus memberikan anggaran untuk sekolah tersebut. Sekolah ini sendiri lebih suka tetap independen dari peraturan dinas pendidikan. Meskipun biaya yang dibutuhkan untuk bersekolah disini dapat mempersulit

anak berkebutuhan khusus dari keluarga miskin untuk bersekolah, layanan yang kepada anak-anak tersebut yang sudah masuk termasuk inovatif dan sepertinya berhasil.

## **Pendidikan inklusif dan pendidikan pembangunan karakter**

**Sekolah:** SD Al Azhaar, Kabupaten Tulungagung

### **Tujuan:**

Tujuan utama dari lembaga pendidikan besar ini adalah membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjadi mandiri, mengembangkan karakter mereka, dan mewujudkan potensi terbesar mereka.

### **Uraian kegiatan:**

Yayasan Al Azhaar mempunyai berbagai jenis sekolah: pra-sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK, contohnya di bagian farmasi (PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Farmasi). Di tahun 2012, SD Al Azhaar menyatakan dirinya sebagai sekolah inklusif. Motonya adalah “melayani dengan hati”. Mereka tidak hanya menerima anak autis, tapi juga pelajar lambat, anak hiperaktif, tuna grahita, dan penyandang sindrom Down. Saat ini mereka belum menerima siswa dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, atau anak dengan disabilitas fisik, karena tidak memiliki guru pendamping dan bantuan dukungan yang mereka butuhkan.

Sekolah meyakini bahwa anak autis dapat disembuhkan, atau setidaknya gejalanya dapat dikurangi, dengan menggunakan menu makanan yang ketat (pendekatan yang belum diverifikasi secara pasti dalam literatur ilmiah). Anak hiperaktif juga dapat diberikan diet khusus. Karena Al Azhaar adalah sekolah sehari penuh, makan siang disediakan bagi para siswa, sehingga mereka dapat menyediakan makanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus tertentu.

Sekolah memiliki beberapa Guru Pendamping Khusus (GPK), dengan satu GPK bertanggung jawab atas tiga anak berkebutuhan khusus. Dari 800 lebih siswa sekolah dasar, 28 di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus, jadi setiap kelas SD yang berisi 25-28 siswa memiliki sekitar tiga anak berkebutuhan khusus dan satu GPK. Sekolah juga memiliki ruang sumber daya, yang digunakan baik untuk mengadakan pelajaran tambahan bagi anak berkebutuhan khusus, maupun sebagai tempat dimana anak berkebutuhan khusus yang mengganggu di kelas dapat menemukan lingkungan yang tenang.

Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut mengikuti ujian sekolah dan diberikan sertifikat dari sekolah saat mereka lulus. Sebagian mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan diberikan sertifikat nasional seperti siswa lain.

### **Cakupan diseminasi:**

Kegiatan dari Yayasan Al Azhaar dan SD Al Azhaar telah dibagikan dalam gugus, tapi pendekatan sekolah secara keseluruhan sulit dialihkan ke sekolah lain yang memiliki lebih sedikit sumber daya manusia dan finansial. Guru-guru berkomunikasi erat dengan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang berada tidak jauh dari sekolah ini, sehingga mereka bisa berbagi pengalaman dan saling belajar.

### **Kesimpulan:**

Dinas kabupaten tidak memberi label sekolah inklusif kepada SD Al Azhaar, yang berarti sekolah ini tidak mendapatkan dana tambahan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus – sama seperti sekolah swasta lain yang menerima anak berkebutuhan khusus. Dari pengamatan di lapangan, sekolah swasta lebih serius dalam menerima anak-anak ini, dan lebih fleksibel dalam hal biaya dan peraturan sekolah. Sekolah negeri harus dengan tegas mengikuti peraturan yang dikeluarkan Kemendikbud terkait sekolah inklusif. Meskipun seluruh program yang diterapkan oleh SD Al Azhaar mungkin sulit diadopsi di sekolah lain, banyak dari masing-masing komponen yang menyusun pendekatan tersebut dapat lebih luas disebarluaskan.

## **Mempromosikan praktik baik di bidang pendidikan di Kota Madiun**

**Institusi:** Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Madiun

### **Tujuan:**

Tujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Madiun adalah: menjajaki dan mempromosikan inovasi dan keunggulan di setiap sekolah yang berada di kabupaten/kota Madiun; mendiseminasikan praktik baik dari dan ke seluruh sekolah di kabupaten/kota Madiun; meningkatkan hasil pendidikan para siswa di kota Madiun; dan menciptakan 'citra' yang tepat bagi masing-masing sekolah.

### **Uraian kegiatan:**

Banyak sekolah telah mengembangkan inovasi dan praktik baik, tapi seringkali hal ini tidak diketahui sekolah lain dan masyarakat luas, serta tidak didorong oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan pengawasnya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kota Madiun telah mengembangkan 'Desain besar untuk pendidikan', yang akan berlanjut hingga tahun 2025. Dokumen strategi desain besar ini digunakan sebagai panduan dalam menyusun kegiatan tahunan yang akan didanai dari APBD. Desain besar ini disusun oleh Bappeda dan dinas kabupaten/kota, dengan bantuan dari perusahaan konsultansi. Dinas-dinas dari sektor lain juga terlibat dalam proses penyusunannya. Karena desain besar ini akan dijadikan acuan secara konsisten di segala perencanaan dan pemrograman dinas di masa mendatang, hal ini akan mendorong keberlanjutan inovasi dan praktik baik, bahkan jika personil dinas kabupaten/kota dan sekolah berganti.

Dalam berbagi inovasi dan praktik baik antar sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota menyelenggarakan lokakarya tahunan selama tiga hari bagi seluruh kepala sekolah dasar. Di lokakarya ini, mereka melaporkan inovasi dan praktik baik yang dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Sebagai tindak lanjut, kepala-kepala sekolah ini mengunjungi sekolah lain dengan inovasi dan praktik baik yang terbaik untuk melakukan studi banding. Lokakarya ini memicu sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan persaingan positif antar sekolah. Selain itu, pengawas sekolah bertemu setiap Senin untuk membahas rencana kerja mereka selama satu minggu ke depan, dan setiap pengawas mengunjungi satu sekolah setiap harinya dan melihat aspek administrasi dan kualitas sekolah, serta terus mendorong dan menyebarkan praktik baik. Beberapa di antaranya memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang berprestasi rendah. Inovasi yang sukses membantu memberikan 'pencitraan' pada sekolah, dengan menampilkan keunggulan mereka di bidang pendidikan tertentu. Wali Kota Madiun juga berkomitmen untuk mendukung inovasi, dan setiap kepala sektor di kabupaten/kota harus melaporkan tentang adanya inovasi yang dikembangkan dinas sektor tersebut pada rapat mingguan.

### **Cakupan diseminasi:**

Lokakarya tahunan membantu untuk mendiseminasi inovasi dan praktik baik ke sekolah-sekolah lain dan diikuti dengan kunjungan ke sekolah dengan kegiatan yang paling menjanjikan. Berbagai tindakan kabupaten/kota untuk mendorong inovasi juga telah disebarluaskan ke kabupaten/kota lain melalui rapat bulanan yang baru-baru ini diadakan, yang menghadirkan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur.

### **Kesimpulan:**

'Desain besar untuk pendidikan' mewakili pendekatan terperinci dan strategis untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya di kota Madiun. Lokakarya tahunan yang diselenggarakan oleh pihak kota Madiun mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan inovasi dan praktik baik, dan dalam beberapa kasus, kepala sekolah dan guru dari beberapa sekolah (di gugus yang sama) berkumpul untuk mengembangkan dan membahas inovasi atau

praktik baik dan melaksanakannya di sekolah mereka. Pendekatan jangka panjang dan menyeluruh terhadap perencanaan pendidikan dan promosi inovasi dapat diduplikasi di kabupaten/kota lain.

#### **E. Praktik baik dari dinas pendidikan kabupaten lain**

##### **Inovasi/praktik baik di bidang pendidikan di Kabupaten Probolinggo**

**Institusi:** Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

**Tujuan:**

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mempunyai sasaran khusus, yaitu secara aktif mendukung inovasi dan praktik baik di sekolah-sekolah.

**Uraian kegiatan:**

Banyak faktor yang mempengaruhi inovasi dan praktik baik di sekolah-sekolah yang berada di kabupten Probolinggo – baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam sistem pendidikan dan mencakup penekanan dari kementerian pusat dan dinas kabupaten mengenai peningkatan kualitas pendidikan. Probolinggo telah menjadi proyek percontohan untuk memperkaya peran LPMP dan proses untuk memberikan dukungan bagi pengawas.

Faktor eksternal yang mendukung inovasi di kabupaten ini berkaitan dengan keragaman budaya dan suku bangsa yang tersebar di kabupaten – Pandalungan, Tengger, Osing, Arek, Madura dan Mataraman. Situasi geografis dari Probolinggo, yang dipenuhi pegunungan dan pantai, juga menciptakan kebutuhan untuk menjadi fleksibel dan inovatif dalam mengelola sekolah.

Dinas pendidikan kabupaten juga memfasilitasi inovasi melalui kompetisi Inobel (Inovasi Belajar). Hasil dari kompetisi ini dicatat dalam buku berjudul Bunga rampai kumpulan praktik baik, yang ditulis oleh berbagai pengawas, dan mencakup inovasi dari guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ketika dibagikan ke sekolah-sekolah, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi kepala sekolah dan guru lain untuk menduplikasi atau mengembangkan praktik baik yang serupa atau lebih baik.

Sebuah laporan mutu pendidikan dari seluruh kabupaten dibuat berdasarkan kuesioner penjaminan mutu pendidikan, yang dikelola LPMP, dan sudah *online* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Delapan standar nasional pendidikan digunakan untuk menentukan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Hasil dari kuesioner ini akan digunakan untuk mengembangkan program-program peningkatan sekolah.

Selain itu, tiap tahun seluruh pejabat pemerintah harus menulis rencana kinerja, yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka di akhir tahun. Peraturan ini berujung pada diadakannya kontrak antara dinas kabupaten dan setiap kepala sekolah dalam kaitannya dengan bagaimana rencana mereka akan mendukung peningkatan sekolah lebih lanjut di tahun berikutnya – termasuk hal-hal seperti memperbaiki hasil ujian nasional dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sekolah, sebagaimana dinilai dengan survei kepuasan yang disusun oleh pihak sekolah.

**Kesimpulan:**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, yang dulu adalah mantan direktur kantor Bappeda setempat, menyebutkan bahwa semua manajemen senior di dinas tidak memiliki pengalaman profesional di bidang pendidikan. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, seperti keuangan, pertanian, dan kesehatan. Ia menyakini variasi latar belakang ini berguna untuk menyumbangkan perspektif baru tentang pendidikan di kabupaten Probolinggo.

## **Peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang**

**Institusi:** Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Malang

### **Tujuan:**

Berdasarkan visi dan misi Kota Malang, salah satu tujuan besar dari dinas pendidikan kabupaten/kota adalah memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

### **Uraian kegiatan:**

Agar sejalan dengan visi dan misi Kota Malang untuk menjadi unggul di segala bidang, dinas pendidikan kabupaten/kota telah diimbau oleh wali kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan karena itu, banyak inovasi di tingkat kota dan sekolah difokuskan untuk mencapai tujuan ini. Kepala Dinas yang proaktif sendiri telah mengembangkan beberapa inovasi untuk kota Malang, antara lain:

- Sekolah 3M – mudah mencari sekolah, murah, dan merata
- Festival Sekolah Hijau yang diselenggarakan di tahun 2014, hasilnya seluruh sekolah dianggap sekolah 'hijau'
- Kerja sama dengan Radar Malang (surat kabar) untuk meningkatkan visibilitas kegiatan peningkatan sekolah
- Menyediakan 16 bis sekolah untuk siswa miskin lewat APBD
- Kebijakan sekolah sehari penuh, yang menghasilkan lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan nilai para siswa
- Museum pendidikan
- Situs web untuk menampung komentar dan keluhan dari orang tua dan masyarakat

Ada komitmen yang kuat untuk memastikan meratanya kualitas pendidikan di semua sekolah. Anggota kelompok kerja guru bertemu setiap bulan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang mereka terima dari pelatihan. Rapat bulanan ini membantu untuk memastikan kualitas pendidikan di semua sekolah. Wali Kota Malang juga telah mengundang seluruh rektor universitas untuk memberikan masukan terhadap pendidikan di Kota Malang.

### **Kesimpulan:**

Ada banyak inovasi yang dikembangkan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai inovasi yang dikembangkan ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh sekolah di Kota Malang. Praktik yang dilakukan dinas pendidikan kabupaten/kota di Malang dapat ditampilkan ke kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. Rapat koordinasi dwi-bulanan yang baru-baru ini diselenggarakan, yang menghadirkan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur, merupakan kesempatan emas untuk menyebarluaskan inovasi dan praktik baik ini kepada semua pihak.

## REFERENSI

- Amorim E, J Stevens dan L Gacougnolle (2010) *Timor-Leste – An analysis of early grade reading acquisition (English)*, Washington DC: Bank Dunia. Tersedia *online* di: <http://documents.worldbank.org/curated/en/210411468117254153/Timor-Leste-An-analysis-of-early-grade-reading-acquisition>
- Andrews M, L Pritchett dan M Woolcock (2017) *Building state capacity*, Oxford: Oxford University Press.
- Bank Dunia *et al.* (2018) [2015 PISA: Its development and Indonesia results analysis] *Penilaian dan Analisis Hasil PISA Indonesia 2015 dan Perkembangannya*, Jakarta: Bank Dunia.
- Burghes D (ed) (2012) *Enhancing primary mathematics teaching and learning*, Laporan riset. Bacaan: CfBT Education Trust, Tersedia *online* di: <https://www.cimt.org.uk/papers/epmtl.pdf>
- Chang MC, S Shaeffer, S Al-Samarrai, AB Ragatz, J de Ree dan R Stevenson (2013) *Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence in policy making*, Washington DC: Bank Dunia, Tersedia *online* di: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16355>
- de Ree J, K Muralidharan, M Pradhan dan H Rogers (2017) 'Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia', *Quarterly Journal of Economics* 133(2): 993–1039, doi: 10.1093/qje/qjx040.
- Fullan M (2014) *The principal: three keys to maximizing impact*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Fullan M (2015) 'Maximising school and system leadership: A conversation with Professor Michael Fullan', Wawancara oleh Dr Manoj Chandra Handa, Leadership, Student Voice, Teacher Effectiveness, 28 Februari 2015, Tersedia *online* di: <http://www.oceansofexcellence.com/maximising-school-and-system-leadership-a-conversation-with-professor-michael-fullan/>
- Fullan M, dan J Quinn (2016) *Coherence: Putting the right drivers into action*, Thousand Oaks CA: Corwin.
- Geoghegan T (2018) *The many faces of exclusion: end of childhood report 2018*, Fairfield, CT: Save the Children, Tersedia *online* di: <https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/2018-end-of-childhood-report.pdf>
- Gove A dan P Cvelich (2010) *Early reading: igniting education for all*, Laporan dari Early Grade Learning Community of Practice, Research Triangle Park NC: Research Triangle Institute.
- Hall N., J Larson dan J Marsh (eds) (2003) *Handbook of early childhood literacy*, Thousand Oak CA: SAGE Publications.
- Hargreaves A (2016) 'The place for professional capital and community', *Journal of Professional Capital and Community* 1 ( 1), doi: 10.1108/JPC-11-2015-0010.
- Hattie J (2003) *Teachers make a difference: What is the research evidence?*, Auckland: University of Auckland.
- INOVASI (2017) *Rencana Tahunan Januari–Desember 2018*, Jakarta. INOVASI.
- INOVASI (2018) [Good practices in education in east Java], *Praktik-Praktik Baik di Pendidikan Dasar di Jawa Timur*, Jakarta: INOVASI.
- International Monetary Fund (IMF) (2016) *Asia and the Pacific: building on Asia's strengths during turbulent times*, IMF Regional economic outlook series, Washington DC: IMF.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) (tanpa tanggal) Statistik Pusat Asesmen Pendidikan. Tersedia *online* di: <https://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/kategori>

Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia (2009), *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi*, Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Ministry of Education and Science, Spain (1994) *The Salamanca statement and framework for action on special needs education*, Diadopsi oleh World Conference on Special Needs Education: Access and Quality Salamanca, Spanyol, 7-10 Juni, 1994, Madrid: Ministry of Education and Science.

Morin A. (tanpa tanggal) 'Math skills: What to expect at different ages', In *Understood*, Tersedia *online* di: <https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/math-skills-what-to-expect-at-different-ages>

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2014) *Measuring innovations in education: A new perspective*, Educational Research and Innovation, Paris: OECD Publishing doi: 10.1787/9789264215696-en.

Pemerintah Indonesia (2010), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Program for International Student Assessment (PISA) (2016) *PISA 2018 draft analytical frameworks*, Paris: OECD.

Rarasati N, D Nugroho, D Suryadarma, S Kurniawati, M Akrom, RP Artha, CT Wanita *et al.* (2017) *Interventions, practices and contextual factors linked to Indonesian students' literacy and numeracy outcomes: A systematic review*, Jakarta: INOVASI.

Roskos K, D Strickland, J Haase dan S Malik (2009) *First principles for early grades reading programs in developing countries*, Washington DC: USAID/AIR/IRA.

Rowe K dan National Inquiry into the Teaching of Literacy (Australia) (2005) *Teaching reading*, [https://research.acer.edu.au/till\\_misc/5](https://research.acer.edu.au/till_misc/5).

RTI International (2009) *Early reading assessment toolkit*, Research Triangle Park NC: Research Triangle Institute.

Shaeffer S (2010) *Strengthening inclusive education*, Manila: Asian Development Bank.

Segal M, B Bardige, M Jean Woika dan J Leinfelder (2006) *All about child care and early education: A comprehensive resource for childcare professionals*, Boston: Allyn & Bacon.

Stern JMB, MM Dubeck dan A Dick (2018) 'Using Early Grade Reading Assessment (EGRA) data for targeted instructional support: Learning profiles and instructional needs in Indonesia', *International Journal of Educational Development* 61: 64–71, Durham NC: RTI International, doi: 10.1016/j.ijedudev.2017.12.003.

Technical Assessment for Education System Strengthening (TASS) (tanpa tanggal) [Review of the Student Learning Assessment system and report on learning outcomes], *Tinjauan Sistem Penilaian Belajar Siswa, dan Pelaporan Hasil Belajar*, Jakarta: TASS.

The HEAD Foundation (2018) *Improving teacher education in Indonesia*, Ringkasan Kebijakan No 6, Singapura: The HEAD Foundation.

UNESCO (2009) *Inclusive education: The way of the future, International Conference on Education*, Paris: UNESCO.

UNESCO Institute of Statistics (UIS) (2017) *More than one-half of children and adolescents are not learning worldwide*, Lembar fakta UIS No 46, Montreal: UIS.

UNESCO Institute of Statistics (2018) *Education and disability: analysis of data from 49 countries*, Kertas informasi No 49, Paris: UNESCO.

Van de Walle JA, KS Karp dan JM Bay-Williams (2012) *Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally*, edisi kedelapan, London: Pearson Education Inc.